LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LABUAN BAJO
TAHUN 2023-2044

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LABUAN BAJO TAHUN 2023-2044

BAB I. VISI, MISI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Latar Belakang

Perkembangan pariwisata di Indonesia membutuhkan fokus penanganan yang lebih intensif. Pemerintah telah menginisiasi sepuluh destinasi pariwisata prioritas yang akhirnya difokuskan lagi menjadi 5 destinasi super prioritas dalam upaya mempercepat transformasi ekonomi, dari ekonomi berbasis sumber daya alam, menjadi sektor ekonomi yang bertumpu pada perubahan nilai ekonomi atau nilai jual. Destinasi Labuan Bajo menjadi salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang diharapkan menjadi salah satu destinasi yang dapat mempercepat dan meningkatkan kontribusi pariwisata untuk perekonomian nasional, hingga 8% dari total PDB dan devisa pariwisata sebesar 100 miliar USD pada 2045. Pengembangan Pariwisata pada destinasi Labuan Bajo diharapkan dapat memperkuat perkembangan Pariwisata berkelanjutan dan dalam konteks Labuan Bajo, harus dikembangkan sebagai destinasi premium.

Destinasi premium dapat dipahami sebagai destinasi yang memberikan pelayanan yang prima dan menawarkan kualitas produk yang unik, bernilai tinggi, dan dinikmati secara terbatas. Selain itu, Keane (1997) menjelaskan bahwa pengelolaan destinasi ini sangat penting untuk mempertahankan kualitas pelayanan, produk, dan jasa pariwisata. Akhrani dan Azhar (2021) menjelaskan bahwa konsep premium dapat mengarah pada segmen wisatawan tertentu, sehingga akan berdampak pada pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke sebuah destinasi. Dalam konteks Labuan Bajo, destinasi premium dapat dimaknai sebagai destinasi yang mempunyai karakter dan kearifan lokal, memiliki kualitas produk dan layanan yang bernilai tinggi dan memenuhi standar internasional, serta menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan jenis Pariwisata yang spesifik dan juga pola perjalanan yang telah disiapkan pemerintah, maka penting untuk melihat kondisi dasar Pariwisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Data jumlah kunjungan wisatawan ke Manggarai barat menunjukkan bahwa setelah tahun 2019, terjadi penurunan yang drastis atas kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik ke Manggarai Barat. Jumlah kunjungan wisatawan terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 256,609 orang.

Dilihat dari sisi proporsi antara wisatawan mancanegara dan nusantara, terlihat bahwa selama ini Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo lebih banyak menarik minat wisatawan mancanegara. Sampai dengan tahun 2016, porsi wisatawan mancanegara masih mencapai lebih dari 60% dari total wisatawan. Mulai tahun 2017 terjadi peningkatan wisatawan nusantara ke Manggarai Barat, sehingga porsi wisatawan nusantara meningkat. Pandemi COVID-19 juga mengubah proporsi wisatawan. Pada tahun 2020 dan 2021, wisatawan domestik sebanyak 58.58% dan 89.28%, sedangkan sisanya adalah wisatawan mancanegara. Hal ini kemungkinan disebabkan dilarangnya mobilitas warga negara asing masuk ke Indonesia.

Dari data kunjungan Sustour (2019) terlihat bahwa profil wisatawan yang datang ke Labuan Bajo dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung stabil. Wisatawan nusantara mayoritas berasal dari Jawa, Bali, dan Sumatera dengan rentang usia 23-37 tahun, sementara pada 2020, terlihat pertambahan wisatawan muda (18-25 tahun) dari Jakarta. Wisatawan mancanegara kebanyakan dari Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Perancis dengan rentang usia 18-37 tahun, tapi juga terlihat peningkatan usia (46-55 tahun) pada 2020.

Pola pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara cenderung serupa dengan mayoritas menghabiskan di kisaran Rp 3-12 juta, namun beberapa wisatawan mancanegara mengeluarkan lebih dari Rp 20 juta. Aktivitas utama wisatawan adalah selam, *snorkeling*, dan kegiatan wisata, dengan sedikit belanja cendera mata. Labuan Bajo masih belum sepenuhnya menjadi destinasi premium, namun terlihat peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan yang didukung oleh perbaikan kualitas akomodasi dan variasi atraksi di kawasan tersebut. Wisatawan mancanegara rata-rata menghabiskan waktu lebih lama (6,49 hari) dan mengeluarkan lebih banyak uang (Rp 12,3 juta) daripada wisatawan nusantara (5,28 hari, Rp 89,44 juta).

Sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang merupakan proksi dari sektor Pariwisata, sejak 2010 sampai 2021 secara rata-rata hanya memberikan kontribusi sebesar 0.61%. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tertinggi terjadi di tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 0.74% dan 0.78%. Pada tahun 2020 dan 2021, akibat COVID-19,

sektor ini hanya mampu berkontribusi sebesar 0.51% dan 0.55%. Pertumbuhan sektor Pariwisata tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 14.60% jauh di atas pertumbuhan sektor utama Manggarai Barat yaitu Pertanian. Pada tahun 2017 sampai 2019, pertumbuhan masih positif meskipun mengalami pelambatan, berturut-turut sebesar 12.26%, 12.58% dan 11.67%.

Pengembangan DPN Labuan Bajo tidak lepas dari tantangan. Tantangan yang muncul adalah: (1) daya dukung dan daya tampung di Kawasan Taman Nasional Komodo; (2) adanya keterbatasan SDM Pariwisata, sehingga memunculkan potensi masuknya SDM di luar Manggarai Barat yang dapat menggeser SDM lokal; (3) kurangnya pengaturan kegiatan penyelaman dan *snorkeling* laut; (4) kurangnya pengaturan kapal pesiar yang membawa banyak wisatawan ke Taman Nasional Komodo; (5) kualitas dan kuantitas infrastruktur telah menjadi hambatan bagi pengembangan daya tarik Pulau Flores; (6) kurangnya stabilitas dalam pasokan makanan dari luar Manggarai Barat juga telah berdampak pada industri makanan dan minuman; (7) kontribusi Pariwisata terhadap ekonomi lokal masih terbatas, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja di sektor perhotelan yang mayoritas diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah; (8) kurangnya kebijakan Pariwisata yang berbasis pada pemahaman yang komprehensif tentang wisatawan, termasuk pemahaman akan kebutuhan, kepuasan, dan pola perjalanan mereka; dan (9) terkendalanya seni dan budaya sebagai atraksi Pariwisata karena kurangnya fasilitas representatif dan minimnya pertunjukan yang terorganisir secara teratur untuk para wisatawan.

Hasil pemetaan dan analisis terhadap isu dan tantangan dalam pengembangan DPN Labuan Bajo dituangkan dalam RIDPN Labuan Bajo yang terdiri atas:

1. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
2. sasaran dan arah pengembangan;
3. pelaksanaan pengembangan; dan
4. rencana aksi.

B. Visi

Visi pengembangan DPN Labuan Bajo merupakan wujud dari tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang yang dapat menunjukkan cita-cita, impian, atau tujuan dalam bentuk yang singkat, jelas, dan fokus. Masyarakat memiliki pedoman hidup seperti yang tersirat pada petuah leluhur yaitu *"Muku ca pu'u neka woleng curup, teu ca ambo neka woleng lako"* yang berarti pisang satu rumpun tidak boleh berbeda-beda cara berpikir, tebu satu rumpun langkah-langkahnya tidak boleh berbeda untuk mencapai satu titik.

Secara umum dapat diartikan bahwa kesuksesan sebuah tujuan dapat diwujudkan dengan satu pikiran dan satu langkah. Hal ini menjadi dasar perumusan visi pengembangan DPN Labuan Bajo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium perlu meningkatkan kapasitasnya sebagai destinasi yang mempunyai produk dan pelayanan berkualitas, berdaya saing, dan berkelas dunia; serta
2. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan di Kawasan Labuan Bajo akan mendorong dampak atau manfaat langsung dari penyelenggaraan Pariwisata, sehingga pengembangan Pariwisata di Kawasan Labuan Bajo akan berkelanjutan.

Gambaran besar pembangunan Pariwisata di DPN Labuan Bajo dalam jangka panjang tertuang dalam visi yang jelas dan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Berikut adalah visi pembangunan kepariwisataan di DPN Labuan Bajo adalah:

"Terwujudnya DPN Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium berbasis ekowisata yang berdaya saing, inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur secara umum"

Pengembangan Kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi Pariwisata premium membutuhkan citra yang positif sebagai sebuah destinasi wisata berbasis ekowisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Pemantapan citra Labuan Bajo didasarkan pada Keputusan Menteri Pariwisata KM.38/UM.001/MP/2017 tentang Logo *Branding* 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Indonesia, termasuk Kawasan Labuan Bajo dengan citra *Enchanting Labuan Bajo*.

Gambar 1. Citra Pariwisata Labuan Bajo
Sumber: Kementerian Pariwisata, 2017

Logo citra di atas adalah *Enchanting Labuan Bajo* atau Labuan Bajo memesona, dengan terdapat gambar Komodo, perbukitan, laut/bahari, dan manta. Dapat disimpulkan bahwa Labuan Bajo mempunyai daya tarik alam dan bahari dengan ikon satwa Komodo (daratan) dan Manta (perairan). Berdasarkan perkembangan Pariwisata yang ada, pembentukan strategi pemasaran untuk Labuan Bajo dibutuhkan tidak hanya untuk mengenalkan Labuan Bajo kepada investor dan wisatawan, tetapi juga untuk mengangkat peran masyarakat dalam memperkuat citra kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata bertaraf internasional yang diakui sebagai UNESCO *World Heritage Site* dan sesuai dengan visi pemerintah.

C. Misi

Misi pengembangan destinasi Pariwisata DPN Labuan Bajo adalah:

1. mewujudkan destinasi Pariwisata premium yang:
    a. memiliki keunikan dan kekhasan dengan karakter dan kearifan lokal bercita rasa internasional;
    b. mampu menarik wisatawan mancanegara dan nusantara untuk datang berkunjung;
    c. memiliki kualitas produk dan layanan yang memenuhi standar internasional;
    d. memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi wisatawan;
    e. mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia dan menjadi kebanggaan nasional.
2. mewujudkan destinasi Pariwisata berbasis ekowisata yang kreatif dan inovatif, dengan mengelola sumber daya alam dan budaya masyarakat lokal secara bertanggung jawab.
3. mewujudkan destinasi Pariwisata yang inklusif, yaitu destinasi yang terbuka, toleransi, berinteraksi dengan keberagaman tradisi, budaya, dan kepercayaan.
4. mewujudkan destinasi berkelanjutan, yang bertumpu pada konservasi lingkungan, keberterimaan sosial budaya, serta kelayakan ekonomi.
5. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global, yang unik, menarik, berkualitas, aman, ramah, memberikan kepuasan, dan pengalaman dalam berwisata, serta mengangkat rasa kebanggaan nasional.
6. mendorong pembangunan daerah Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur yang mampu memberikan efek berganda Pariwisata tinggi, mampu menggerakkan mata rantai pembangunan daerah, dan menurunkan kemiskinan.

7. mewujudkan destinasi Pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan.
8. mengembangkan kelembagaan Pariwisata yang sinergis, efektif, dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
9. meningkatkan kemudahan investasi dan birokrasi dalam rangka membuka peluang investasi yang terbuka dan bertanggung jawab.

D. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijelaskan di atas, pengembangan Pariwisata di DPN Labuan Bajo bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. meningkatkan kualitas infrastruktur aksesibilitas dan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas dan usaha Pariwisata;
3. meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang digerakkan oleh sektor Pariwisata; dan
4. mendorong investasi swasta yang bernilai tambah tinggi.

E. Strategi

Untuk mencapai tujuan di atas, dirumuskan strategi yang mendasari perencanaan DPN Labuan Bajo sebagai berikut.

1. pengembangan daya tarik ekowisata dengan prinsip konservasi dan menjaga daya dukung Pariwisata;
2. pengembangan Pariwisata berkualitas dan premium yang inklusif;
3. pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab dan ramah lingkungan;
4. kemitraan dan kolaborasi industri Pariwisata;
5. kelembagaan Pariwisata yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik;
6. konektivitas jaringan transportasi dan infrastruktur;
7. perluasan pengembangan kawasan sampai ke seluruh Flores sebagai bentuk pemerataan dan distribusi daya dukung kawasan;
8. keterlibatan dan kapasitas masyarakat lokal yang terampil, berkualitas, dan tangguh;
9. penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim bisnis usaha Pariwisata yang sehat; dan
10. investasi yang terbuka dan bertanggung jawab.

F. Ruang Lingkup

1. Peraturan Perundangan sebagai Dasar Pembangunan Kepariwisataan

Ruang lingkup wilayah dan substansi dari RIDPN Labuan Bajo mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya dan memadukan rencana yang relevan dengan kebutuhan pengembangan Pariwisata di DPN Labuan Bajo ke depan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
i) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
j) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
k) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
l) Peraturan Presiden 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, sebagaimana telah

diubah 3 kali melalui Perpres 40/2107, Perpres 14/2018, dan Perpres 26/2022;

m) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
n) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
o) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

Selain peraturan perundang-undangan di atas, juga perlu memperhatikan:

a) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
b) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah;
d) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
e) Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 32 tanggal 24 Juni 1969 mengenai Penunjukan Pulau-pulau Rinca, Wae-Wuul/Mburak sebagai Hutan wisata/Suaka Alam;
f) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 – 2032;
g) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014-2025;
h) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah;
i) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
j) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

k) Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Manggarai Barat; dan

l) Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.

2. Delineasi Wilayah Pembangunan Kepariwisataan

Labuan Bajo merupakan kawasan yang masuk dalam DPN Komodo – Ruteng dan sekitarnya sebagai salah satu dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional. Destinasi ini dibentuk oleh keterkaitan dari 3 kawasan, antara lain: (1) KSPN Komodo dan sekitarnya; (2) KPPN Labuan Bajo dan sekitarnya; dan (3) KPPN Ruteng dan sekitarnya, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut.

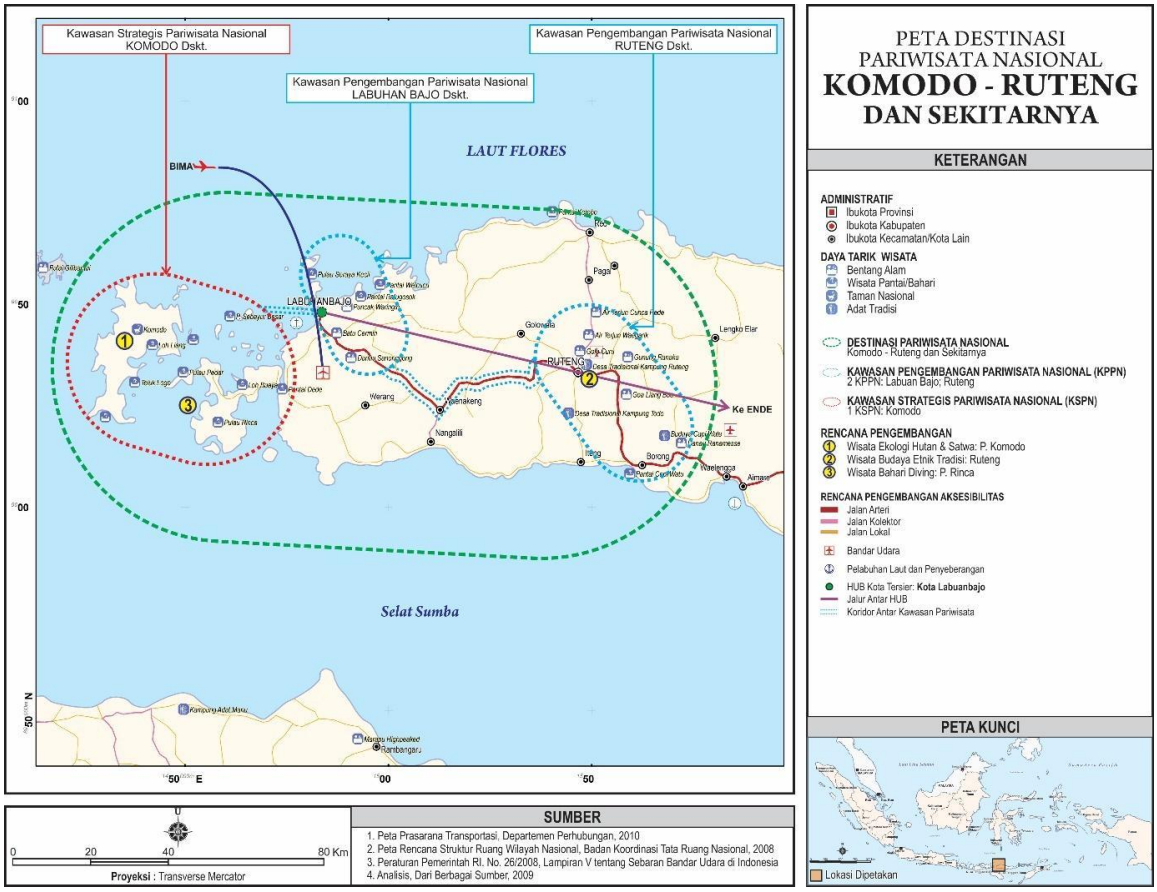

Gambar 2. DPN Komodo–Ruteng dskt
Sumber: RIPPARNAS, 2011

DPN Komodo – Ruteng merupakan destinasi yang secara administratif masuk ke dalam kawasan Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten

Manggarai Barat, terletak di sebelah barat daratan di Pulau Flores, yang dibentuk berdasarkan pemekaran dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Luas Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.463,50-kilometer persegi, yang terdiri atas total daratan seluas 2.947,50-kilometer persegi, serta luas lautan sebesar 6.525-kilometer persegi. Kabupaten ini berbatasan dengan Selat Sape di sebelah barat, Kabupaten Manggarai di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara, dan Laut Sawu di sebelah selatan. Dari letak garis astronomis, Kabupaten Manggarai Barat berada di antara 8.14 Lintang Selatan sampai 9 Lintang Selatan (080° 29' 16'' LS), serta 119.21 Bujur Timur sampai 120.30 Bujur Timur (119° 52' 10" BT).

DPN Labuan Bajo mempunyai lingkup adalah Kabupaten Manggarai Barat serta KTA *(Key Tourism Areas)* terdiri atas dua kawasan yaitu KTA 1 Taman Nasional Komodo dan KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya. Delineasi KTA Taman Nasional Komodo mengikuti delineasi yang ditetapkan oleh Balai Taman Nasional Komodo, sehingga batas wilayahnya sudah jelas. Sedangkan KTA Labuan Bajo didasarkan pada kedudukan Labuan Bajo sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Nilai strategis Kota Labuan Bajo dapat dilihat dari berbagai perencanaan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Luas KTA 1 Taman Nasional Komodo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 172/KPTS-II/2000 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo, yaitu seluas 173.300 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus) Hektare. Sedangkan wilayah KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya mencakup Kecamatan Komodo di luar Taman Nasional Komodo. Berikut cakupan kawasan KTA.

Tabel 1. Cakupan Kawasan KTA dan Sub-KTA

KTA	Sub-KTA	Desa/Kelurahan
KTA 1 Taman Nasional Komodo	-	a. Desa Komodo b. Desa Papa Garang c. Desa Pasir Panjang d. sebagian Desa Golo Mori (Gili Motang)
KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	Labuan Bajo Perkotaan	Kelurahan Labuan Bajo
	Batu Cermin—Wae Kelambu	Kelurahan Wae Kelambu

KTA	Sub-KTA	Desa/Kelurahan
	Gorontalo—Golo Bilas	a. Desa Gorontalo b. Desa Golo Bilas c. Desa Golo Pongkor d. Desa Macang Tanggar
	Golo Mori—Warloka	a. Desa Compang Longgo b. Desa Golo Mori c. Desa Tiwu Nampar d. Desa Warloka
	Labuan Bajo Perairan	a. Desa Pasir Putih b. Desa Seraya Maranu
	Longos	a. Desa Golo Sepang b. Desa Nanga Kantor Barat c. Desa Pontianak d. Desa Sepang
	Boleng - Goa Rangko	Desa Tanjung Boleng
	Mbeliling - Cunca Wulang	a. Desa Cunca Lolos b. Desa Cunca Wulang c. Desa Golo Damu d. Desa Liang Ndara e. Desa Nggorang f. Desa Pantar g. Desa Tondong Belang h. Desa Wae Lolos i. Desa Watu Nggelek
	Sano Nggoang	a. Desa Wae Sano b. Desa Sano Nggoang
	Ndoso - Golo Lesu	a. Desa Ndoso b. Desa Pateng Lesu
	Lembor - Poco Rutang	a. Desa Poco Rutang b. Desa Daleng c. Desa Watu Tiri d. Desa Repi e. Desa Nampar Macing

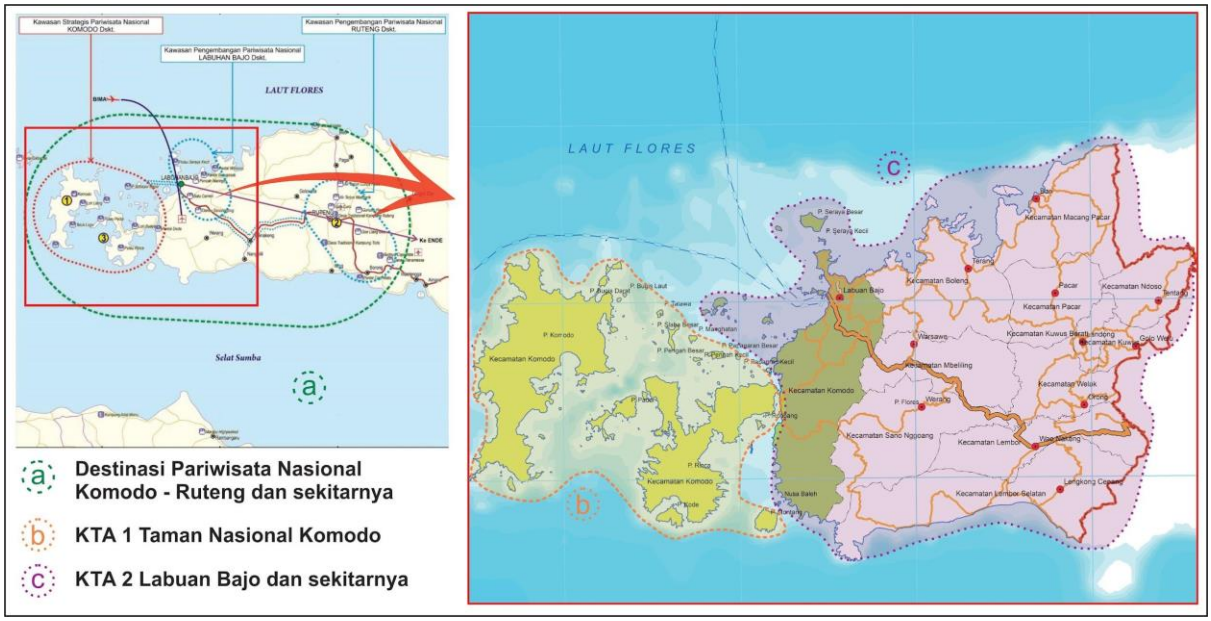

Gambar 3. Delineasi KTA RIDPN Labuan Bajo

3. Daya Tarik Wisata DPN Labuan Bajo

Labuan Bajo memiliki daya tarik wisata alam, termasuk wisata bahari dan budaya. Berikut ini adalah daftar destinasi wisata Labuan Bajo pada tahun 2021.

Tabel 2. Daftar Daya Tarik Wisata DPN Labuan Bajo

No	Nama Daya Tarik Wisata	Desa/Kelurahan	Jenis DTW
KTA1 Taman Nasional Komodo			
1.	Lih Tala	Komodo	Alam
2.	Loh Gili Lawa	Komodo	Alam
3.	Pantai Merah	Komodo	Alam
4.	Pulau Lasa	Komodo	Alam
5.	Pulau Penya	Komodo	Alam
6.	Tanjung Sera	Komodo	Alam
7.	Loh Liang	Komodo	Alam
8.	Loh Kima	Pasir Panjang	Alam
9.	Loh Udasami	Pasir Panjang	Alam
10.	Pulau Kelor	Pasir Panjang	Alam
11.	Pulau Mote	Pasir Panjang	Alam
12.	Pulau Padar	Pasir Panjang	Alam

No	Nama Daya Tarik Wisata	Desa/Kelurahan	Jenis DTW
13.	Loh Buaya	Pasir Panjang	Alam
14.	Pulau Pungu	Pasir Putih	Alam
15.	Desa Wisata Komodo	Komodo	Budaya
16.	Desa Wisata Pasir Panjang	Pasir Panjang	Budaya
KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya			
1.	Batu Cermin	Batu Cermin	Alam
2.	Batu Gosok	Batu Cermin	Alam
3.	Batu Susun	Batu Cermin	Alam
4.	Klumpang	Batu Cermin	Alam
5.	Pulau Seraya Kecil	Batu Cermin	Alam
6.	Tanjung Rangko	Batu Cermin	Alam
7.	Toro Sitangga	Batu Cermin	Alam
8.	Gunung Mbeliling	Cunca Lolos	Alam
9.	Air Terjun Cunca Wulang	Cunca Wulang	Alam
10.	Puncak Eltari	Golo Damu	Alam
11.	Golo Mori	Golo Mori	Alam
12.	Muara Nggoer	Golo Mori	Alam
13.	Pulau Kanawa	Golo Mori	Alam
14.	Air Terjun Cunca Rami	Golo Ndaring	Alam
15.	Pulau Burung	Gorontalo	Alam
16.	Pantai Gorontalo	Gorontalo	Alam
17.	Pantai Menjerite	Gorontalo	Alam
18.	Pantai Pede	Gorontalo	Alam
19.	Bukit Binongko	Labuan Bajo	Alam
20.	Bukit Sylvia	Labuan Bajo	Alam
21.	Pantai Wae Cicu	Labuan Bajo	Alam
22.	Pantai Wae Rana	Labuan Bajo	Alam
23.	Pulau Bidadari	Labuan Bajo	Alam
24.	Pulau Konawa	Labuan Bajo	Alam
25.	Puncak Pramuka	Labuan Bajo	Alam

No	Nama Daya Tarik Wisata	Desa/Kelurahan	Jenis DTW
26.	Pulau Sebayur	Labuan Bajo	Alam
27.	Pulau Seraya	Labuan Bajo	Alam
28.	Pulau Sabolo	Labuan Bajo	Alam
29.	Pulau Sture	Labuan Bajo	Alam
30.	Bukit Lemes	Macang Tanggar	Alam
31.	Pulau Sitonda	Macang Tanggar	Alam
32.	Hutan Bakau	Pontianak	Alam
33.	Pulau Longos	Pontianak	Alam
34.	Goa Rangko	Rangko	Alam
35.	Desa Wisata Sano Nggoang	Sano Nggoang	Alam
36.	Wae Bobok	Tanjung Boleng	Alam
37.	Air Terjun Cunca Perlamping	Tondong Belang	Alam
38.	Danau Sano Nggoang	Wae Sano	Alam
39.	Bukit Indah Warloka	Warloka	Alam
40.	Bukit Sasha	Warloka	Alam
41.	Loh Desaining	Warloka	Alam
42.	Pulau Kalong	Warloka	Alam
43.	Situs Megalitik Kompo Nepa	Warloka	Alam
44.	Watu Panggal	Watu Panggal	Alam
45.	Perbukitan Golo Lesu	Waning	Alam
46.	Pantai Mberenang	Watu Tiri	Alam
47.	Desa Wisata Batu Cermin	Batu Cermin	Budaya
48.	Desa Wisata Gorontalo	Gorontalo	Budaya
49.	Desa Wisata Melo	Liang Ndara	Budaya
50.	Desa Wisata Liang Ndara	Liang Ndara	Budaya
51.	Kampung Tado	Nampar Macing	Budaya
52.	Kubur Tua Nggerang	Ndoso	Budaya
53.	Sawah Lodok	Poco Rutang	Budaya
54.	Desa Wisata Pontianak	Pontianak	Budaya
55.	Desa Wisata Warloka Pesisir	Warloka	Budaya

No	Nama Daya Tarik Wisata	Desa/Kelurahan	Jenis DTW
56.	Desa Wisata Pasir Putih	Labuan Bajo	Buatan
57.	Puncak Waringin	Labuan Bajo	Buatan

Selain titik daya tarik di atas, terdapat beberapa pengembangan kawasan Pariwisata baru yang berada pada KTA Labuan Bajo dan sekitarnya, antara lain:

a) Bukit Budaya Bajo *(The Cultural Hills of Bajo)*

Bukit Budaya Bajo merupakan inisiatif pengembangan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF), BOPLBF merupakan organisasi yang salah satu tugasnya melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Dengan tugas dalam melakukan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan maka BOPLBF merencanakan pengembangan Bukit Budaya Bajo. Pengembangan kawasan Bukit Budaya Bajo berada di bukit sebelah timur Perkotaan Labuan Bajo dan berada di lahan otorita BOPLBF.

Berdasarkan lokasi dengan kawasan perkotaan Labuan Bajo, kawasan Bukit Budaya Bajo berada pada kawasan di sebelah timur dan terletak di perbukitan dengan elevasi yang lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan. Akses eksisting dari kawasan perkotaan hingga kawasan ini dapat menggunakan Jalan Trans Flores yang melewati sebelah barat dari kawasan Bukit Budaya Bajo dan jarak tempuh sekitar 10 menit dari perkotaan Labuan Bajo. Kawasan sekitar Bukit Budaya Bajo secara eksisting tidak berada pada kawasan perkotaan karena perbedaan elevasi antara kawasan ini dengan kawasan perkotaan yang berada di sebelah Barat.

b) Kawasan Tana Mori

Tana Mori merupakan salah satu kawasan yang berada 22 km di sebelah selatan perkotaan Labuan Bajo dan masih berada satu kecamatan dengan Labuan Bajo. Aksesibilitas menuju kawasan ini sedang dalam proses pengembangan di tahun 2022 dan pada tahun 2023 sudah memiliki aksesibilitas yang baik. Pengembangan infrastruktur bagi kawasan Tana Mori selain jalan akses pada tahap awal digunakan untuk memenuhi kegiatan G20. Sumber air bersih untuk tahap pertama masih menggunakan sumur *deep well* sedangkan untuk tahap selanjutnya akan dikembangkan bendungan di Sungai Wae Renca oleh Kementerian PUPR sebagai sumber air kawasan Tana Mori. Sumber energi sudah mencapai kesepakatan dengan

PLN bahwa kawasan Tana Mori akan menjadi konsumen *high end*. Untuk menguatkan citra kawasan seluruh jaringan utilitas yang akan dibangun di dalam kawasan ini akan berada di bawah tanah.

4. Struktur Laporan RIDPN Labuan Bajo

Laporan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional tertuang pada lampiran Rencana Peraturan Presiden tentang RIDPN terdiri atas empat bab, antara lain:

Bab I Visi, Misi, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pada bagian ini akan memuat beberapa hal antara lain: (1) latar belakang, yang berisi tentang peran Pariwisata pada perekonomian Indonesia, jabaran Labuan Bajo sebagai destinasi Pariwisata super prioritas, performansi kunjungan wisatawan, kontribusi sektor Pariwisata, Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia UNESCO, serta tantangan dan nilai strategis pengembangan RIDPN Labuan Bajo. (2) visi, misi, dan tujuan pengembangan DPN Labuan Bajo; serta, (3) ruang lingkup, yang terdiri dari peraturan perundangan sebagai dasar pembangunan kepariwisataan, delineasi wilayah pembangunan kepariwisataan, daya tarik wisata, dan struktur laporan RIDPN.

Bab II Sasaran dan Arah Pengembangan

Pada bagian ini berisi tentang (1) sasaran, yang memuat tentang proyeksi dan kebutuhan tenaga kerja serta lahan sampai tahun 2044. Serta (2) arah pengembangan, yang berisi tentang arah pengembangan untuk 22 tahun dengan penahapan setiap 5 tahun.

Bab III Pelaksanaan Pengembangan

Pada bagian ini akan secara detail menjelaskan tentang perwilayahan; daya tarik wisata; aksesibilitas; prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata; pemberdayaan masyarakat; pengembangan investasi; dan, pengelolaan DPN Labuan Bajo.

Bab IV Rencana Aksi

Bagian ini menjelaskan tentang rencana aksi pada penahapan pertama pada tahun 2023-2024 di DPN Labuan Bajo.

BAB II. SASARAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

A. Sasaran

Sasaran pengembangan Pariwisata di DPN Labuan Bajo berprinsip pemerataan di seluruh kawasan pengembangan dan tidak hanya bertumpu pada Taman Nasional Komodo secara distribusi wisatawannya. Dari proses dan tahapan pemilihan skenario, dihasilkan bahwa skenario *Akselerasi* menjadi pilihan prioritas skenario pengembangan jangka panjang.

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan DPN Labuan Bajo sampai tahun 2044 dibagi menjadi lima tahapan, yaitu tahap pemulihan, percepatan 1, percepatan 2, percepatan 3, dan pemantapan. Tahapan ini dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Pembangunan Kepariwisataan DPN Labuan Bajo 2024—2044

Indikator	Target				
	2024	2029	2034	2039	2044
Wisatawan Mancanegara (Kunjungan	242.588	404.347	460.414	495.073	520.226
Pendapatan Devisa (juta US$)	231,57	637,04	973,81	1.357,09	1.835,18
Wisatawan Nusantara (perjalanan)	86.124	133.258	211.530	335.780	389.352
Pendapatan (Rp miliar)	974,49	2.488,59	5.303,27	10.810,50	16.280,75
Serapan Tenaga Kerja (orang)	2.197	6.486	9.244	12.507	14.123

*)Keterangan: kurs US$ 1 = Rp.15.000,-

Target di atas ditetapkan berdasarkan daya dukung kawasan dan pemerataan distribusi wisatawan. Hal tersebut dilatarbelakangi agar kunjungan wisatawan tidak hanya bertumpu pada Taman Nasional Komodo saja, namun dapat tersebar di seluruh Manggarai Barat bahkan Flores, sehingga daya dukung Taman Nasional Komodo dapat terkendali dan manfaat ekonomi menjadi lebih merata sampai seluruh daerah di Flores.

Pertumbuhan dari kunjungan wisatawan ini akan mendorong pertumbuhan dan peningkatan jumlah dari sektor lain. Pada sektor akomodasi kebutuhan kamar hotel akan meningkat sebanyak 7.575 kamar

dengan 12.128 tempat tidur, proyeksi peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur ini di proyeksi selalu melebihi dari jumlah wisatawan agar tidak terjadi kekurangan jumlah kamar dan tempat tidur. Terlihat bahwa peningkatan tempat tidur bagi wisatawan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kamar, ini karena pembangunan hotel yang memiliki kamar tidak bisa dibuat cepat, tetapi penambahan tempat tidur dalam setiap kamar bisa dilakukan dengan cepat. Hal tersebut terjadi karena demi menjaga daya dukung lingkungan karena hotel tidak akan mudah untuk dibangun, agar tidak terjadi perubahan yang masif.

Perkembangan tersebut akan meningkatkan jumlah penduduk pada 2044 sebesar 351.241 orang dengan total tenaga kerja sebanyak 18.675 orang yang membutuhkan lahan perumahan 28,25 Ha. Selain itu, usaha Pariwisata akan berkembang dengan akumulasi 2.361-unit, sehingga dari 761-unit usaha jasa wisata pada 2019 menjadi 3.122-unit pada 2044. Perkembangan ini akan memberikan potensi nilai investasi 216,407 triliun pada tahun 2044.

B. Arah Pengembangan

Arah pengembangan DPN Labuan Bajo dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pengembangan fase-fase dari kawasan yang ada di DPN Labuan Bajo. Secara umum pembangunan kepariwisataan DPN Labuan Bajo dibagi menjadi tiga fase yang dijabarkan dengan lima tahap sebagai berikut:

1. Fase Pemulihan: Tahap I 2023-2024

Tahap ini masuk pada fase pemulihan sebagai awal di mana sektor Pariwisata di Labuan Bajo mulai berkembang pasca adanya pandemi. Pada fase ini program difokuskan pada pemenuhan standar Pariwisata berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif di wilayah Labuan Bajo. Pada tahap ini dilakukan beberapa hal penting, antara lain:

a) Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan standarisasi produk dan pelayanan. Strategi ini dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan SDM dalam pelayanan dalam pemenuhan standar layanan destinasi Pariwisata prioritas dan premium
b) Pengembangan hub Pariwisata dengan pengembangan infrastruktur dan fasilitas di area Labuan Bajo sebagai hub kawasan DPN Labuan Bajo.
c) Pengembangan sub-KTA perkotaan sebagai tahap awal agar dapat menarik wisatawan secara lebih mudah dengan lokasi di sekitar perkotaan Labuan Bajo. Sub-KTA yang dikembangkan yaitu Labuan

Bajo Perkotaan, Batu Cermin-Wae Kelambu, Gorontalo-Golo Bilas, dan Golo Mori-Warloka.

2. Fase Percepatan 1: Tahap II 2025-2029

Tahap ini masuk pada fase percepatan yang fokus pada diversifikasi produk dengan memperluas area pengembangan dengan Komodo diperluas di kawasan lainnya. Strategi DPN Labuan Bajo pada tahap ini dilaksanakan dengan diversifikasi produk sebagai bentuk pemerataan, antara lain:

a) Pengembangan destinasi-destinasi baru sesuai potensi yang ada untuk dapat menyebarkan wisatawan, sub-KTA yang dikembangkan yaitu Boleng-Goa Rangko, Labuan Bajo Perairan dan Longos. Pengembangan ini bertujuan untuk menampung pertumbuhan wisatawan yang diproyeksikan semakin tinggi, mengembangkan Pariwisata dan ekonomi, dan inklusivitas.
b) Perluasan segmen wisata yang baru, dengan bentuk intensifikasi promosi dan target pasar yang tepat bagi produk wisata minat khusus dan segmen komunitas/hobi.
c) Penguatan promosi bermitra dengan pelaku usaha Pariwisata.
d) Pengembangan paket wisata minat khusus, alam, budaya, dan petualangan serta penyelenggaraan even budaya dan Pariwisata.
e) Pengembangan badan promosi Pariwisata daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.
f) Perluasan kawasan pengembangan Pariwisata ke luar KTA, terutama KTA potensial di Pulau Flores.

3. Fase Percepatan 2: Tahap III 2030-2034

Tahap ini mempunyai konsep dan tema tentang penguatan kelembagaan Pariwisata, baik kelembagaan publik maupun kelembagaan lokal kemasyarakatan. Strategi DPN Labuan Bajo pada tahap ini dilaksanakan dengan:

a) Pengembangan destinasi-destinasi baru sesuai potensi yang ada untuk dapat menyebarkan wisatawan, sub-KTA yang dikembangkan yaitu Mbeliling-Cunca Wulang dan Sano Nggoang
b) Pengembangan pemasaran dan promosi terpadu antar industri dan antar kawasan dengan BOPLBF, Badan Promosi Daerah, dengan asosiasi industri Pariwisata, seperti *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan maskapai penerbangan.

c) Peningkatan informasi peluang dan promosi investasi serta sinergi promosi penanaman modal DPN Labuan Bajo di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.
d) Penguatan kapasitas kelembagaan Pariwisata, termasuk organisasi lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan desa wisata.
e) Standarisasi lembaga dan sertifikasi SDM Pariwisata.
f) Perluasan kawasan pengembangan Pariwisata ke luar KTA, terutama KTA potensial di Pulau Flores.

4. Fase Percepatan 3: Tahap IV 2035-2039

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah dilakukan pemantapan produk dan pelayanan, dengan melakukan pengembangan promosi dan pemasaran Pariwisata juga dilakukan dalam tahap ini untuk mencapai target wisatawan sesuai dengan proyeksi. Strategi DPN Labuan Bajo pada tahap ini dilaksanakan dengan:

a) Pengembangan destinasi-destinasi baru sesuai potensi yang ada untuk dapat menyebarkan wisatawan, sub-KTA yang dikembangkan yaitu Lembor-Poco Rutang
b) Mengembangkan dan memantapkan *positioning*.
c) Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata DPN Labuan Bajo.
d) Perluasan kawasan pengembangan Pariwisata ke luar KTA, terutama KTA potensial di Pulau Flores.

5. Fase Pemantapan*:* Tahap V 2040-2044

Pada tahapan ini dibutuhkan usaha-usaha untuk mempertahankan layanan dan kualitas destinasi agar tetap mempertahankan daya tarik Manggarai Barat. Hal ini dilakukan dengan monitoring dan evaluasi terhadap sub-KTA yang telah dikembangkan untuk mempertahankan kualitas destinasi. Sekaligus dengan melakukan inovasi dan diversifikasi produk serta ekstensifikasi pasar

a) Pengembangan sub-KTA Ndoso-Golo Lesu untuk meratakan pengembangan destinasi di Kabupaten Manggarai Barat
b) Penajaman kembali strategi *positioning* Pariwisata DPN Labuan Bajo dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar segmen yang di sasar dan produk utama, yaitu alam, bahari, dan budaya.
c) Pemantapan strategi *positioning* Pariwisata DPN Labuan Bajo dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar seni budaya, desa wisata, dan wisata ziarah.

d) Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata DPN Labuan Bajo.
e) Perluasan kawasan pengembangan Pariwisata ke luar KTA, terutama KTA potensial di Pulau Flores.

BAB III. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

A. Perwilayahan Pengembangan DPN Labuan Bajo

Perwilayahan pengembangan DPN Labuan Bajo mencakup Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari 2 (dua) KTA yaitu KTA 1 Taman Nasional Komodo dan KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya. Skenario pengembangan DPN Labuan Bajo menggunakan pendekatan pengembangan yang menyebar (*Disperse Development*). Pengembangan ini mengikutkan kawasan pantai utara, pantai barat, tengah dan sebagian sisi timur dan selatan Manggarai Barat sebagai sub-KTA.

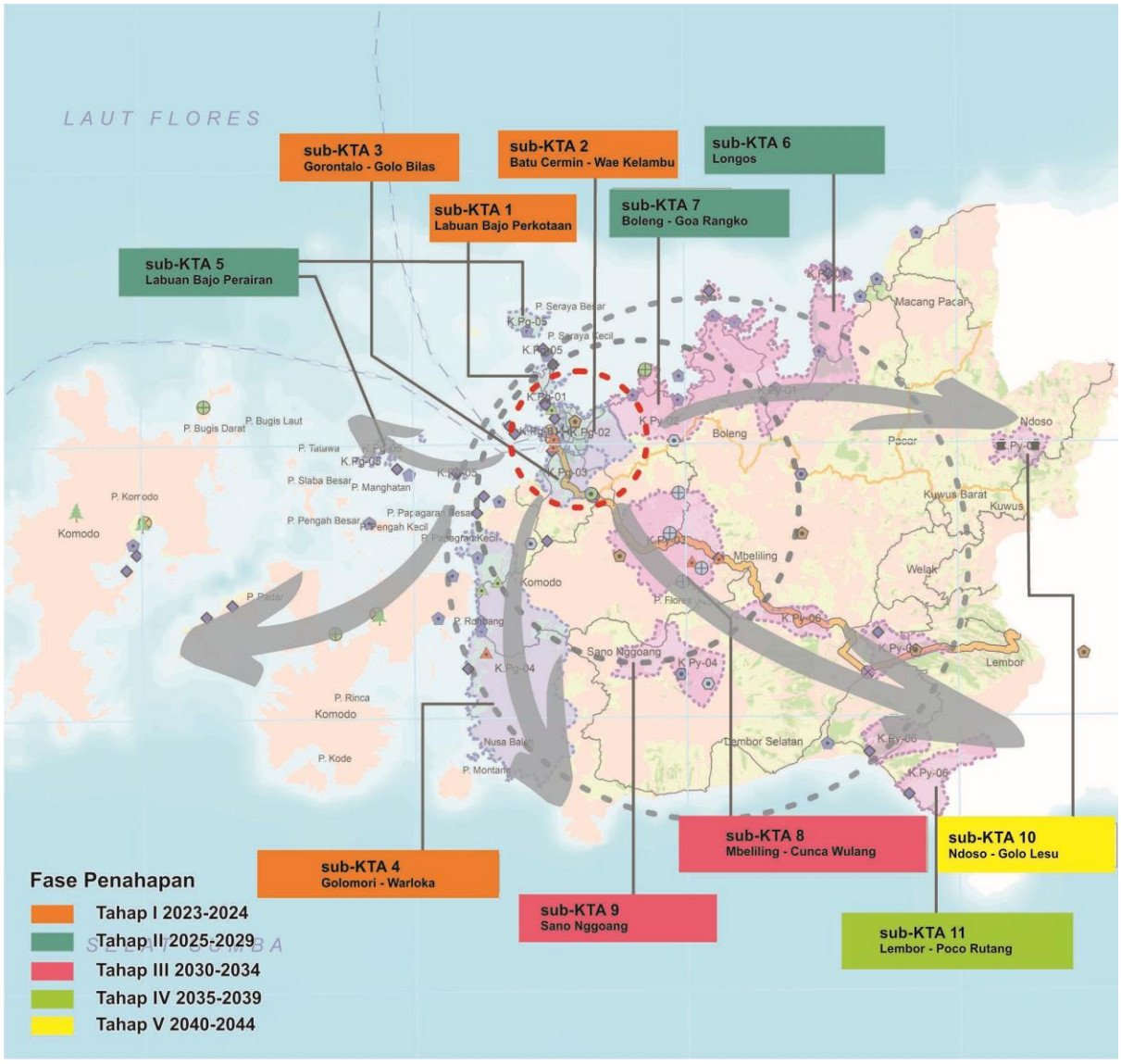

Gambar 4. Skenario Pengembangan Menyebar

Pada pengembangan sub-KTA tersebut terdapat pedoman pengembangan Pariwisata pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi, analisis ini mengidentifikasi kawasan yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata dengan membandingkan antara penggunaan lahan eksisting yang

ditampalkan dengan rencana tata ruang. Analisis penampalan tersebut menghasilkan klasifikasi lahan sebagai berikut: (1) zona kesesuaian tinggi yang mengindikasikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang; (2) zona potensial untuk dikembangkan, merupakan kawasan yang masih dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Namun demikian masih perlu diperjelas kesesuaiannya di lapangan dan mengkajinya sebagai pendekatan validasi data. Jika kondisi lahan sesuai dengan rencana, maka proses pembangunan dapat dilanjutkan, namun jika tidak sesuai dengan status yang ditentukan, perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai; dan (3) zona tidak sesuai, yaitu zona dengan status yang berpotensi tidak sesuai merupakan indikasi awal lahan yang perlu dievaluasi kembali penggunaannya.

1. Perwilayahan Pengembangan KTA 1 Taman Nasional Komodo

Rencana pengembangan di KTA1 sesuai dengan peruntukan zonasi dalam Taman Nasional Komodo, maka pengembangan secara terbatas hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan. Infrastruktur yang diusulkan untuk dikembangkan terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pariwisata tanpa mengesampingkan upaya konservasi habitat yang dilindungi.

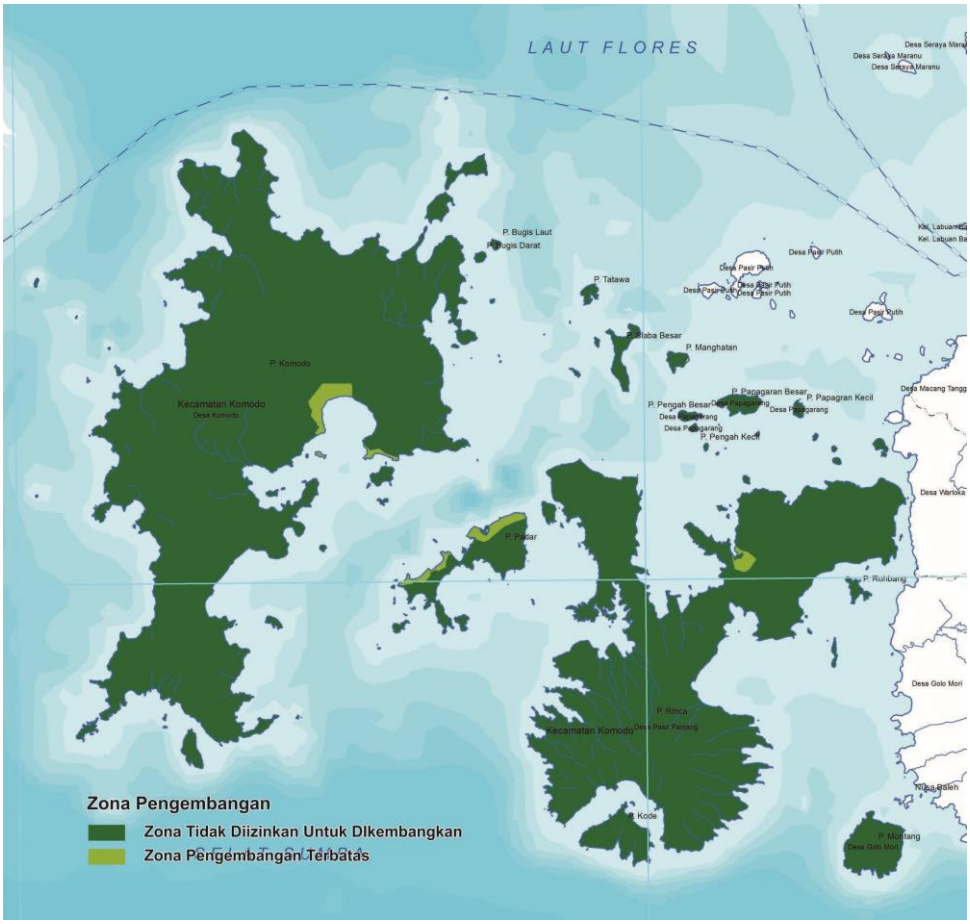

Gambar 5. Pengembangan Perwilayahan KTA 1 Taman Nasional

2. Perwilayahan Pengembangan KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya

KTA 2 dibagi menjadi sub-KTA dengan tema spesifik di dalam kawasannya. Sub-KTA di KTA 2 yaitu sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan, sub-KTA Batu Cermin-Wae Kelambu, sub-KTA Gorontalo-Golo Bilas, sub-KTA Golo Mori-Warloka, sub-KTA Labuan Bajo Perairan.

a) Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan

Secara administratif berada di wilayah Kelurahan Labuan Bajo. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Toro Sitangga, Pantai Wae Cicu, Bukit Binongko, Pantai Wae Rana, dan Puncak Waringin. Sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pintu masuk wisatawan melalui udara dan laut, serta memiliki fasilitas yang lengkap sebagai kawasan pusat aktivitas penduduk dan Pariwisata.

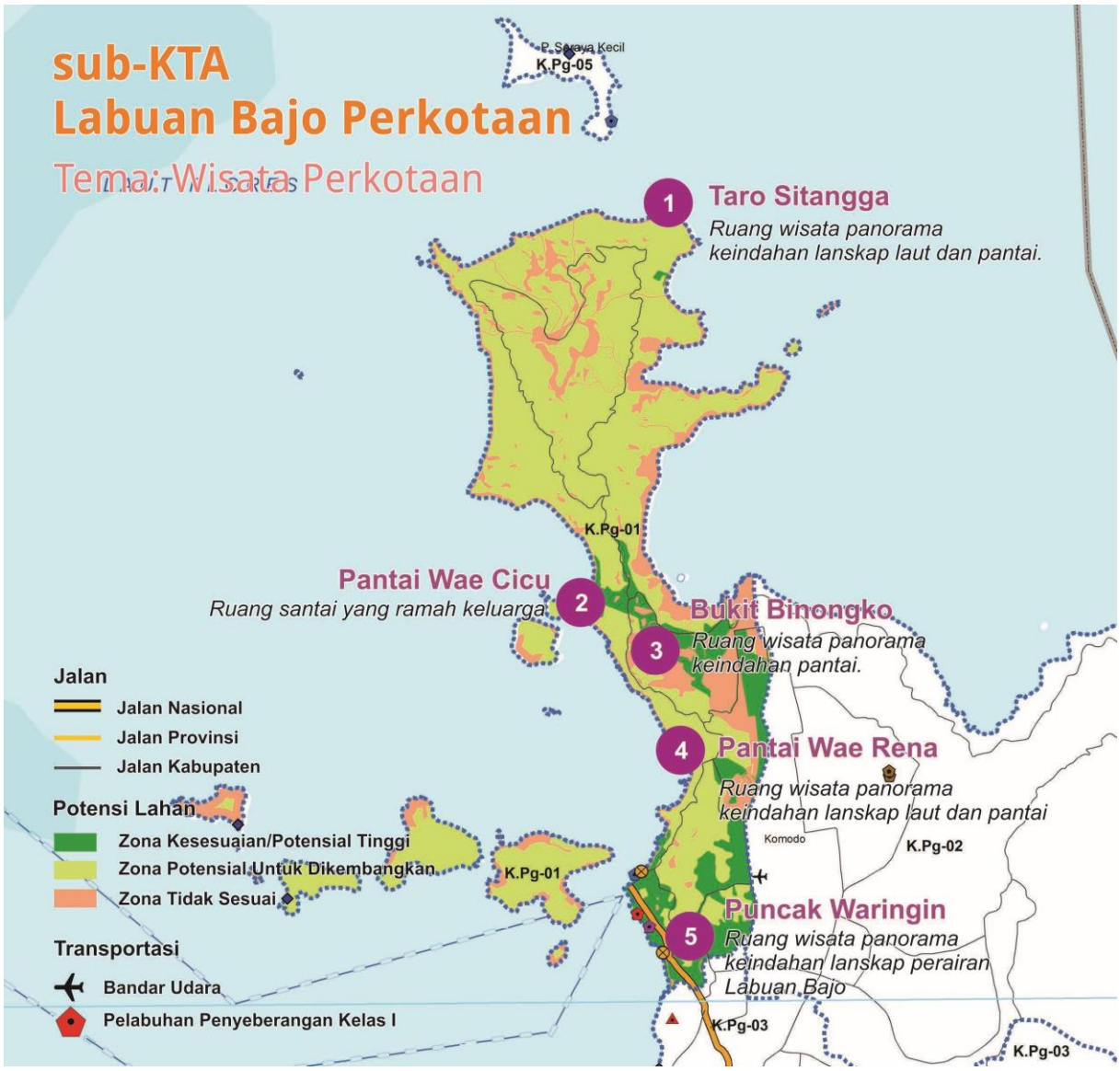

Gambar 6. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan

Rencana zonasi spasial pada kawasan ini sebagai kawasan pusat kota Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya menggunakan konsep kompak dengan pengembangan yang difokuskan pada kawasan-kawasan yang memenuhi kesesuaian lahan dalam pengembangan kawasan terbangun. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan Labuan Bajo memiliki kawasan berbukit sehingga pengembangan yang dilakukan berada pada kawasan yang sesuai dengan perbukitannya. Berdasarkan kebutuhan lahan pengembangan Pariwisata di Sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan, diperkirakan akan membutuhkan tambahan pengembangan lahan untuk kebutuhan kegiatan Pariwisata. Hal ini dikarenakan untuk dapat menampung wisatawan untuk beraktivitas di kawasan Labuan Bajo Perkotaan dibutuhkan berbagai aktivitas dan destinasi sehingga membutuhkan tambahan sekitar 8,7 ha ruang untuk aktivitas. Pengembangan ini dapat menggunakan kawasan perumahan, perkebunan dan hortikultura di sekitar kawasan Pariwisata untuk dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan Pariwisata.

b) Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu

Secara administratif berada di Desa Batu Cermin dan Kelurahan Wae Kelambu, Labuan Bajo. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Goa Batu Cermin dan lahan BOPLBF. Sub-KTA ini memiliki aksesibilitas dan amenitas yang baik sehingga berpotensi dalam pengembangan wisata yang bersifat massal. Sub-KTA ini terbagi menjadi dua daya tarik wisata prioritas dengan masing-masing prioritas memiliki keunikan daya tarik wisata.

Pada rencana pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari Perkotaan Labuan Bajo. Dengan pengembangan atraksi berupa Goa Batu Cermin dan sebagian kawasan Bukit Budaya Bajo. Dalam kawasan ini pengembangan selain keduanya terdapat pengembangan Pelabuhan Wae Kelambu yang berada pada kawasan ini. Berdasarkan SK Menteri ATR/BPN Nomor 110 Tahun 2023 pengembangan pada kawasan Bukit Budaya Bajo berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebesar 129 ha dan sebesar 264 ha merupakan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA).

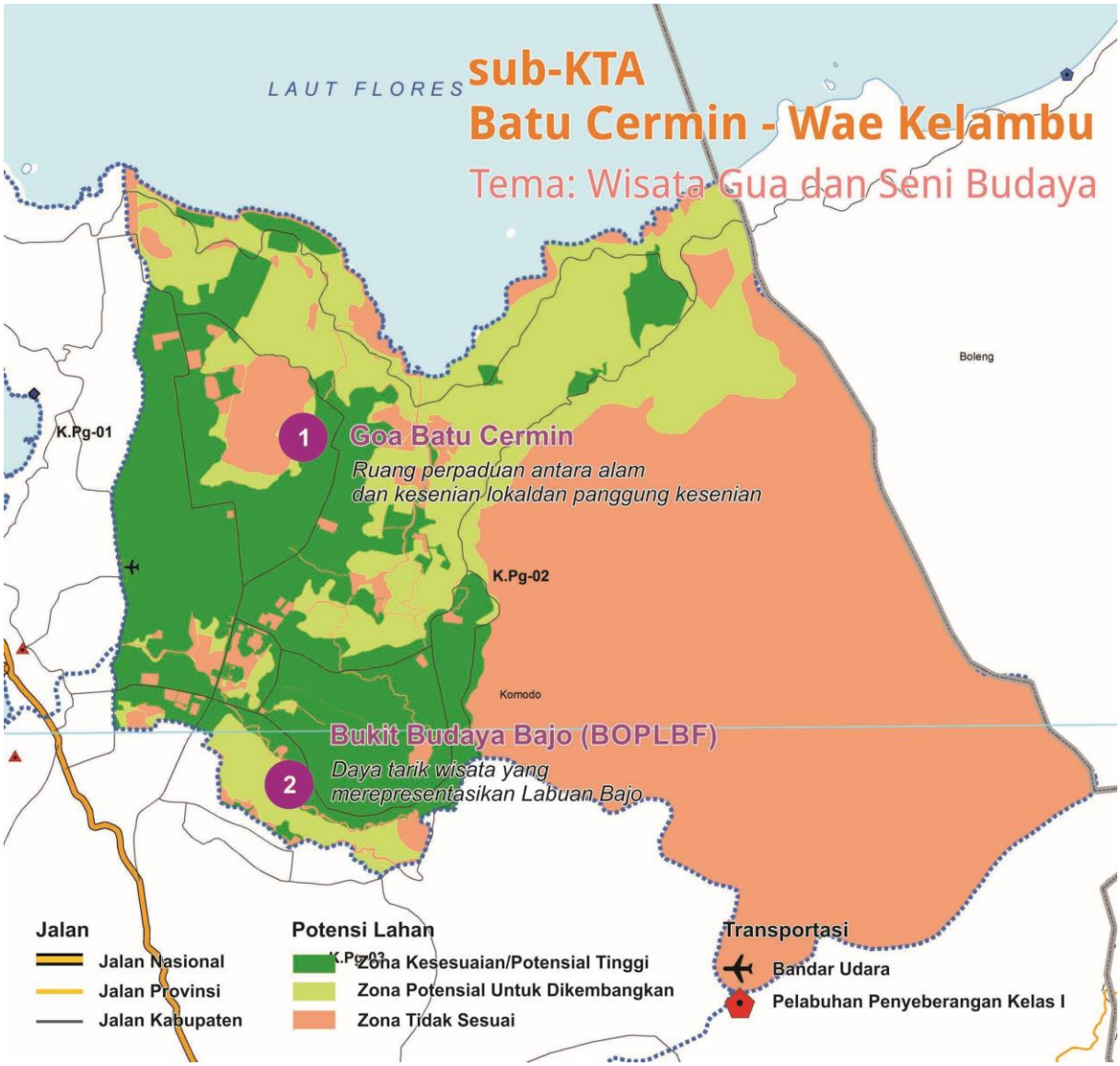

Gambar 7. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu

c) Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas

Secara administratif berada di wilayah Desa Gorontalo dan Desa Golo Bilas, Labuan Bajo. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Puncak Pramuka, Pesisir Pantai Pede, dan lahan BOPLBF. Sub-KTA ini memiliki aksesibilitas dan amenitas yang baik sehingga berpotensi dalam pengembangan wisata yang bersifat massal. Sub-KTA ini terbagi menjadi dua daya tarik wisata prioritas dengan masing-masing prioritas memiliki keunikan daya tarik wisata.

Pengembangan kawasan pada Sub-KTA Gorontalo-Golo Bilas akan mengembangkan kawasan Pantai Pede dan kawasan Bukit Budaya Bajo. Kawasan Pantai Pede yang akan dikembangkan sebagai destinasi wisata yang di sekitarnya berkembang akomodasi berupa hotel. Pada kawasan ini juga dikembangkan fasilitas Pariwisata seperti Pede *Seafood Paradise* sebagai

sentra kuliner. Pengembangan lainnya adalah Bukit Budaya Bajo seluas 268,6 ha di mana pada sub-KTA ini terdapat 3 (tiga) zona yaitu zona budaya, zona alam, dan zona liburan dan hiburan. Seperti pada sub-KTA sebelumnya, pada sub-KTA ini perlu penyesuaian terhadap peruntukan kawasan Bukit Budaya Bajo dikarenakan berdasarkan RTRW eksisting kawasan ini masih menjadi kawasan hutan. Menurut informasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat, kawasan hutan yang menjadi peruntukan Bukit Budaya Bajo akan dilakukan pelepasan terhadap lahan hutan agar bisa dikembangkan sebagai Bukit Budaya Bajo.

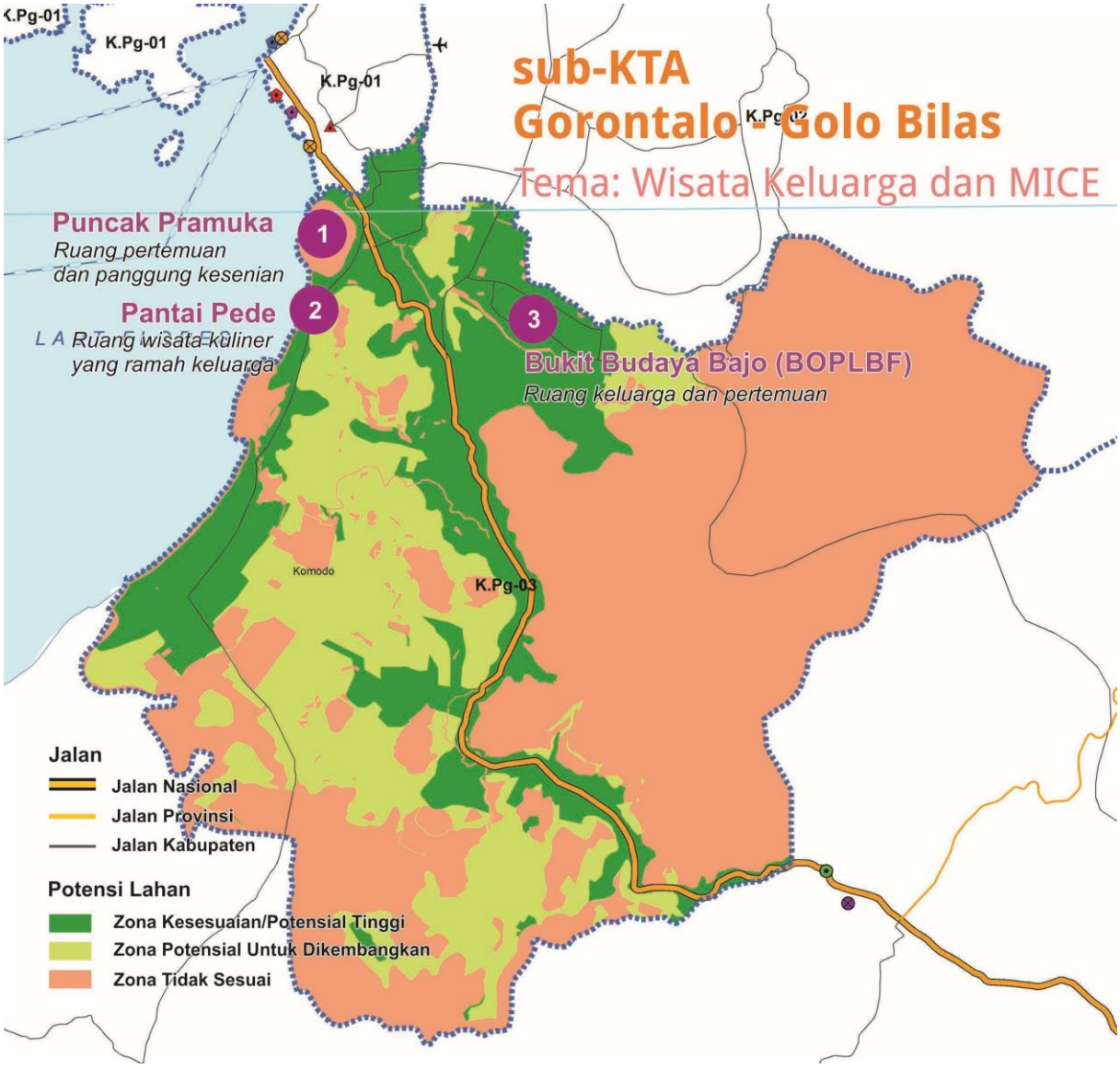

Gambar 8. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas

d) Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka

Sub-KTA 4 secara administratif berada di KTA 2 yaitu Desa Golo Mori dan Desa Warloka, Labuan Bajo. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu KEK Golo Mori, Puncak Golo Mori, Muara Nggoer, Bukit Indah Warloka, dan Bukit Sasha. Sub-KTA ini memiliki aksesibilitas dan

amenitas yang baik sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dan pelaksanaan MICE. Sub-KTA ini dikelilingi oleh perbukitan dengan pemandangan lanskap pesisir Pulau Rinca sehingga pengembangan wisata petualangan dan *trekking* di daya tarik wisata.

Pada kawasan ini pengembangan destinasi utama adalah Kawasan Tana Mori yang menjadi kawasan terintegrasi antara destinasi, amenitas, dan fasilitas pendukung lainnya. Kawasan sekitar Tana Mori Sebagian besar merupakan kawasan lindung (Hutan Lindung) sehingga perlu adanya pengendalian pembangunan fisik agar tidak merusak kawasan lindung di sekitarnya.

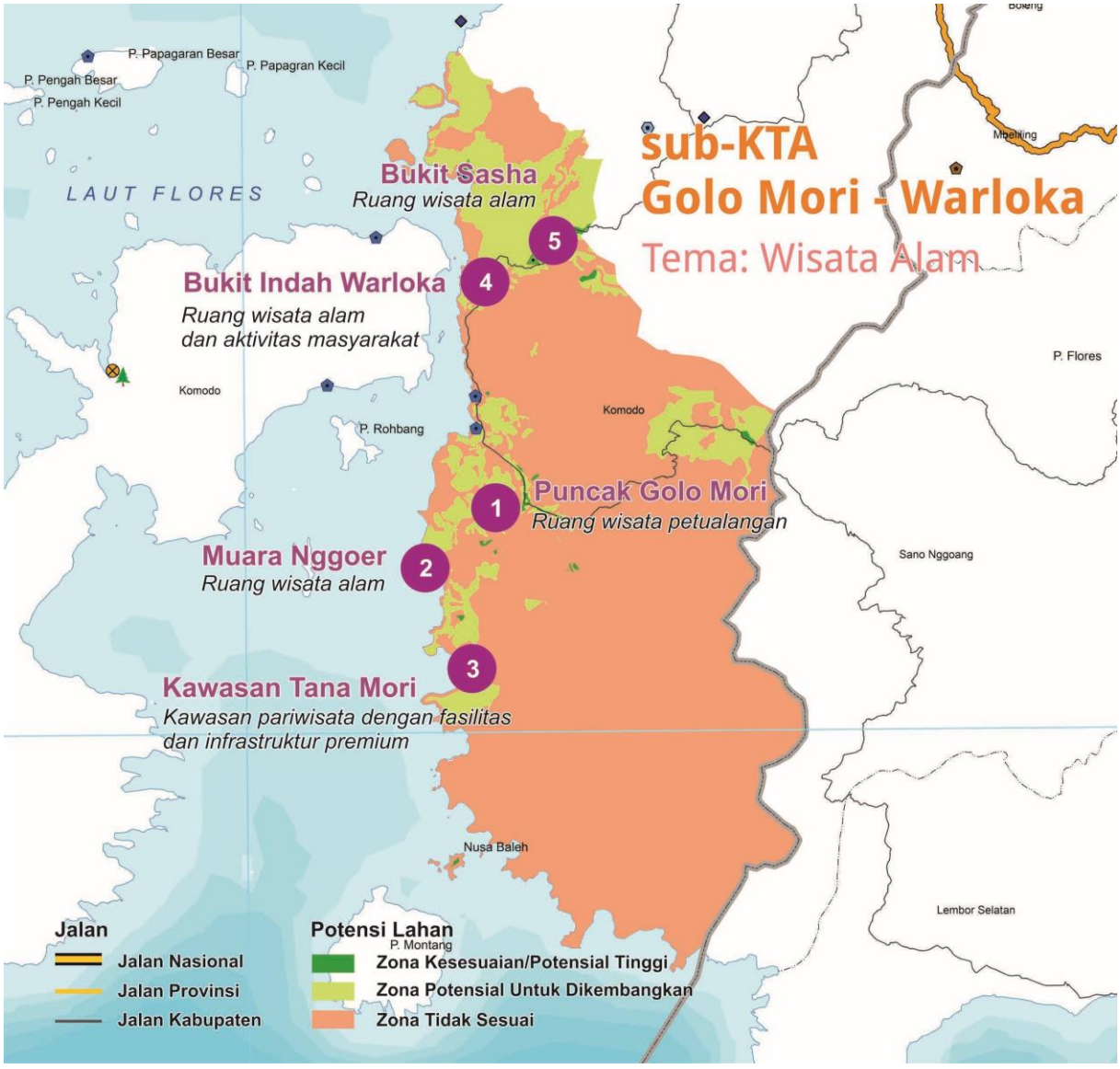

Gambar 9. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka

e) Sub-KTA 5 Labuan Bajo Perairan

Sub-KTA Labuan Bajo Perairan secara administratif berada di KTA 2 yaitu Desa Pasir Putih, Labuan Bajo. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Desa Wisata Pasir Putih dan pulau-pulau kecil sekitar

Labuan Bajo. Sub-KTA ini berada di perairan Labuan Bajo. Sub-KTA ini terbagi menjadi dua daya tarik wisata prioritas dengan masing-masing prioritas memiliki keunikan daya tarik wisata.

Pada kawasan ini pengembangan yang akan dilakukan merupakan kawasan Resort pada Pulau Sebayur dan sekitarnya. Sedangkan kawasan perairan yaitu titik-titik *snorkeling* di sekitarnya menjadi bagian untuk atraksi di sekitar kepulauan ini. Pengembangan yang dilakukan di sekitar pulau-pulau ini dilakukan di sekitar kawasan pantai sehingga resor yang dikembangkan juga berada pada kawasan pantai. Pada kawasan ini sudah sesuai dengan RTRW yang ada sehingga tidak ada perbedaan dalam RTRW.

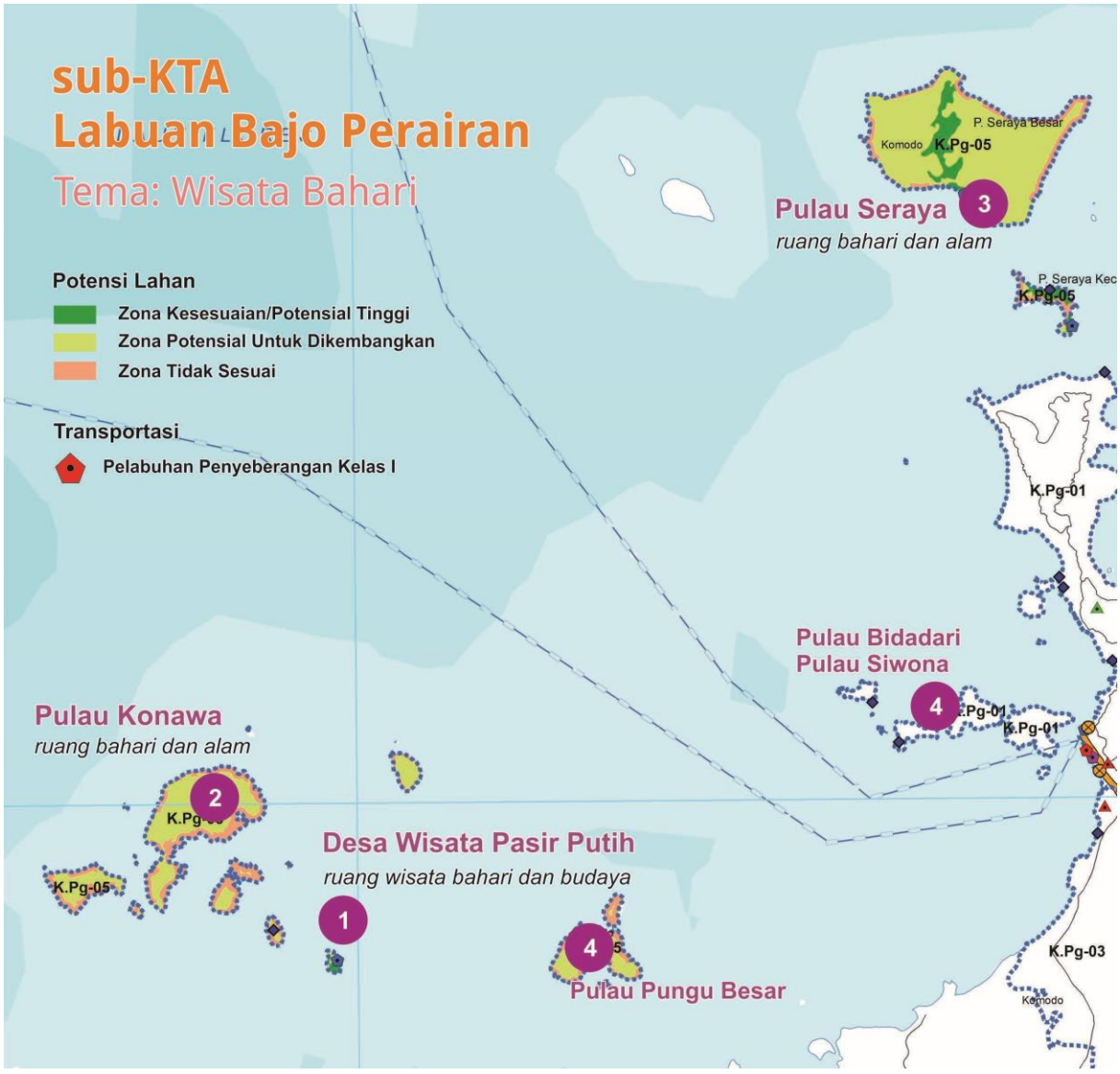

Gambar 10. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 5 Labuan Bajo Perairan

f) Sub-KTA 6 Longos

Sub-KTA Longos secara administratif berada di Manggarai Barat yaitu Desa Pontianak, Desa Nanga Kantor Barat, Desa Golo Sepang, dan Desa Sepang. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Pulau

Longos, Hutan Bakau, Potensi Satwa Komodo, dan Aktivitas Pedesaan. Sub-KTA ini dapat dicapai dengan kapal. Pemukiman di pulau ini cenderung kumuh dan memerlukan penataan kawasan. Keunikan budaya masyarakat nelayan perlu dilengkapi dengan peningkatan kualitas SDM dan kapasitas masyarakat untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Pada sub-KTA Longos, pengembangan yang dilakukan meliputi pengembangan Pulau Longos sebagai wisata budaya dan alam yang berada di sekitar Pulau Longos.

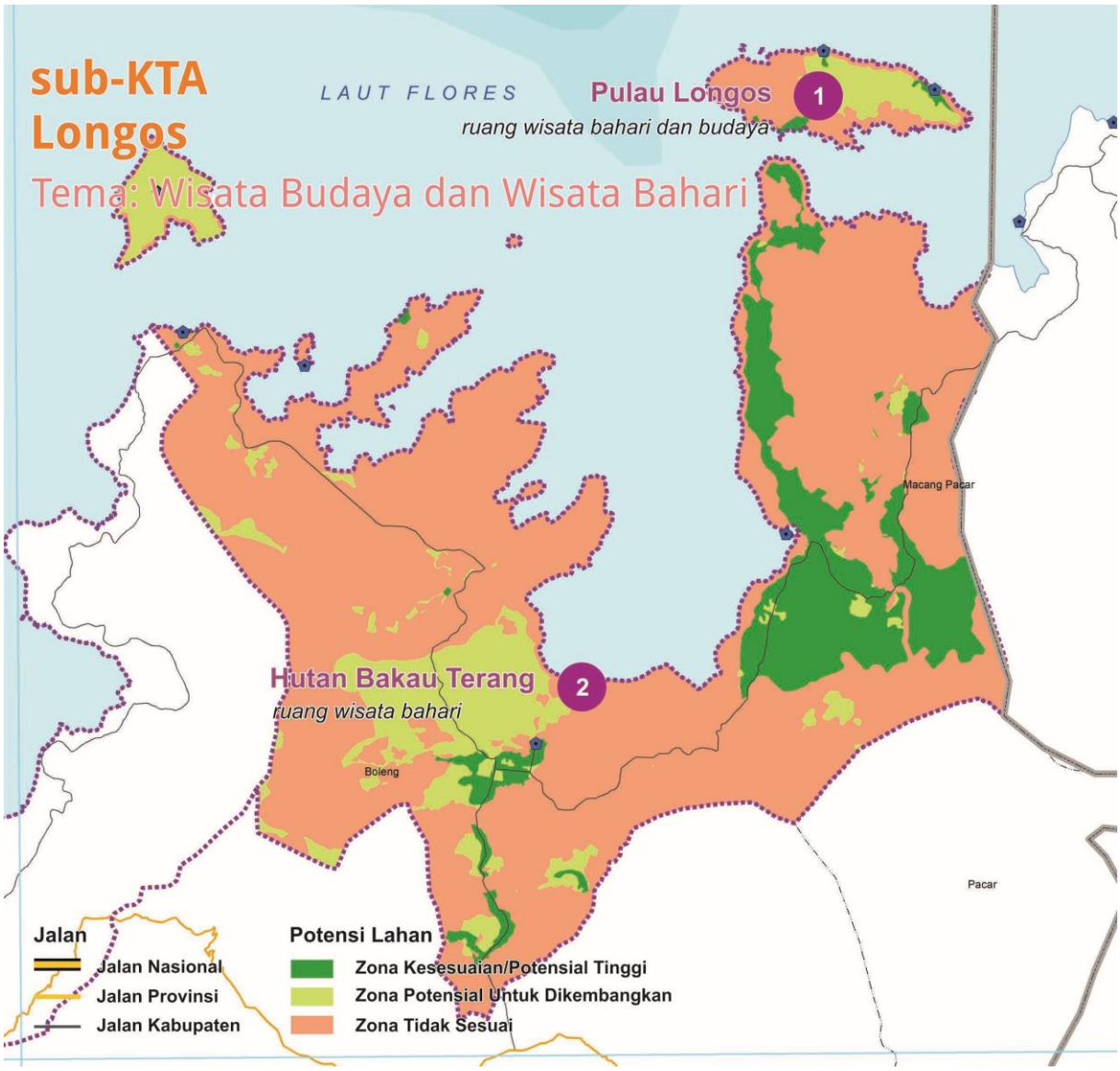

Gambar 11. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 6 Longos

g) Sub-KTA 7 Boleng–Goa Rangko

Sub-KTA Boleng–Goa Rangko secara administratif berada di Manggarai Barat yaitu Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Tanjung Goa Rangko, Wae Bobok. Sub-KTA ini dapat dicapai dengan jalan darat dengan akses yang baik.

Pada kawasan ini pengembangan kawasan dilakukan pada destinasi Tanjung Goa Rangko dan Wae Bobok. Tanjung Goa Rangko merupakan

wisata goa dan kawasan pantai. Kawasan Wae Bobok merupakan kawasan berkemah dengan pemandangan alam perbukitan. Dalam pengembangannya pada rencana pola ruang RTRW membutuhkan tambahan luasan seluas 2,44 ha sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap RTRW.

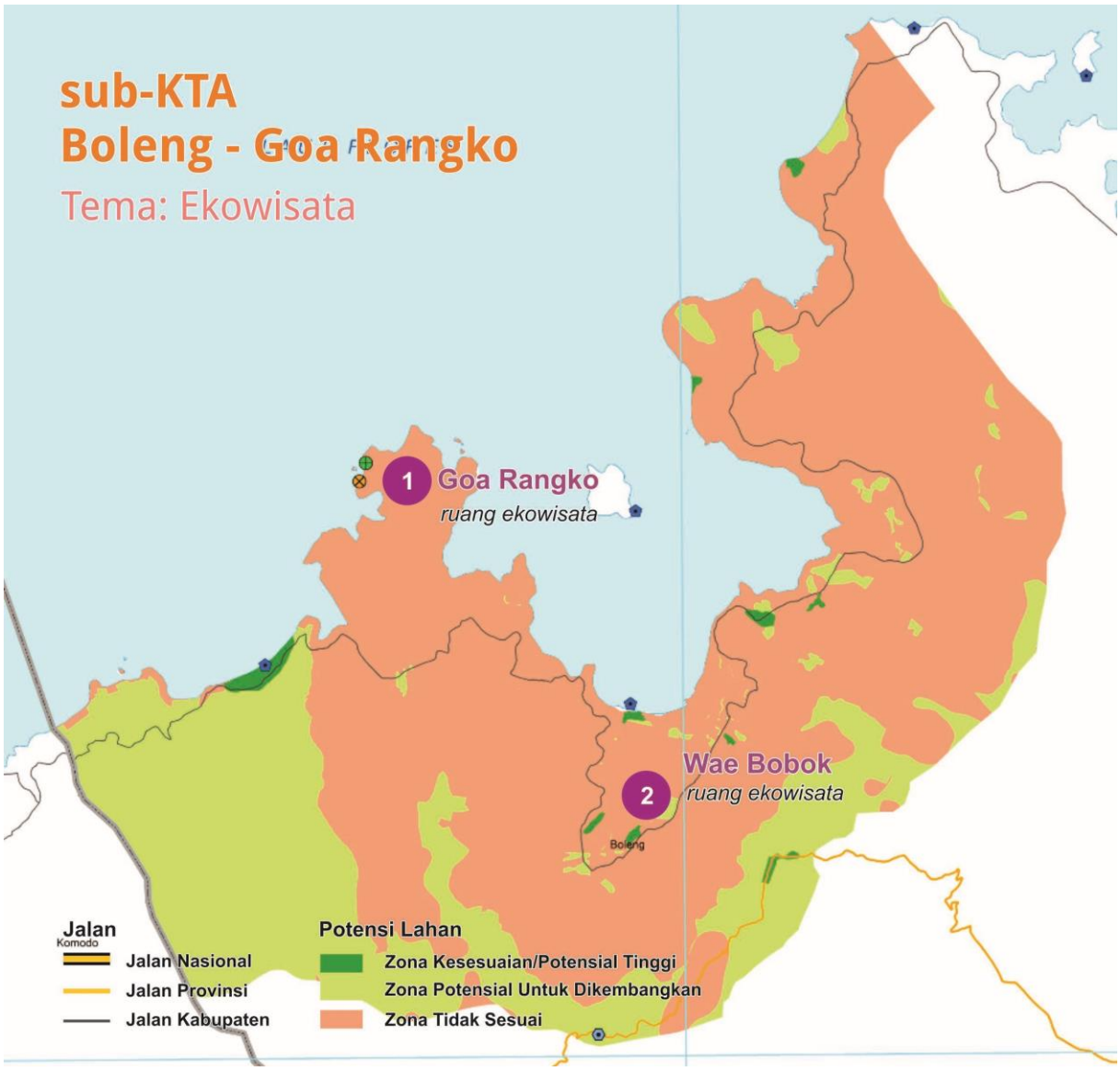

Gambar 12. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 7 Boleng–Goa Rangko

h) Sub-KTA 8 Mbeliling–Cunca Wulang

Sub-KTA Mbeliling–Cunca Wulang secara administratif berada di Manggarai Barat yaitu Desa Cunca Wulang, Desa Liang Ndara, Desa Tondong Belang, Desa Cunca Lolos, Desa Golo Damu, dan Desa Wae Lolos. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Air Terjun Cunca Wulang, Kampung Liang Ndara, Air Terjun Nobo Perlamping, Gunung Mbeliling, Puncak Eltari Dangka Pat, Air Terjun Cunca Rami. Sub-KTA ini dapat dicapai melalui jalan darat dengan akses yang baik. Namun beberapa daya tarik masih sulit di jangkau karena keterbatasan akses.

Pada kawasan ini merupakan sub-KTA wisata alam yang terdiri dari beberapa air terjun dan kawasan perbukitan serta wisata budaya. Dalam pengembangan kawasan ini membutuhkan tambahan luas kawasan Pariwisata seluas 0,75 ha karena tidak dialokasikan dalam kawasan Pariwisata di RTRW.

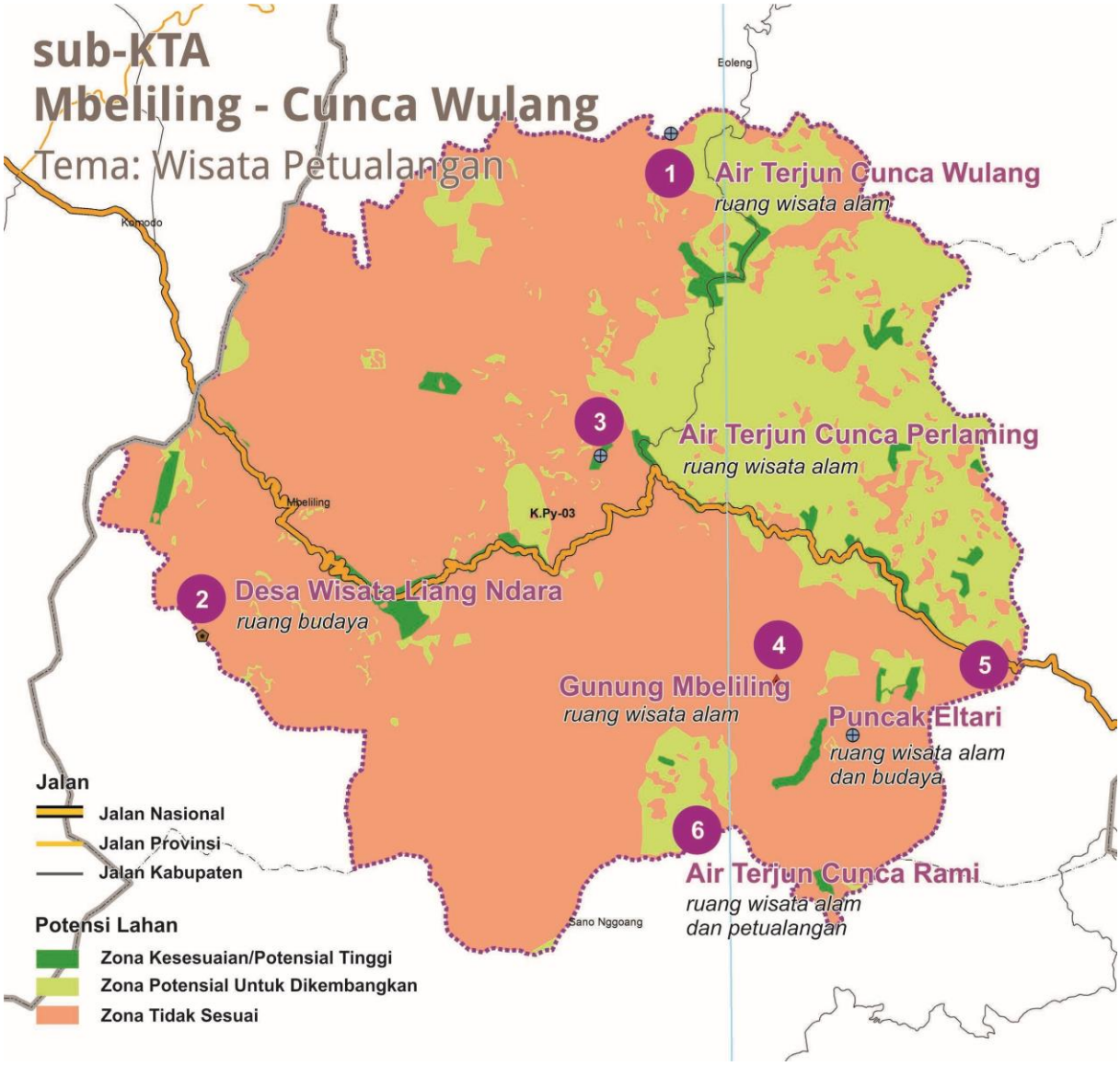

Gambar 13. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 8 Mbeliling–Cunca Wulang

i) Sub-KTA 9 Sano Nggoang

Sub-KTA Sano Nggoang secara administratif berada di Manggarai Barat yaitu Desa Wae Sano dan Desa Sano Nggoang. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Desa Wisata Sano Nggoang dan Danau Sano Nggoang. Sub-KTA ini dapat dicapai melalui jalan darat dengan akses yang terbatas.

Pengembangan pada sub-KTA Sano Nggoang dikembangkan kawasan danau, wisata air dan *trekking*. Dalam kebutuhan pengembangan kawasan

ini, dibutuhkan tambahan lahan untuk Pariwisata seluas 3,18 ha dari peruntukan dalam RTRW sehingga membutuhkan revisi terhadap RTRW untuk dapat menambahkan luasan tersebut.

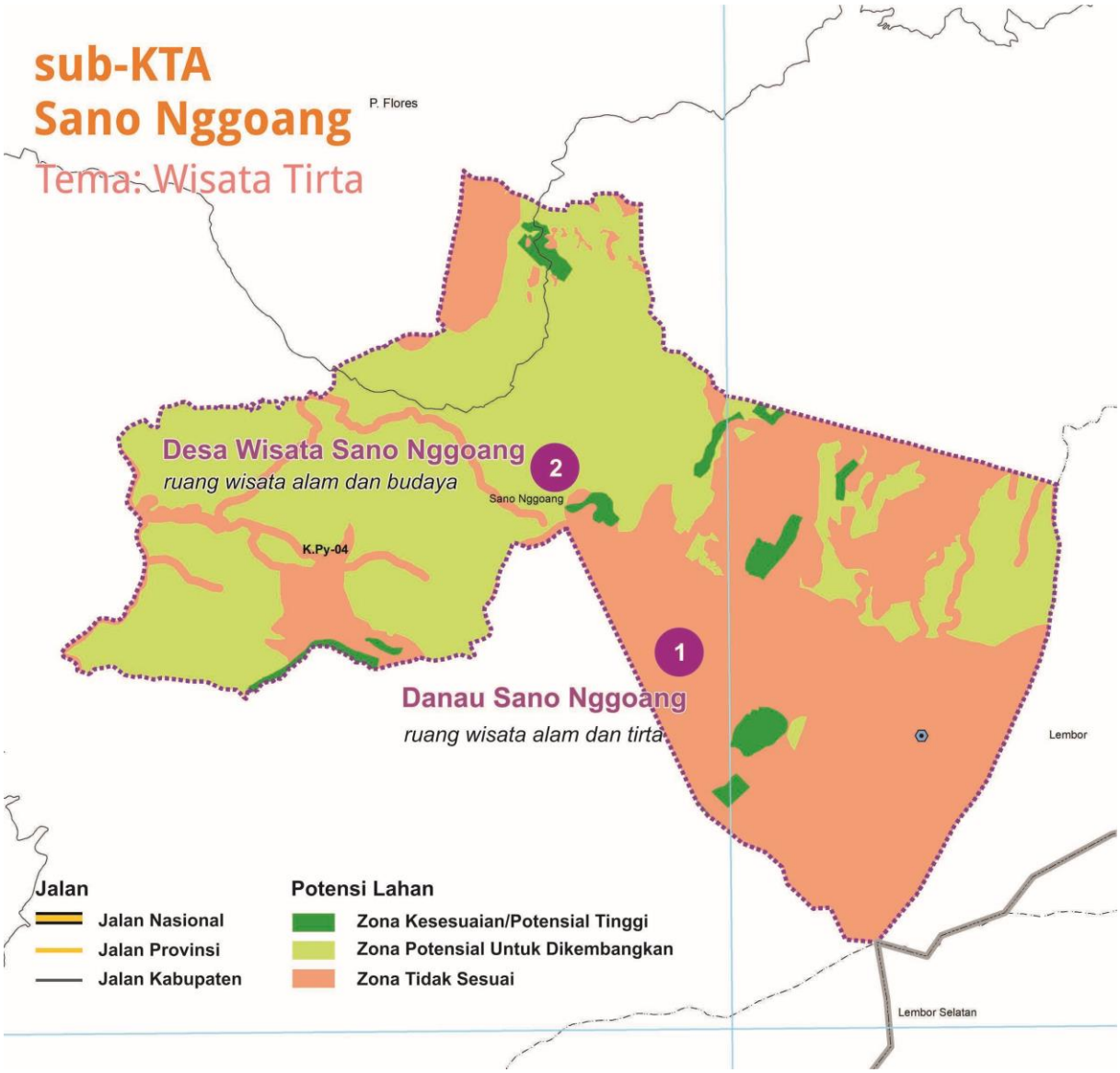

Gambar 14. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 9 Sano Nggoang

j) Sub-KTA 10 Ndoso–Golo Lesu

Sub-KTA Ndoso-Golo Lesu secara administratif berada di Manggarai Barat yaitu Desa Ndoso dan Desa Pateng Lesu, Kecamatan Ndoso. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Kubur Tua Nggerang dan Golo Lesu. Sub-KTA ini dapat dicapai dengan jalan darat. Topografi yang berbukit dengan lanskap pedesaan memperkuat daya tarik wisata yang ditawarkan.

Sub-KTA Ndoso-Golo Lesu akan dikembangkan sebagai kawasan Pariwisata budaya dan alam. Dalam kebutuhan pengembangan ini membutuhkan tambahan untuk Pariwisata seluas 2,29 ha karena tidak ada

alokasi kawasan Pariwisata dalam RTRW. Dalam memenuhi kebutuhan ini dapat menggunakan kawasan budidaya di sekitar kawasan Pariwisata yang memungkinkan untuk menjadi guna lahan Pariwisata.

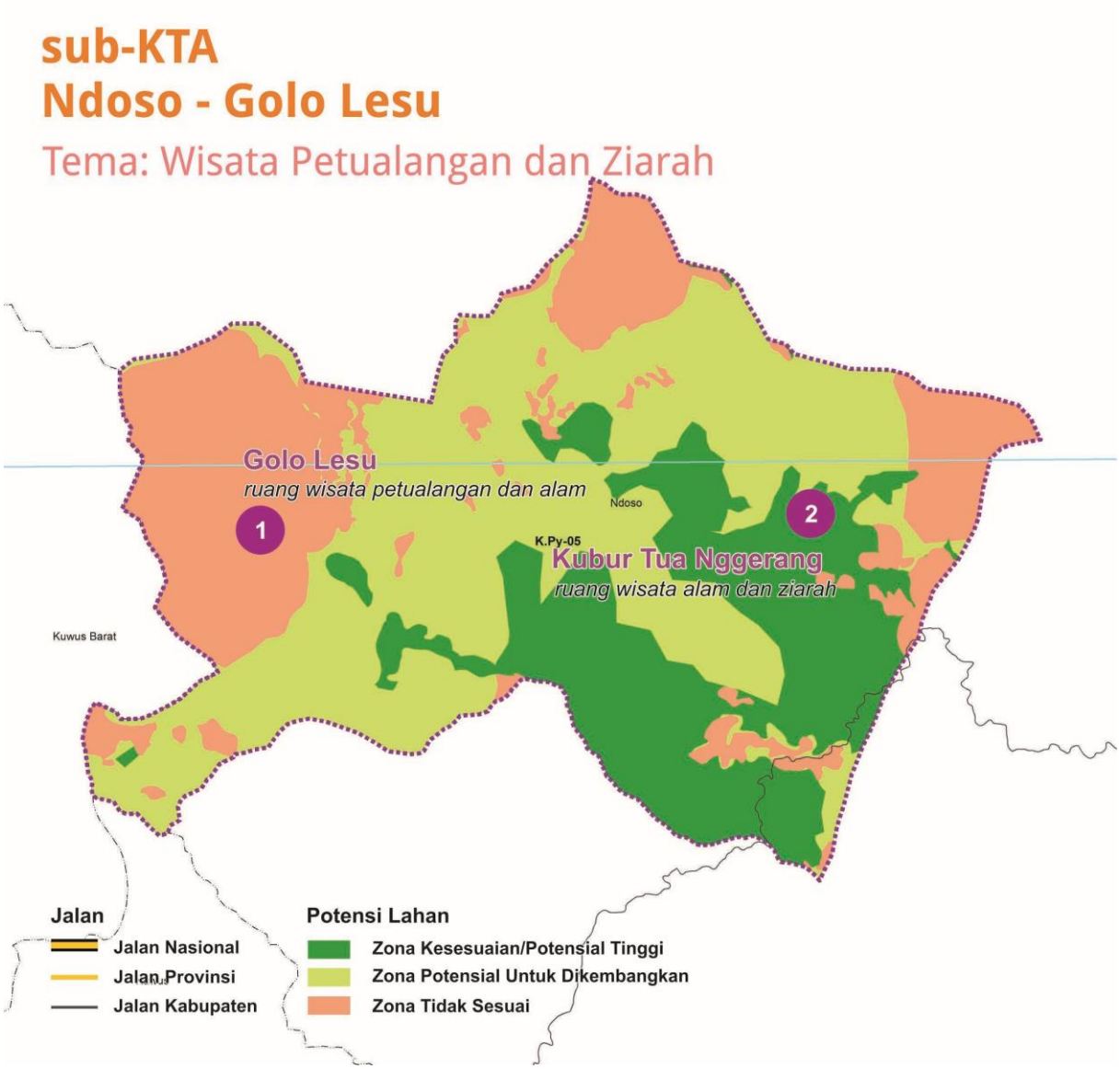

Gambar 15. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 10 Ndoso–Golo Lesu

k) Sub-KTA 11 Lembor–Poco Rutang

Sub-KTA Lembor–Poco Rutang secara administratif berada di Manggarai Barat yaitu Desa Poco Rutang, Desa Daleng, Desa Watu Tiri, Desa Repi, dan Desa Nampar Macing. Daya tarik wisata yang dikembangkan di sub-KTA ini yaitu Sawah Laba-Laba, Watu Panggal, Pantai Mberenang, Pantai Repi, dan Kampung Tado. Sub-KTA ini dapat dicapai dengan jalan darat karena berada di sekitar lintasan jalan nasional. Namun Mberenang dan Pantai Repi tidak dilintasi jalan nasional sehingga akses cukup terbatas.

Sub-KTA Lembor-Poco Rutang ini dikembangkan sebagai Pariwisata alam dan budaya. Pada pengembangan kawasan ini masih membutuhkan luasan 14,55 ha untuk kawasan Pariwisata dari luasan dalam RTRW

sehingga membutuhkan revisi RTRW untuk melakukan penyesuaian. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat menggunakan lahan dari kawasan budidaya lainnya di sekitarnya yang memungkinkan untuk pengembangan kawasan Pariwisata.

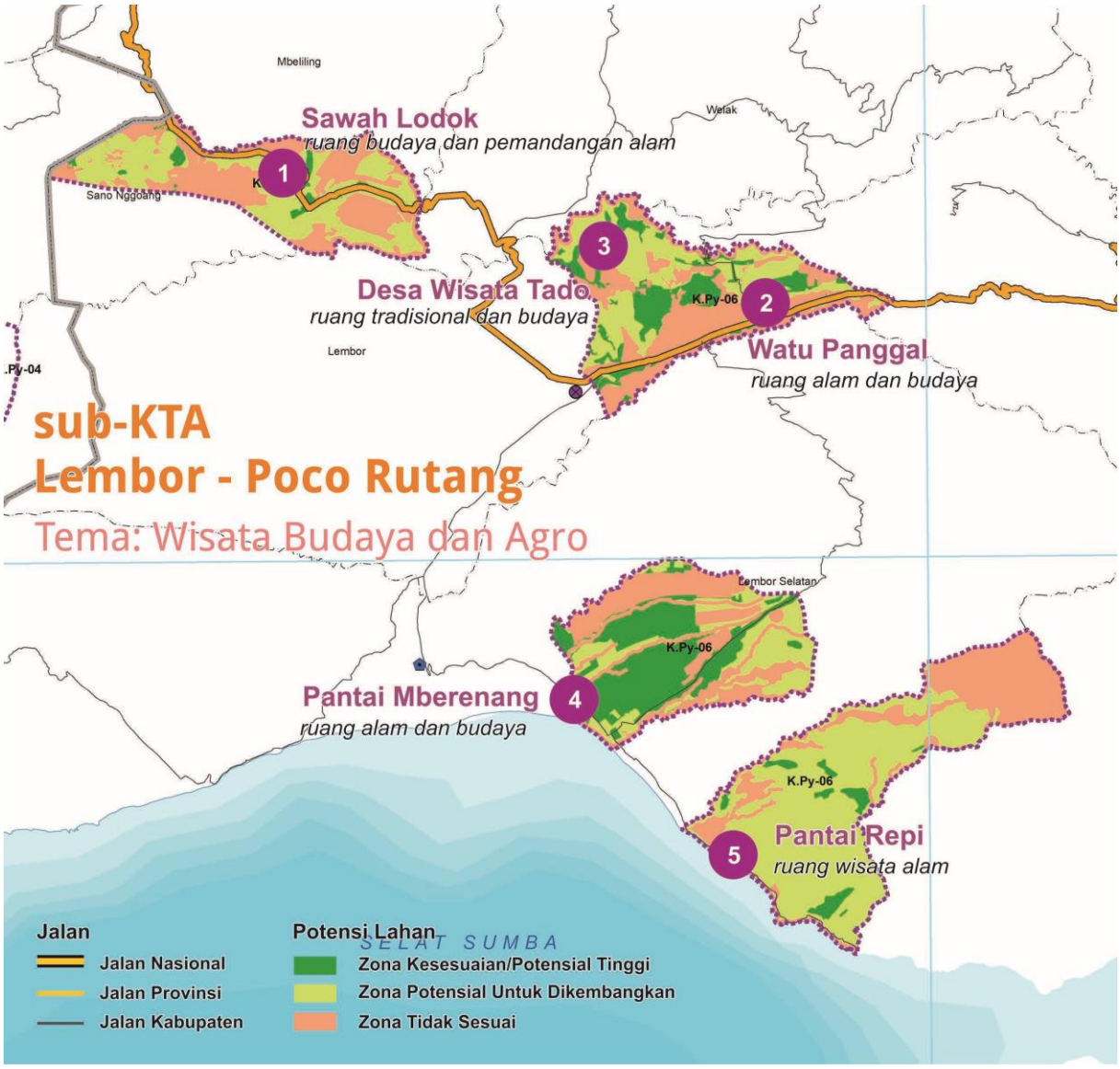

Gambar 16. Pengembangan Perwilayahan Sub-KTA 11 Lembor–Poco Rutang

3. Penahapan Pengembangan DPN Labuan Bajo

Rencana penahapan pengembangan DPN Labuan Bajo berisi desain konseptual pembangunan untuk infrastruktur selama fase pembangunan dan investasi yang dibutuhkan. Penahapan pengembangan mempertimbangkan kapasitas ambang batas infrastruktur untuk mengantisipasi investasi besar selama 25 tahun. Pengembangan DPN Labuan Bajo dilakukan secara bertahap agar terkoordinasi dan sesuai dengan alokasi sumber daya yang ada. Pada tahap awal pengembangan membutuhkan basis pengembangan yang kuat untuk masuk ke tahap selanjutnya sehingga tahap awal adalah standarisasi. Tahap kedua merupakan tahap diferensiasi di

mana dari hasil proyeksi pengunjung pada tahap ini akan terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan sehingga perlu adanya pengembangan destinasi-destinasi baru agar dapat menampung pertumbuhan wisatawan dan destinasi yang dikembangkan merupakan diferensiasi dengan jenis sub-KTA dan sub-KTA destinasi yang beragam. Pada tahap yang terakhir merupakan diversifikasi di mana pengembangan pada tahap ini wisatawan diprediksi stagnan sehingga pengembangan sub-KTA baru tidak terlalu banyak dan pengembangan yang dilakukan adalah pemantapan pada masing-masing sub-KTA dan sub-KTA. Penahapan pengembangan pada skenario terpilih adalah sebagai berikut:

a) Fase Pemulihan

Tahapan awal di mana sektor Pariwisata di Labuan Bajo mulai berkembang pasca-pandemi. Pada fase ini program difokuskan pada pemenuhan standar Pariwisata berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif di wilayah DPN Labuan Bajo. Dalam tahapan ini pengembangan dilakukan penetapan standar dan pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi tolok ukur awal pengembangan Pariwisata di keseluruhan wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Secara lokasi, pengembangan pada tahap standarisasi berfokus pada kawasan Kecamatan Komodo sebagai KTA untuk mengembangkan destinasi pada kawasan yang telah ditetapkan. Pengembangan ini terdiri mengembangkan kawasan yang telah eksisting menjadi kawasan Pariwisata maupun mengembangkan kawasan-kawasan baru untuk memosisikan Kecamatan Komodo sebagai hub Pariwisata utama di Kabupaten Manggarai Barat. Fokus pada kawasan Kecamatan Komodo juga mengikuti konsep pengembangan '*low hanging fruit*' dalam tahap awal agar dapat menarik wisatawan secara lebih mudah dengan lokasi di sekitar perkotaan Labuan Bajo. Pada tahapan ini mengembangkan beberapa sub-KTA antara lain:

- Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan
- Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu
- Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas
- Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka

Selain menarik wisatawan, pemantapan terkait sarana prasarana, SDM dan standar pelayanan dilakukan pada tahap awal ini agar SDM dan standar pelayanan yang ditetapkan dapat menjadi contoh bagi kawasan-kawasan lainnya di Kabupaten Manggarai Barat. Diharapkan dengan meningkatnya standar pelayanan di tahapan ini dapat berdampak ke kawasan Pariwisata lainnya. Hal penting lain yang perlu dilakukan

adalah perencanaan Pembangunan infrastruktur ekologis jalur habitat Komodo di Kawasan Taman Nasional.

b) Fase Percepatan

Pada fase ini, pengembangan yang sudah dilakukan di kawasan KTA atau Kecamatan Komodo diperluas di kawasan lainnya. Pemerataan ini dilakukan dengan mengembangkan destinasi-destinasi baru di luar kawasan KTA sesuai potensi yang ada untuk dapat menyebarkan wisatawan agar tidak hanya mengunjungi kawasan Kecamatan Komodo atau Taman Nasional Komodo. Dengan pemerataan ini diharapkan pengembangan ekonomi ikutan dari kegiatan Pariwisata yang semakin berkembang dan lebih luas. Selain pemerataan pada tahapan ini juga dikembangkan penguatan kelembagaan Pariwisata untuk dapat menguatkan institusi kepariwisataan. Pengembangan promosi dan pemasaran Pariwisata juga dilakukan dalam tahap ini untuk mencapai target wisatawan sesuai dengan proyeksi. Sehingga pada fase ini, dapat dibagi menjadi: Percepatan 1 – Diversifikasi; Percepatan 2: Institusi; dan Percepatan 3: Promosi. Perluasan Kawasan pengembangan Pariwisata ke luar KTA di Percepatan yaitu KTA potensial di Pulau Flores, baik tahap I, II, maupun III.

Pada tahapan ini untuk dapat mengakomodasi jumlah wisatawan yang semakin meningkat maka perlu untuk mengembangkan fasilitas di destinasi yang berpotensi dikembangkan agar daya dukung dan daya tampung KTA tidak over kapasitas sehingga perlu untuk disebar ke kawasan yang lain. Pada tahap ini dikembangkan 1 sub-KTA dan 6 sub-KTA yaitu:

- Sub-KTA 5 Labuan Bajo Perairan
- Sub-KTA 6 Longos
- Sub-KTA 7 Boleng-Goa Rangko
- Sub-KTA 8 Mbeliling-Cunca Wulang
- Sub-KTA 9 Sano Nggoang
- Sub-KTA 11 Lembor-Poco Rutang

Pengembangan sub-KTA di atas sebagian besar berada di luar kawasan KTA. Pengembangan ini bertujuan untuk menampung pertumbuhan wisatawan yang diproyeksikan semakin tinggi, mengembangkan Pariwisata dan ekonomi di luar KTA, dan inklusivitas agar kawasan di luar KTA juga mendapatkan pengembangan infrastruktur dan SDM pendukung Pariwisata.

c) Fase Pemantapan

Pada tahap ini dapat dilihat bahwa setelah mengalami kenaikan maka perkembangan jumlah wisatawan akan mengalami kondisi mantap pada

tahap terakhir. Pada tahapan ini dibutuhkan usaha-usaha untuk mempertahankan layanan dan kualitas destinasi agar tetap mempertahankan daya tarik Manggarai Barat. Pada tahapan ini perlu adanya aksi *monitoring* dan evaluasi terhadap sub-KTA yang telah dikembangkan untuk mempertahankan kualitas destinasi.

Pada tahapan ini secara spasial juga tetap mengembangkan sub-KTA yang dikembangkan pada tahap kedua menuju fase pendewasaan. Selain itu untuk menambah destinasi juga dikembangkan satu sub-KTA baru yaitu Sub-KTA 10 Ndoso–Golo Lesu untuk meratakan pengembangan destinasi di Kabupaten Manggarai Barat. Dengan pengembangan sub-KTA ini seluruh sub-KTA telah masuk dalam setiap tahapan pengembangan dan dapat mengembangkan atraksi yang sudah ada sehingga tahapan diversifikasi ini dapat mengembangkan atraksi-atraksi baru yang ada di setiap sub-KTA. Di fase pemantapan, perluasan KTA potensial di Pulau Flores.

Konsep yang dilekatkan pada pengembangan setiap sub-KTA akan menunjukkan arah pengembangan investasi infrastruktur 5 tahun sampai dengan 25 tahun mendatang. Pengonsepan pengembangan infrastruktur dan kebutuhan investasi tidak menghilangkan pengembangan wisata alam pada sub-KTA bertema budaya ataupun menghilangkan budaya di sub-KTA perkotaan melainkan dimaksudkan untuk menentukan diferensiasi dari konsep pembangunan tiap sub-KTA dengan menggarisbawahi daya tarik unggulannya baik yang sudah dimiliki atau yang dikembangkan. Pada intinya desain konsep pengembangan infrastruktur bertujuan untuk menyerap keunikan ciri khas daerah masing-masing untuk dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan investasi infrastruktur dan mencegah rasa tersinggung antar daerah yang dapat memicu perpecahan antar daerah. Kriteria pengembangan prospek investasi Pariwisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo diarahkan pada kriteria investasi yang bertujuan untuk (1) peningkatan daya tarik wisata baru yang berbasis budaya, alam, dan buatan; (2) pengembangan akomodasi (hotel, restoran, biro perjalanan, kawasan Pariwisata); (3) pengembangan infrastruktur pendukung Pariwisata (transportasi publik, jalan, jaringan air bersih, air limbah, drainase, jaringan persampahan, jaringan kelistrikan, teknologi informasi dan komunikasi yang ada di dalam KTA dan menghubungkan antar KTA; (4) peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM terkait dengan pengelolaan Pariwisata; dan (5) peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Pariwisata.

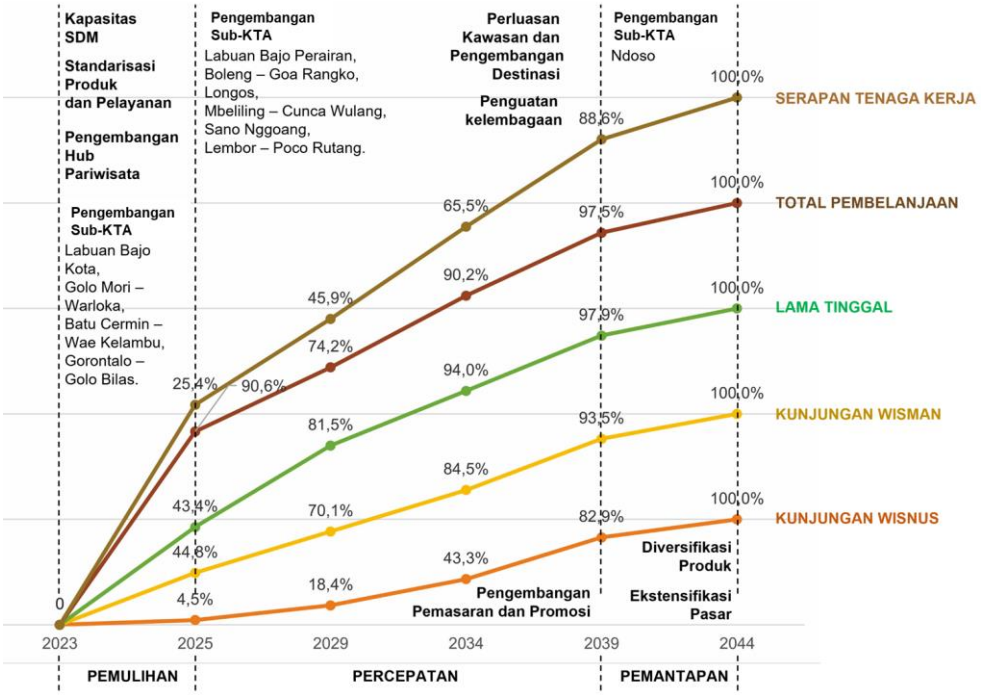

Gambar 17. Indikator Capaian dan Target dalam Fase Pengembangan
Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

B. Pengembangan Daya Tarik Wisata

1. Pengembangan DTW di KTA 1 Taman Nasional Komodo

Tema pengembangan di DTW Taman Nasional Komodo mengacu pada konsep ekowisata. Rencana pengembangan di zona pemanfaatan Taman Nasional Komodo terbagi menjadi dua kegiatan besar yaitu manajemen pengunjung dan peningkatan kualitas aksesibilitas. manajemen pengunjung wisatawan di Taman Nasional Komodo dilakukan untuk aktivitas wisata di daratan dan perairan. Rencana manajemen pengunjung dilakukan dengan menerapkan pembagian zonasi di zona pemanfaatan Taman Nasional Komodo, penerapan daya dukung untuk aktivitas wisata, penerapan strategi pembatasan pengunjung, pemberlakuan harga berbeda, penerapan Pariwisata bertanggungjawab, dan penerapan sistem tiket elektronik/*e-ticketing system* melalui sistem satu pintu/*one gate system*. Peningkatan kualitas aksesibilitas di Taman Nasional Komodo dimaksudkan untuk mempermudah kunjungan wisatawan dan upaya penyelamatan bila terjadi keadaan darurat. Kualitas aksesibilitas dapat diwujudkan dengan penyediaan transportasi alternatif seperti helikopter dan infrastruktur helipad, peningkatan kualitas dermaga, dan pelabuhan kapal pesiar, serta penyediaan transportasi alternatif *seaplane* dan pemanfaatan ruang laut sebagai landasan *seaplane*.

2. Pengembangan DTW di KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya

a) Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan

Pengembangan sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan bertemakan wisata perkotaan. Prinsip utama wisata perkotaan adalah kawasan yang memiliki kelengkapan fasilitas yang akan mendorong berkembangnya berbagai macam bentuk jenis wisata dan segmen pasar dengan spektrum yang luas. Kawasan Labuan Bajo telah berkembang menjadi kawasan yang layak dan cocok sebagai kawasan wisata perkotaan yang mempunyai potensi dan sumber daya seperti yang dibutuhkan. Saat ini sub-KTA Labuan Bajo mempunyai aktivitas wisata yang telah berkembang, seperti wisata pantai, wisata belanja, wisata seni budaya, dan kuliner. Beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan di kawasan ini, seperti wisata buatan yang berorientasi pada segmen keluarga dan minat khusus, serta penguatan wisata seni dan budaya. Di Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan dapat dilengkapi dengan pelaksanaan *event* untuk meningkatkan daya tarik dan kedatangan wisatawan. Pelaksanaan *event* dimaksudkan untuk mengisi aktivitas wisata pada musim sepi (*low season*).

Pengembangan Sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan dapat dibagi menjadi beberapa pengembangan DTW prioritas yang terdiri dari:

1) Daya Tarik Wisata Prioritas Pantai Wae Cicu

   Pantai Wae Cicu adalah tempat ideal untuk bersantai sambil menikmati hidangan khas Manggarai Barat. Keunikan pantai ini termasuk orientasinya yang menghadap barat, memungkinkan pengunjung menikmati matahari tenggelam. Selain itu, pantai ini juga digunakan sebagai tempat parkir kapal pinisi dan memiliki potensi untuk pengembangan olahraga air. Terletak di antara hotel besar dengan akses mudah, Pantai Wae Cicu cocok untuk keluarga.

2) Daya Tarik Wisata Prioritas Bukit Binongko

   Lokasi ini adalah perbukitan dengan hotel dan restoran yang menghadap laut, ideal untuk menikmati pemandangan dan menikmati pesisir pantai Binongko serta menikmati matahari tenggelam. Terletak di zona Pariwisata yang berkembang, dengan akses jalan besar untuk menghubungkan lokasi-lokasi menarik, menciptakan ruang panorama pantai yang indah.

3) Daya Tarik Wisata Prioritas Taro Sitangga

   Lokasi ini adalah tanjung di ujung utara Kota Labuan Bajo dengan pemandangan ke segala penjuru. Ideal untuk menikmati pemandangan dan bersantai sambil menikmati lanskap laut dan pantai yang menakjubkan. Terletak di zona Pariwisata berkembang dengan ruang

terbuka yang siap dikembangkan, menawarkan pengalaman panorama keindahan lanskap laut.

4) Daya Tarik Wisata Prioritas Pantai Wae Rana

Pantai Wae Rana menyajikan keindahan panorama alam gugusan pulau yang memukau. Lahan berada dalam zona layak dikembangkan untuk Pariwisata. Terletak di antara hotel-hotel dan restoran dengan akses jalan yang lebar menjadikan pantai ini sebagai ruang publik massal. Menjadi ruang wisata panorama yang mengedepankan keindahan lanskap laut dan pantai.

5) Daya Tarik Wisata Prioritas Puncak Waringin

Lokasi ini adalah perbukitan dengan fasilitas pedestrian dan tempat duduk. Menawarkan pemandangan lanskap pesisir Kota Labuan Bajo dan pulau-pulau kecil di arah Barat, serta menyajikan kesempatan untuk menikmati matahari terbenam. Lahan ini masuk dalam zona Pariwisata dengan ruang terbuka dan fasilitas pendukung yang telah tersedia. Akses kendaraan terbatas oleh jalan yang berbukit dan sempit di sekitar area. Sebuah destinasi panorama yang memperlihatkan keindahan lanskap perairan Labuan Bajo.

Rencana penahapan di sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan masuk dalam fase pemulihan. Pada fase ini program difokuskan pada pemenuhan standar Pariwisata berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif di sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan. Konsep pengembangan '*low hanging fruit'* dalam tahap awal agar dapat menarik wisatawan secara lebih mudah dengan lokasi di sekitar Labuan Bajo Perkotaan. Arahan pengembangan salah satu titik daya tarik prioritas di sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan yaitu Bukit Sylvia. Sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan berada pada topografi yang berbukit-bukit dan berbatasan dengan perairan laut di sisi barat. Perbukitan menghadap laut dengan akses jalan yang baik menjadikan sub-KTA ini dipenuhi oleh pembangunan hotel dan restoran yang menawarkan pemandangan sebagai daya tarik utama. Konsep desain kawasan Bukit Sylvia adalah sebagai wisata eksklusif yang dilengkapi dengan fasilitas akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung yang eksklusif. Penataan massa bangunan dilakukan dengan pola organik dan berorientasi ke arah pemandangan laut. Desain arsitektur bangunan mengadopsi arsitektur lokal Bajo, sehingga dapat mengangkat lokalitas arsitektur setempat dan berkesan selaras dengan alam sekitarnya.

b) Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu

Tema untuk sub-KTA Batu Cermin–Wae Kelambu yaitu wisata gua dan seni budaya. sub-KTA Batu Cermin–Wae Kelambu berada berbatasan langsung dengan sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan, dan masih merupakan

area kawasan yang masuk dalam aktivitas perkotaan. Pada kawasan ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi salah satu unggulan, yaitu Goa Batu Cermin. DTW ini menawarkan wisata alam Goa yang mempunyai pesona alam dengan refleksi cahaya di dinding batu dan tampak seperti cermin. Kawasan ini juga telah dibangun oleh Kementerian PUPR dengan fasilitas yang lebih baik, sehingga bisa menjadi area pertunjukan dan pelaksanaan *event*. Salah satu alasannya adalah terdapatnya potensi sanggar-sangar seni budaya di sekitar kawasan Batu Cermin yang memerlukan area untuk menampilkan pertunjukan seni budaya kepada masyarakat maupun wisatawan.

Pengembangan sub-KTA Batu Cermin-Wae Kelambu dapat dibagi menjadi beberapa pengembangan daya tarik wisata prioritas yang terdiri dari:

1) Daya Tarik Wisata Prioritas Gua Batu Cermin

Wisatawan dapat menjelajahi keindahan Gua Batu Cermin dengan jalan kaki. Di sekitarnya, terdapat sanggar seni dan panggung terbuka untuk pertunjukan kesenian. Formasi stalagmit dan stalaktit di dalam gua menghadirkan keindahan khusus ketika terkena cahaya matahari, menciptakan efek cermin. Wisatawan juga dapat membeli karya seni lokal dari penduduk setempat. Menggabungkan keindahan alam gua dengan seni dan budaya lokal akan memberikan pengalaman yang memikat. Lokasi ini sesuai untuk pengembangan Pariwisata, menawarkan aktivitas di ruang terbuka dekat pesisir pantai dengan atmosfer perbukitan yang unik. Akses jalan yang baik memungkinkan pengembangan Pariwisata massa dalam skala kecil. Goa Batu Cermin menjadi titik temu antara alam dan seni lokal.

2) Bukit Budaya Bajo - Kelurahan Wae Kelambu

Kegiatan yang dilakukan wisatawan adalah berjalan menikmati alam, duduk di warung yang disediakan masyarakat lokal untuk menikmati makanan dan minuman. Suasana yang bisa dinikmati oleh semua jenis wisatawan, tetapi bisa memberi kesan yang premium. Lahan dikelola oleh BOPLBF, bisa dikembangkan, untuk menjadi pilihan utama wisatawan dalam menghabiskan waktu di Labuan Bajo. Dukungan akses dan fasilitas yang baik bisa menjadi tujuan wisata favorit dan menjadi daya tarik wisata yang merepresentasikan Labuan Bajo.

Rencana penahapan di sub-KTA Batu Cermin–Wae Kelambu masuk dalam fase pemulihan. Pada fase ini program difokuskan pada pemenuhan standar Pariwisata berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif di sub-KTA Batu Cermin–Wae Kelambu. Konsep pengembangan '*low hanging fruit*' dalam tahap awal agar dapat menarik wisatawan secara lebih mudah dengan lokasi di sekitar sub-KTA Batu Cermin–Wae Kelambu. Arahan pengembangan salah

satu titik daya tarik prioritas di sub-KTA Batu Cermin–Wae Kelambu yaitu Pusat Budaya Bajo dan Cendera Mata. Konsep desain Pusat Budaya Bajo dan Cendera Mata mengangkat tema modern dengan memanfaatkan akses arsitektur bertema tradisional. Fasilitas yang diwadahi dalam pusat kebudayaan ini dilengkapi dengan toko pedagang, plaza, instalasi seni, serta fasilitas pendukung seperti parkir dan toilet. Fungsi utama yang diwadahi adalah sebagai sarana ruang publik masyarakat atau wisatawan dalam mengekspresikan seni dan budaya Bajo dan sekitarnya.

c) Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas

Tema di sub-KTA Gorontalo–Golo Bilas yaitu Wisata Keluarga dan MICE. sub-KTA Gorontalo–Golo Bilas juga berada berbatasan langsung dengan sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan di bagian Barat. Sub-KTA ini merupakan kawasan yang berada di sisi pantai bagian Barat dengan keberadaan Pedestrian Pantai Pede, sepanjang pantai ini masih terdapat lahan kosong yang dapat dikembangkan menjadi wisata buatan, seperti museum dan taman bahari, serta Pantai Pede yang dapat dikembangkan menjadi wisata kuliner boga bahari dan olahraga air. Potensi kuliner boga bahari sangat besar, dan keberadaan kawasan kuliner saat ini belum dirasa representatif untuk destinasi premium. Potensi pantai Pede dapat dikembangkan menyerupai Pantai Jimbaran di Bali dengan latar pulau di Taman Nasional Komodo, matahari tenggelam, dan kapal pinisi. Pasar Hal tersebut untuk mewadahi segmen pasar keluarga yang berorientasi pada hiburan dan pendidikan, serta dapat menjadi wisata alternatif yang berbasis pada edukasi satwa Komodo di luar Taman Nasional. Selain itu, kawasan Golo Bilas merupakan kawasan pengembangan dari BOPLBF yang akan menjadi kawasan wisata baru, khususnya wisata MICE.

Sub-KTA Gorontalo–Golo Bilas dapat dibagi menjadi beberapa pengembangan DTW prioritas yang terdiri dari:

1) Pantai Pede

Pantai ini cocok untuk bersantai sambil menikmati hidangan khas Manggarai Barat dan keindahan senja dengan pemandangan ke arah barat. Lokasi pantai menyediakan tempat parkir untuk kapal pinisi dan menawarkan topografi menarik dengan pulau-pulau di Taman Nasional Komodo. Pantai ini juga memiliki perairan tenang di musim tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga air. Terletak di antara hotel besar, pantai ini mudah diakses oleh berbagai jenis kendaraan dan transportasi. Dengan potensinya yang luas, Pantai Pede dapat menjadi destinasi kuliner keluarga yang menarik.

2) Puncak Pramuka

Pada Puncak Pramuka, pengunjung dapat menikmati pertunjukan seni tradisional dan kontemporer di panggung terbuka sambil menikmati pemandangan laut. Pengunjung juga memiliki opsi untuk membeli makanan, minuman, dan suvenir seni dari masyarakat setempat. Dengan luasnya area ini, terdapat potensi untuk pengembangan lebih lanjut dengan menjaga daya tarik wisata yang unik. Puncak Pramuka dapat diarahkan sebagai tempat pertemuan dan pertunjukan seni.

3) Bukit Budaya Bajo

Wisatawan dapat menjelajahi bukit dengan tumbuhan yang hijau saat musim hujan dan berubah menjadi cokelat saat kemarau. Pengembangan museum di sini menggabungkan unsur wisata keluarga dan pendidikan. Menikmati pemandangan laut dari ketinggian dengan latar belakang padang, pohon lontar, laut, dan matahari terbenam memberikan pengalaman unik. Kawasan yang dikelola oleh BOPLBF masih memiliki potensi pengembangan. Dengan akses dan fasilitas yang baik, daya tarik ini dapat dengan mudah dikunjungi oleh wisatawan. Lahan yang dikelola oleh BOPLBF ini dapat dijadikan ruang untuk keluarga dan pertemuan.

Rencana penahapan di Sub-KTA Gorontalo–Golo Bilas masuk dalam fase pemulihan. Pada fase ini program difokuskan pada pemenuhan standar Pariwisata berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif di sub-KTA Gorontalo–Golo Bilas. Konsep pengembangan '*low hanging fruit*' dalam tahap awal agar dapat menarik wisatawan secara lebih mudah dengan lokasi di sekitar sub-KTA Gorontalo–Golo Bilas. Arahan pengembangan titik daya tarik prioritas di sub-KTA Gorontalo–Golo Bilas yaitu Pede *Seafood Paradise*, Bajo *Marine Park*, dan Puncak Pramuka.

(1) Pantai Pede–Sea Food Paradise

Konsep desain Kawasan Pede *Seafood Paradise* adalah kawasan kuliner hasil laut yang memanfaatkan Kawasan pantai sebagai resto terbuka dengan pemandangan matahari tenggelam sebagai atraksinya. Massa bangunan resto utama diletakkan dengan jarak ±200M dari garis pantai, sebagai upaya memenuhi persyaratan garis sempadan pantai, sehingga di kawasan ini terdapat sedikit bangunan yang buat namun lebih banyak memiliki ruang terbuka sebagai area kulinernya. Dengan desain tersebut maka pemenuhan kebutuhan kegiatan kuliner dipenuhi dengan menambahkan kios makanan portabel atau truk kuliner yang bersifat dinamis. Sehingga area garis sempadan pantainya akan tetap terjaga dari adanya bangunan yang bersifat permanen. Bangunan ini dilengkapi dengan fasilitas *ramp* untuk penyandang disabilitas, sehingga mudah di akses untuk semua kalangan pengunjung.

(2) Puncak Pramuka

Konsep desain Kawasan Puncak Pramuka adalah titik pandang bernuansa alam. Desain yang dibuat adalah plaza terbuka berbentuk open amfiteater dengan menggunakan pola organis dan menyatu dengan garis-garis kontur, serta memanfaatkan material-material lokal yang ada sehingga berkesan selaras dengan alam sekitarnya. Fasilitas ini dapat mewadahi aktivitas petualangan ringan dengan pemandangan laut dari atas bukit sebagai atraksi utamanya.

d) Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka

Tema untuk sub-KTA Golo Mori–Warloka yaitu wisata alam. Kawasan ini terletak pada ujung luar Selatan Kota Labuan Bajo, yang mempunyai hamparan perbukitan diselimuti padang sabana. Selain itu, juga terdapat hewan-hewan liar seperti kerbau, rusa, babi hutan, dan monyet. Hewan-hewan tersebut merupakan mangsa alami Komodo sehingga pada musim tertentu dapat dijumpai Komodo. Kawasan yang berarti "Bukit Tuhan" ini masih cukup alami dan perlu diperhatikan agar kelestarian alam di kawasan Golo Mori–Warloka terjaga dengan baik. Peta pemanfaatan Kawasan ini masih didominasi oleh Hutan Lindung dan area inti *home range* Komodo sehingga, tidak dapat dilakukan pembangunan fisik.

Sub-KTA Golo Mori-Warloka dapat dibagi menjadi beberapa pengembangan DTW prioritas yang terdiri dari:

1) Kawasan Tana Mori

Tana Mori yang akan dikembangkan merupakan kawasan khusus dengan fokus ekonomi yang beragam, termasuk Pariwisata. Tana Mori, yang terletak 22 km di selatan Labuan Bajo, memiliki akses yang sangat baik dan berpotensi menjadi penggerak pembangunan infrastruktur di sekitarnya. Kawasan ini akan diarahkan untuk menjadi destinasi Pariwisata yang menawarkan fasilitas dan infrastruktur premium.

2) Puncak Golo Mori

Aktivitas yang dapat dinikmati wisatawan di Puncak Golo Mori termasuk *hiking* di alam, menikmati padang sabana, berinteraksi dengan masyarakat lokal, dan bersepeda. Terdapat gardu pandang yang menawarkan pemandangan pantai dan laut yang menakjubkan. Wisatawan dapat membeli makanan, minuman, dan cendera mata dari warga lokal. Kawasan ini memiliki potensi untuk pengembangan wisata alam berkelompok kecil. Upaya menjaga kelestarian alam adalah fokus utama di kawasan ini.

3) Muara Nggoer

Wisatawan dapat melakukan perjalanan ke muara sungai, menikmati kontras antara lanskap alami yang tandus dan pinggiran yang subur, menciptakan daya tarik unik. Kawasan ini memiliki karakteristik yang tidak mendukung pengembangan besar-besaran dan harus tetap dijaga untuk mempertahankan keasliannya. Makna utama daya tarik wisata di kawasan ini adalah kealamian lingkungannya.

4) Bukit Indah Warloka

Wisatawan dapat menikmati keindahan alam khas Manggarai Barat dengan melakukan perjalanan santai ke bukit. Di sini, mereka dapat menikmati pemandangan laut dan pesisir. Bukit Warloka memiliki potensi pengembangan yang unik untuk membedakannya dari bukit-bukit lainnya. Meskipun pembangunan dimungkinkan, penting untuk tetap mempertahankan keaslian alam di Bukit Warloka. Arti utama dari daya tarik wisata di kawasan ini adalah kealamian alam dan interaksi dengan masyarakat lokal.

5) Bukit Sasha

Wisatawan dapat melakukan jalan kaki santai di bukit ini sambil menikmati pemandangan khas Pesisir Labuan Bajo yang unik. Keindahan alam yang masih alami menciptakan pengalaman berwisata di alam yang asri. Menikmati hembusan angin dan matahari terbenam merupakan daya tarik tambahan. Kawasan ini cocok untuk mempertahankan alaminya sambil menambahkan fasilitas Pariwisata yang mendukung aktivitas wisatawan.

Rencana penahapan di Sub-KTA Golo Mori–Warloka masuk dalam fase pemulihan. Pada fase ini program difokuskan pada pemenuhan standar Pariwisata berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif di sub-KTA Golo Mori–Warloka. Konsep pengembangan '*low hanging fruit*' dalam tahap awal agar dapat menarik wisatawan secara lebih mudah dengan lokasi di sekitar sub-KTA Golo Mori–Warloka. Arahan pengembangan titik daya tarik prioritas di sub-KTA Golo Mori–Warloka yaitu perbukitan Golo Mori-Warloka dan KEK Tana Mori

(1) Perbukitan di Golo Mori - Warloka

Konsep desain Kawasan ini adalah wisata alam berbasis petualangan ringan. Memanfaatkan pola kontur perbukitan yang ada dengan menambahkan jalur *trekking*, gardu pandang, *shelter*, serta fasilitas pendukung seperti toilet. Bentuk fasilitas didesain bersifat organis dengan memanfaatkan material alam dan bentuk-bentuk natural, sehingga berkesan selaras dengan alam sekitarnya.

(2) Kawasan Tana Mori

Konsep pengembangan yang dilakukan di kawasan Tana Mori mengikuti kontur alam dengan tidak memotong bukit yang ada karena bukit yang ada memberikan panorama yang menarik bagi kawasan. Konsep pengembangan massa bangunan yang besar seperti hotel dan gedung MICE mengikuti kontur alam kawasan. Berdasarkan masterplan yang ada, beberapa atraksi yang akan dikembangkan adalah Tana Mori *Hike Trail*, Villa, dan jembatan gantung Tana Mori. Sedangkan pengembangan beberapa amenitas meliputi: Dua hotel bintang 5, Dua lokasi vila masing-masing 30 unit, satu hotel bintang 4, arena konvensi, Pelabuhan marina, dan Infrastruktur dasar.

e) Sub-KTA 5 Labuan Bajo Perairan

Tema untuk sub-KTA Labuan Bajo perairan yaitu wisata bahari. sub-KTA Bajo Perairan adalah kawasan kepulauan di luar Taman Nasional Komodo yang terletak di sebelah Barat Kota Labuan Bajo, kawasan ini mempunyai potensi sebagai kegiatan wisata bahari, seperti menyelam, *snorkeling*, dan olahraga air. Saat ini terdapat beberapa Resort yang berada di Pulau Seraya sebagai embrio. Sub-KTA Labuan Bajo Perairan dapat dibagi menjadi beberapa pengembangan DTW prioritas yang terdiri dari:

1) Desa Wisata Pasir Putih

   Kegiatan air seperti *snorkeling* dan *kayaking*, serta makan malam di kapal, dapat dinikmati wisatawan. Melihat dan berinteraksi dengan masyarakat desa kepulauan menawarkan pengalaman menarik. Area bahari ini cocok untuk pengembangan berbagai jenis olahraga air khusus dengan fasilitas Pariwisata yang masih dapat ditingkatkan. Ruang di desa ini memadukan keindahan bahari dan kehidupan masyarakat setempat.

2) Pulau Seraya

   Di sisi utara Labuan Bajo, wisatawan dapat menikmati *snorkeling* di sekitar pulau, kano di perairan yang tenang, dan berpartisipasi dalam beragam aktivitas olahraga air seperti *banana boat*, *flying fish*, dan *speed boat*. Menikmati makan siang di kapal sekaligus menikmati pemandangan laut menawarkan pengalaman yang unik. Kawasan ini telah dilengkapi dengan fasilitas Pariwisata yang komprehensif dan masih memiliki potensi untuk aktivitas tambahan tanpa mengorbankan kebutuhan ruang. Ruang di pulau ini menawarkan keindahan bahari dan alam yang alami.

3) Pulau Konawa

Pulau kecil ini telah menjadi eksotik dan terkenal di platform media sosial seperti Instagram. Terletak di tengah sabana, pulau ini berubah warna dari hijau saat hujan hingga cokelat saat kemarau. Wisatawan dapat menikmati aktivitas alam, fotografi, dan *snorkeling* di pulau ini. Untuk mempertahankan keunikan alam, pembangunan fasilitas Pariwisata harus dilakukan dengan bijak, karena pulau ini umumnya dikunjungi oleh wisatawan dengan minat khusus. Ruang di pulau ini menawarkan pengalaman bahari yang alami dan indah.

Rencana penahapan di sub-KTA Labuan Bajo Perairan masuk dalam fase percepatan. Fase ini merupakan fase perluasan pengembangan di KTA dalam fase pemulihan. Pemerataan dilakukan agar pengembangan ekonomi ikutan dari kegiatan Pariwisata semakin berkembang dan lebih luas. Penguatan kelembagaan Pariwisata, pengembangan promosi, dan pemasaran Pariwisata dilakukan untuk mencapai target wisatawan sesuai dengan proyeksi. Pengembangan sub-KTA Labuan Bajo Perairan bertujuan untuk menampung pertumbuhan wisatawan yang diproyeksikan semakin tinggi, mengembangkan Pariwisata dan ekonomi di luar KTA, dan inklusivitas agar kawasan di luar KTA juga mendapatkan pengembangan infrastruktur dan SDM pendukung Pariwisata. Konsep desain Kawasan ini adalah sebagai fasilitas pendukung aktivitas wisata bahari. Fasilitas yang ditambahkan adalah dermaga wisata yang dilengkapi dengan fasilitas penyewaan kapal-perlengkapan *snorkeling* dan menyelam, serta fasilitas pendukung seperti unit kesehatan dan toilet. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat diletakkan tersebar di beberapa pulau-pulau kecil yang ada di area Labuan Bajo Perairan.

f) Sub-KTA 6 Longos

Tema untuk sub-KTA Pulau Longos yaitu wisata budaya dan wisata bahari. Pulau Longos adalah pulau yang terdapat di bagian Utara Flores, kawasan ini merupakan pulau dengan permukiman penduduk yang sebagian besar adalah suku Bajo. Pulau yang sebagian adalah Kecamatan Boleng dan sebagian lainnya adalah Kecamatan Macang Pacar ini mempunyai potensi budaya aktivitas masyarakatnya, seperti upacara adat setempat, budidaya rumput laut, dan perajin kapal kayu. Selain itu terdapat potensi wisata alam seperti pemandangan alam, biota laut yang dapat menjadi potensi kegiatan *snorkeling*, migrasi kelelawar besar, dan terdapat juga temuan Komodo di kawasan tersebut.

1) Pulau Longos

Pulau kecil yang terletak di sebelah Timur Laut dari Labuan Bajo ini menawarkan pengalaman unik melalui interaksi dengan masyarakat lokal. Wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat, termasuk budi daya rumput laut dan kerajinan kapal kayu tradisional. Selain itu, pulau ini cocok untuk aktivitas wisata bahari seperti *snorkeling* dan *diving*. Pengembangan ruang ini dapat mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat, yang memungkinkan alam dan budaya lokal tetap terjaga. Ini adalah ruang yang memadukan kelestarian alam dan pengalaman wisata bahari yang mendalam.

Pada Kawasan sekitar Longos dapat dikembangkan aktivitas marine ecopark sebagai kawasan edukasi habitat asli satwa bahari.

2) Hutan Bakau Terang

Melihat hutan bakau di pesisir dengan ekosistemnya yang unik bisa menjadi wisata edukasi yang baik. Jenis Kawasan ini bisa dikembangkan tetapi dengan pendekatan ekowisata dengan minat khusus. Pengembangan ruang dilakukan secara pelan agar tidak mengganggu ekosistem yang ada. Ini adalah ruang yang memadukan kelestarian alam dan pengalaman wisata bahari yang mendalam.

Rencana penahapan di Longos masuk dalam fase percepatan. Fase ini merupakan fase perluasan pengembangan di KTA dalam fase pemulihan. Pemerataan dilakukan agar pengembangan ekonomi ikutan dari kegiatan Pariwisata semakin berkembang dan lebih luas. Penguatan kelembagaan Pariwisata, pengembangan promosi, dan pemasaran Pariwisata dilakukan untuk mencapai target wisatawan sesuai dengan proyeksi. Pengembangan sub-KTA Longos bertujuan untuk menampung pertumbuhan wisatawan yang diproyeksikan semakin tinggi, mengembangkan Pariwisata dan ekonomi di luar KTA, dan inklusivitas agar kawasan di luar KTA juga mendapatkan pengembangan infrastruktur dan SDM pendukung Pariwisata.

Konsep desain Kawasan ini adalah mengangkat Longos sebagai Kawasan wisata dengan aktivitas masyarakat lokal sebagai atraksi utamanya. Strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman (jalan setapak, dermaga, *boardwalk*, dan fasilitas umum lainnya), serta meningkatkan estetika Kawasan dengan menambahkan vegetasi-vegetasi berupa tanaman hias dan *street furniture* berupa lampu penerangan jalan, *signage*, dan *benches*.

g) Sub-KTA 7 Boleng–Goa Rangko

Tema untuk sub-KTA Boleng–Goa Rangko yaitu ekowisata. Sub-KTA ini mempunyai potensi wisata alam yang menarik, baik alam bahari maupun

yang daratan. Keberadaan Goa Rangko sebagai atraksi utama di sub-KTA ini dapat dicapai dengan menyewa perahu dari penduduk di Desa Rangko, sekaligus menikmati pemandangan laut dalam perjalanan ke Goa Rangko. Selain itu terdapat daya tarik wisata Wae Bobok yang merupakan Hutan Wisata berbasis Ekowisata, yang menawarkan keindahan alam dan kegiatan luar ruang, kawasan ini juga dapat berkembang menjadi area kegiatan manca-krida.

1) Gua Rangko

   Goa Rangko adalah destinasi unik yang terletak di tepi tebing laut, menciptakan fenomena air di dalam goa. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam dengan berenang di Goa Rangko sambil sesekali melihat kelelawar yang lewat, mencerminkan kealamian tempat ini. Perjalanan menuju Goa Rangko menggunakan perahu yang disewakan oleh masyarakat lokal menawarkan pemandangan alam yang menarik di sepanjang pesisir. Di sini, pengembangan ruang berfokus pada Pariwisata berbasis ekowisata yang menggabungkan pelestarian alam, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Goa ini adalah contoh ruang ekowisata yang memadukan keindahan alam dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

2) Wae Bobok

   Daya tarik ini menawarkan berbagai aktivitas seperti berkemah, kegiatan di luar ruangan, dan manca-krida. Meskipun lingkungannya alami, tersedia fasilitas untuk makan dan minum, memastikan kenyamanan wisatawan. Kawasan ini, dengan alamnya yang masih utuh, memiliki potensi untuk dikembangkan dengan konsep wisata petualangan yang serupa. Ini membuatnya menjadi ruang ekowisata yang memadukan keindahan alam dengan kesenangan berpetualang.

Rencana penahapan di Sub-KTA Boleng–Goa Rangko masuk dalam fase percepatan. Fase ini merupakan fase perluasan pengembangan di KTA dalam fase pemulihan. Pemerataan dilakukan agar pengembangan ekonomi ikutan dari kegiatan Pariwisata semakin berkembang dan lebih luas. Penguatan kelembagaan Pariwisata, pengembangan promosi, dan pemasaran Pariwisata dilakukan untuk mencapai target wisatawan sesuai dengan proyeksi. Pengembangan sub-KTA Boleng-Goa Rangko bertujuan untuk menampung pertumbuhan wisatawan yang diproyeksikan semakin tinggi, mengembangkan Pariwisata dan ekonomi di luar KTA, dan inklusivitas agar kawasan di luar KTA juga mendapatkan pengembangan infrastruktur dan

SDM pendukung Pariwisata. Arahan pengembangan dua daya tarik prioritas di sub-KTA ini yaitu:

1) Goa Rangko

   Konsep desain Kawasan ini adalah menambahkan fasilitas pendukung aktivitas wisata di Kawasan Goa Rangko berupa dermaga wisata, dan jalan setapak di dalam goa. Dengan konsep desain yang meminimalkan intervensi pembangunan di kawasan goa, serta hanya menggunakan material lokal yang bersifat alami.

2) Ekowisata Wae Bobok

   Pada area perbukitan didesain sebagai fasilitas berkemah dan manca-krida, dengan intervensi desain berupa jalan setapak, serta area berkemah dan area api unggun.

h) Sub-KTA 8 Mbeliling–Cunca Wulang

Tema untuk sub-KTA Mbeliling–Cunca Wulang yaitu wisata petualangan. Sub-KTA Mbeliling–Cunca Wulang terdapat beberapa DTW yang berbasis alam pedesaan, misalnya Air Terjun Cunca Wulang, Cunca Rami, Cunca Perlamping, lalu terdapat desa wisata Liang Ndara dengan potensi alam dan budaya. Kawasan Air Terjun Cunca Wulang merupakan kawasan hutan dengan yang memiliki atraksi air terjun. Pada kawasan ini pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan fasilitas di sekitar kawasan seperti jalan akses menuju kawasan Cunca Wulang, fasilitas parkir, jalur *trekking*, fasilitas pendukung destinasi (toilet, gazebo istirahat, penunjuk arah, fasilitas keamanan), jembatan di lokasi Cunca Wulang. Selain itu pengembangan lainnya di sekitar kawasan yang masih menjadi hutan dapat menjadi alternatif jalur *trekking* di sekitar kawasan ini.

1) Air terjun Cunca Wulang

   Trekking ke air terjun memungkinkan wisatawan merasakan keindahan alam dan suasana alam yang masih asri. Air Terjun Cunca Wulang yang alami memberikan suasana sejuk dan ketenangan, serta menjadi objek menarik bagi fotografi. Kawasan ini dapat dikembangkan untuk beberapa jenis aktivitas Pariwisata, namun dengan tetap mempertahankan alamnya dan tidak membangun fasilitas Pariwisata yang berlebihan. Ini menjadikannya sebagai ruang alam yang menawarkan pengalaman yang unik bagi wisatawan minat khusus.

2) Air terjun Cunca Perlamping

   Air terjun ini adalah tempat yang ideal untuk *trekking*, memungkinkan wisatawan untuk menikmati keindahan alam serta keunikan air terjun yang alami. Kegiatan seperti menjelajahi alam, melihat sungai, dan mandi di bawah air terjun dapat dilakukan oleh pengunjung. Ruang di

sekitar air terjun ini dapat diperluas dengan menambahkan fasilitas pendukung layanan ekowisata. Hal ini akan menjaga makna ruang di air terjun sebagai ruang alam yang alami sambil memberikan pengalaman Pariwisata yang lebih lengkap.

3) Desa Wisata Liang Ndara

Kampung Liang Ndara menyajikan kesempatan bagi wisatawan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal dan merasakan budaya serta kearifan setempat, termasuk Tarian Tradisional Caci yang mengandung cerita budaya. Keadaan alam pedesaan yang masih kental dengan tradisi bisa menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Ruang ini dapat dikembangkan dengan pendekatan Pariwisata berbasis budaya yang melibatkan masyarakat lokal, membentuk sebuah desa wisata berbasis budaya di Kampung Liang Ndara. Ini menjadikan Kampung Liang Ndara sebagai ruang budaya yang kaya akan pengalaman lokal.

4) Desa Wisata Melo

Desa Wisata Melo adalah salah satu desa tradisional dan telah ditetapkan menjadi desa wisata. Melo memiliki kekayaan seni dan budaya serta keindahan alam. Penduduknya ramah kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung. Di sini wisatawan bisa melihat langsung cara hidup masyarakat setempat khususnya bercocok tanam, membuat kerajinan tangan seperti tenun songket, keranjang, topi dan kesetan. Desa ini terletak tidak jauh dari Labuan Bajo dan posisinya berada pada ketinggian. Untuk menuju ke desa ini kita bisa menempuh perjalanan melalaui Trans Flores dengan estimasi waktu tiba di desa ini 30 menit perjalanan dari pusat kota Labuan Bajo.

5) Gunung Mbeliling

Trekking menjadi kegiatan populer di daya tarik ini, dengan berbagai tingkatan kesulitan mulai dari *soft trekking* hingga *hard trekking*. Wisatawan dapat menikmati keindahan hutan alami dan merasakan aliran sungai kecil selama perjalanan, memberikan pengalaman petualangan yang unik di Manggarai Barat. Ruang alam ini memiliki potensi untuk mengembangkan beragam aktivitas Pariwisata tanpa harus membanjiri wilayah ini dengan fasilitas Pariwisata yang berlebihan, sehingga menjaga makna ruang sebagai ruang alam yang alami.

6) Puncak Eltari

Wisatawan dapat melakukan *trekking* ke puncak Eltari, menikmati pemandangan alam dari ketinggian sambil merasakan kesan alam yang masih alami. Keunikan wisata lokal juga memberikan kenangan berharga bagi pengunjung. Sementara itu, aktivitas seperti

menyaksikan matahari terbenam menambah daya tarik tempat ini. Jenis ruang ini berpotensi untuk menjadi destinasi wisata alam yang dilengkapi dengan fasilitas seperti area parkir dan tempat makan-minum, mendukung pengalaman berwisata yang santai di daya tarik ini, dan menjaga makna ruang sebagai ruang alam dan budaya.

7) Air Terjun Cunca Rami

Wisatawan dapat melakukan *trekking* ke air terjun, menikmati keindahan air terjun yang masih alami dalam suasana sepi yang menciptakan pengalaman petualangan alam yang mengasyikkan. Alam yang tetap alami juga memungkinkan para pengunjung untuk merasakan o*xygen bathing* di alam terbuka. Jenis ruang alam ini berpotensi untuk menjadi destinasi wisata petualangan berdasarkan minat khusus, yang dirancang untuk menjaga ekosistem alam yang utuh, serta menjaga makna ruang sebagai ruang alam dan petualangan.

Rencana penahapan di sub-KTA Mbeliling–Cunca Wulang masuk dalam fase percepatan. Fase ini merupakan perluasan pengembangan di KTA dalam fase pemulihan. Pemerataan dilakukan agar pengembangan ekonomi ikutan dari kegiatan Pariwisata semakin berkembang dan lebih luas. Penguatan kelembagaan Pariwisata, pengembangan promosi, dan pemasaran Pariwisata dilakukan untuk mencapai target wisatawan sesuai dengan proyeksi. Pengembangan sub-KTA Mbeliling–Cunca Wulang bertujuan untuk menampung pertumbuhan wisatawan yang diproyeksikan semakin tinggi, mengembangkan Pariwisata dan ekonomi di luar KTA, dan inklusivitas agar kawasan di luar KTA juga mendapatkan pengembangan infrastruktur dan SDM pendukung Pariwisata. Konsep desain Kawasan ini adalah menambahkan fasilitas pendukung aktivitas wisata berbasis alam.

i) Sub-KTA 9 Sano Nggoang

Tema untuk sub-KTA Sano Nggoang yaitu wisata tirta berbasis perairan danau. Sub-KTA Sano Nggoang mempunyai danau kawah belerang dan berada di ketinggian 757 Mdpl. Danau terletak di barat daya Pulau Flores dan dikelilingi oleh tiga desa di Kecamatan Sano Nggoang yang meliputi Desa Wae Sano, Sano Nggoang dan Pulau Nuncung. Danau dan area sekitarnya sebagian besar merupakan hutan lindung karena masih berupa kawasan hutan. Terdapat spesies burung endemis seperti Gagak Flores dan Flores Monarch asli. Selain mempunyai pemandangan alam yang luar biasa, danau ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai wisata air.

1) Desa Wisata Sano Nggoang

Daya tarik wisata ini bisa menjadi penyegar ketika berwisata di Labuan Bajo. Berada di ketinggian 757 Mdpl menciptakan suasana yang sejuk.

Terletak di kawasan hutan yang lebat, wisatawan dapat melakukan *trekking* di sekitar danau dan menyaksikan aktivitas masyarakat lokal. Ruang ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan dengan pendekatan berbasis minat khusus yang memprioritaskan kelestarian alam, mengingat kawasan ini termasuk dalam hutan lindung. Makna ruang di lokasi ini adalah ruang alam dan sumber air.

2) Danau Sano Nggoang

Wisata tirta di danau memungkinkan pengunjung untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan perahu yang disediakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, wisatawan dapat merasakan kenikmatan berendam di dalam danau belerang. Danau ini menawarkan suasana yang tenang, sepi, dan belum terlalu banyak dikunjungi, menciptakan peluang untuk mengembangkan ruang alam danau dengan fokus pada jenis wisata tirta yang menjaga kelestarian ekosistem. Makna ruang di lokasi ini adalah ruang alam dan sumber air.

Rencana penahapan di sub-KTA Sano Nggoang masuk dalam fase percepatan. Fase ini merupakan fase perluasan pengembangan di KTA dalam fase pemulihan. Pemerataan dilakukan agar pengembangan ekonomi ikutan dari kegiatan Pariwisata semakin berkembang dan lebih luas. Penguatan kelembagaan Pariwisata, pengembangan promosi, dan pemasaran Pariwisata dilakukan untuk mencapai target wisatawan sesuai dengan proyeksi. Pengembangan sub-KTA Sano Nggoang bertujuan untuk menampung pertumbuhan wisatawan yang diproyeksikan semakin tinggi, mengembangkan Pariwisata dan ekonomi di luar KTA, dan inklusivitas agar kawasan di luar KTA juga mendapatkan pengembangan infrastruktur dan SDM pendukung Pariwisata. Konsep desain Kawasan ini adalah menambahkan fasilitas pendukung aktivitas wisata berupa jalan setapak atau jalur *trekking*, serta *boardwalk/decking* pada beberapa titik di tepi danau. Material yang digunakan adalah material alam berupa batu dan kayu, sehingga desain fasilitas ini dapat selaras dengan lingkungan sekitarnya.

j) Sub-KTA 10 Ndoso–Golo Lesu

Tema untuk sub-KTA Ndoso–Golo Lesu yaitu wisata petualangan dan wisata ziarah. Pada sub-KTA ini terdapat Kubur Nggerang yang terletak di Desa Ndoso Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat. Kubur ini merupakan peristirahatan terakhir bagi Wela Loe. Menurut penuturan masyarakat lokal, Wela Loe adalah seorang gadis di daerahnya dengan kecantikan tidak tertandingi oleh siapa pun. Selain itu, Golo Lesu menyajikan

deretan perbukitan yang elok dan menjadi satu titik wisata alam yang direkomendasikan bagi para petualang dengan panorama alam yang indah.

1) Kubur Tua Nggerang

   Wisatawan dapat merasakan petualangan di alam pedesaan yang terkait dengan warisan sejarah. Dengan adanya makam tradisional, para pengunjung memiliki kesempatan untuk menjalani wisata ziarah. Sambil menjelajahi desa, pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah keramaian kota. Pengembangan ruang desa ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Makna ruang di lokasi ini adalah sebagai ruang wisata alam dan ziarah berbasis masyarakat.

2) Golo Lesu

   Wisatawan dapat menikmati aktivitas berjalan kaki di desa tradisional Manggarai, yang memungkinkan mereka untuk melihat kehidupan sehari-hari masyarakat desa dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Melakukan petualangan ke alam desa dan perbukitan sekitar Golo Lesu adalah kegiatan yang memenuhi minat khusus para pengunjung. Jenis ruang pedesaan ini dapat dikembangkan menjadi sebuah desa wisata berbasis budaya yang memadukan alam dan budaya lokal. Makna ruang di lokasi ini adalah sebagai ruang wisata petualangan dan alam berbasis budaya.

Rencana penahapan di sub-KTA Ndoso–Golo Lesu masuk dalam fase pemantapan. Pada fase ini sub-KTA telah matang secara kualitas dan perlu adanya pemerataan pengembangan destinasi di Kabupaten Manggarai Barat. Konsep desain kawasan ini adalah menambahkan fasilitas pendukung aktivitas wisata berupa jalan setapak atau jalur *trekking*, yang menggunakan material alam berupa batu dan kayu, sehingga desain fasilitas ini dapat selaras dengan lingkungan sekitarnya.

k) Sub-KTA 11 Lembor–Poco Rutang

Tema untuk sub-KTA Lembor–Poco Rutang yaitu wisata budaya dan agrowisata. sub-KTA ini mempunyai potensi pedesaan dengan sumber daya alam dan budaya sebagai daya tarik wisata, misalnya Desa Poco Rutang yang mempunyai sawah Lodok dengan keunikan berbentuk seperti jaring laba-laba. Lalu juga terdapat Kampung Tado sebagai salah satu desa wisata yang memiliki tenun ikat Manggarai Barat yang unik. Selain itu, Tado pada zaman dulu terkenal sebagai tempat pertahanan yang sulit tergoyahkan oleh tragedi peperangan yang dilakukan oleh pihak luar. Kampung Tado merupakan kawasan yang masih mempertahankan pola pertanian jaring laba-laba atau sawah Lingko. Lokasinya yang dilalui dengan jalan nasional Trans Flores

menjadikan kawasan ini sangat mudah diakses. Pengembangan kawasan ini khususnya di Kampung Tado sebagai wisata alam khususnya pertanian Lingko dan dapat menjadi titik transit bagi wisatawan yang melalui jalan Trans Flores. Pertanian yang ada dapat dikembangkan dengan pertanian berkelanjutan dan tetap mempertahankan budaya pertanian Lingko. Selain itu juga dapat mengembangkan *homestay* dan fasilitas transit wisatawan sebagai tambahan amenitas. Penambahan fasilitas lainnya dapat dengan pengembangan jalur *trekking* agar sesuai standar keamanan untuk mencapai bukit di Kampung Tado untuk melihat sawah Lingko. Atraksi budaya yang berada di Kampung Tado juga dapat dikembangkan sehingga memiliki even yang dapat diselenggarakan secara insidental ketika terdapat rombongan yang datang seperti pertunjukan tari maupun even tahunan yang bisa menambah atraksi yang ada.

1) Sawah Lodok Poco Rutang

   Kegiatan jalan kaki santai dari desa di sisi sawah Lodok ke puncak bukit menjadi awal dari pengalaman menikmati hamparan sawah yang terbagi-bagi seperti sarang laba-laba. Wisatawan dapat menikmati area persawahan di pegunungan yang memiliki udara sejuk. Ruang di sekitar area bukit dengan sawah laba-laba ini dapat dikembangkan untuk aktivitas wisatawan yang bersifat spesifik dan khusus, menjaga kelestarian lingkungan dan keaslian budaya setempat. Makna ruang di lokasi ini adalah sebagai ruang budaya dan pemandangan alam yang unik.

2) Watu Panggal

   Wisatawan dapat merasakan keaslian alam pedesaan sambil mengunjungi perkampungan Flores yang masih mempertahankan tradisinya. Melalui kegiatan *trekking* di desa dan berinteraksi dengan masyarakat lokal, wisatawan dapat merasakan pengalaman yang unik. Ruang ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis budaya dan alam yang memadukan keindahan alam dan warisan budaya setempat. Makna ruang di lokasi ini adalah sebagai ruang alam dan budaya yang otentik.

3) Pantai Mberenang

   Wisatawan dapat menikmati keindahan alam pedesaan Manggarai Barat dengan mengendarai sepeda motor dan berinteraksi dengan masyarakat lokal di pesisir selatan. Pantai yang alami dan tenang memberikan pengalaman yang menenangkan bagi pengunjung. Ruang alam ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dengan pendekatan berorientasi pada partisipasi masyarakat.

Makna ruang di lokasi ini adalah sebagai ruang alam dan budaya yang autentik.

4) Pantai Repi

Wisatawan dapat menikmati bermain di tepi pantai, berjemur, dan berenang. Perjalanan ke pantai yang agak jauh dapat dinikmati dengan mengendarai sepeda motor, sehingga mereka dapat melihat pedesaan Manggarai Barat yang masih asli. Kawasan yang terpencil dari Labuan Bajo dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang berfokus pada kehidupan masyarakat pesisir lokal yang unik. Pantai yang belum begitu populer menawarkan ketenangan bagi wisatawan yang mencari pengalaman yang berbeda. Makna ruang di lokasi ini adalah sebagai ruang wisata alam yang tenang dan autentik.

5) Kampung Tado

Wisatawan dapat mengenal lebih dekat budaya lokal dengan menjelajahi arsitektur bangunan unik dan mendengar cerita-cerita khas di baliknya. Mereka juga memiliki kesempatan untuk menyewa pakaian tradisional seperti tenun ikat untuk merasakan hidup seperti warga lokal. Terletak di perbukitan, daya tarik wisata ini menawarkan suhu yang sejuk. Pengelolaan ruang budaya ini harus didasarkan pada kearifan lokal dengan manajemen pengunjung yang baik untuk menghindari dampak negatif. Makna ruang di lokasi ini adalah sebagai ruang budaya dan tradisional yang unik.

Rencana penahapan di sub-KTA Lembor–Poco Rutang masuk dalam fase percepatan. Fase ini merupakan perluasan pengembangan di KTA dalam fase pemulihan. Pemerataan dilakukan agar pengembangan ekonomi ikutan dari kegiatan Pariwisata semakin berkembang dan lebih luas. Penguatan kelembagaan Pariwisata, pengembangan promosi, dan pemasaran Pariwisata dilakukan untuk mencapai target wisatawan sesuai dengan proyeksi. Pengembangan sub-KTA Lembor–Poco Rutang bertujuan untuk menampung pertumbuhan wisatawan yang diproyeksikan semakin tinggi, mengembangkan Pariwisata dan ekonomi di luar KTA, dan inklusivitas agar kawasan di luar KTA juga mendapatkan pengembangan infrastruktur dan SDM pendukung Pariwisata. Konsep desain kawasan ini adalah menambahkan fasilitas pendukung aktivitas wisata berbasis agro berupa jalan setapak yang menggunakan material batu alam yang dikombinasi jalan setapak alami sepanjang pematang sawah maupun kontur terasering yang ada. Fasilitas pendukung lainnya berupa *signage*, gazebo, kios cendera mata dan hasil olahan pertanian, yang terletak di beberapa titik strategis yang berdekatan dengan akses jalan utama.

C. Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata

1. Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata KTA 1 Taman Nasional Komodo

Program sektor transportasi publik untuk mendukung perencanaan KTA 1 Taman Nasional Komodo yaitu berupa perbaikan dan penambahan fasilitas dermaga di Pulau Papa Garang dan Pulau Komodo. Perbaikan dan penambahan fasilitas ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi wisatawan. Risiko kecelakaan yang dapat terjadi membutuhkan transportasi penyelamatan dan peningkatan kualitas dermaga kapal sehingga dibutuhkan helipad di Pulau Komodo dan dermaga wisata di Pulau Padar bagian selatan. Pengembangan aksesibilitas di KTA 1 ini dilakukan pada tahap awal yaitu kurun waktu 2024.

2. Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya

a) Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan

Program sektor transportasi publik untuk mendukung perencanaan di Sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan yaitu pembangunan terminal, pembangunan halte bus, pembangunan Pelabuhan kapal pesiar, pembangunan parkir, dan perbaikan dan penambahan fasilitas dermaga. Selain transportasi publik, aksesibilitas berupa pengembangan jalan perlu dilakukan untuk mendukung perencanaan di Sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan. Program yang diusulkan berupa penyediaan prasarana keselamatan jalan di semua ruas jalan nasional dan jalan kabupaten serta peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan. Program pengembangan aksesibilitas di Sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan dilaksanakan pada tahap awal yaitu kurun waktu 2024. Pemeliharaan Rutin dan Berkala dilakukan pada tahap I sampai V.

b) Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu

Program pengembangan transportasi publik untuk mendukung perencanaan di Sub-KTA 2 adalah Pembangunan Halte Bus dan Pembangunan Terminal Kota. Selain itu program pengembangan jalan diusulkan untuk mendukung perencanaan di Sub-KTA 2 berupa peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan dan penyediaan prasarana keselamatan jalan di semua ruas jalan nasional dan jalan kabupaten. Program pengembangan aksesibilitas di Sub-KTA Batu Cermin-Wae Kelambu dilaksanakan pada tahap awal yaitu kurun waktu 2024. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Wae Kelambu dan Pemeliharaan Rutin dan Berkala dilakukan pada tahap I sampai V.

c) Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas

Program pengembangan transportasi publik untuk mendukung perencanaan di Sub-KTA 3 yaitu pembangunan halte bus. selain itu juga diusulkan program peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan serta penyediaan prasarana keselamatan jalan di semua ruas jalan nasional dan jalan kabupaten. Program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Gorontalo-Golo Bilas dilaksanakan di akhir tahap satu yaitu pada tahun 2024.

d) Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka

Program pengembangan transportasi publik untuk mendukung perencanaan di Sub-KTA Golo Mori-Warloka yaitu penambahan rute transportasi dan pembangunan halte bus. Selain itu juga diusulkan program pengembangan jalan yaitu peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, dan penyediaan prasarana keselamatan jalan di semua ruas jalan nasional dan jalan kabupaten. Program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Gorontalo-Golo Bilas dilaksanakan di tahap kedua yaitu di mulai pada tahun 2025.

e) Sub-KTA 5 Labuan Bajo Perairan

Program pengembangan transportasi publik untuk mendukung perencanaan di Sub-KTA 5 yaitu Perbaikan dan Penambahan Fasilitas Dermaga. Program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Labuan Bajo Perairan dilaksanakan di akhir tahap satu yaitu pada tahun 2024.

f) Sub-KTA 6 Longos

Program sektor pengembangan transportasi publik untuk mendukung perencanaan di sub-KTA Pulau Longos yaitu penambahan rute transportasi lintas utara, dan perbaikan dan penambahan fasilitas dermaga. selain itu juga diusulkan program sektor jalan untuk mendukung perencanaan di Longos yaitu peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan lintas utara, dan perbaikan dan penambahan fasilitas dermaga. Program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Longos dilaksanakan di tahap kedua yaitu di mulai pada tahun 2025.

g) Sub-KTA 7 Boleng-Goa Rangko

Program sektor transportasi publik untuk mendukung perencanaan di sub-KTA Boleng–Goa Rangko adalah penambahan rute transportasi lintas utara, dan perbaikan dan penambahan fasilitas dermaga. Selain itu diusulkan program sektor jalan untuk mendukung perencanaan di sub-KTA Boleng–Goa Rangko berupa peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan. Program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Boleng–Goa Rangko dilaksanakan di tahap kedua yaitu di mulai pada tahun 2025.

h) Sub-KTA 8 Mbeliling-Cunca Wulang

Program pembangunan jalan untuk mendukung perencanaan di sub-KTA 8 adalah yaitu peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan. Program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Mbeliling–Cunca Wulang dilaksanakan di tahap kedua yaitu di mulai pada tahun 2029.

i) Sub-KTA 9 Sano Nggoang

Program pembangunan jalan untuk mendukung perencanaan di sub-KTA 9 Sano Nggoang yaitu berupa peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan. Program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Sano Nggoang dilaksanakan di tahap kedua yaitu di mulai pada tahun 2029.

j) Sub-KTA 10 Ndoso–Golo Lesu

Program pembangunan jalan untuk mendukung perencanaan di sub-KTA 10 adalah peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan. program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Ndoso–Golo Lesu dilaksanakan di tahap kedua yaitu di mulai pada tahun 2028.

k) Sub-KTA 11 Lembor–Poco Rutang

Program pembangunan jalan untuk mendukung perencanaan di sub-KTA Lembor–Poco Rutang adalah peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalan. Program pengembangan aksesibilitas di sub-KTA Lembor–Poco Rutang dilaksanakan di tahap kedua hingga tahap ketiga dan di mulai pada tahun 2028.

D. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

1. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata KTA 1 Taman Nasional Komodo

KTA 1 membutuhkan infrastruktur yang memberikan kemudahan bagi industri penyedia jasa Pariwisata maupun wisatawan yang beraktivitas. Berikut adalah program infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung KTA 1 Taman Nasional Komodo. Infrastruktur dasar berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum untuk penyediaan air bersih dan pembuatan sarana prasarana desalinasi air laut, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan peningkatan manajemen pengangkutan sampah keluar dari kawasan Taman Nasional Komodo. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di KTA 1 di mulai pada tahun 2024 atau masuk pada tahap satu.

2. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya

a) Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan

Arahan pengembangan infrastruktur terkait Sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan: Infrastruktur terkait air bersih di sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan mengandalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah dibangun, serta distribusi melalui jaringan pipa. Untuk area yang belum terjangkau, diperlukan pengembangan jaringan pipa dengan fokus meningkatkan efisiensi dan pengawasan penggunaan air. Dalam hal penanganan air limbah Pariwisata, digunakan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan penekanan pada pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan aman. Pengelolaan sampah difokuskan pada pengurangan di sumbernya, termasuk pemilahan dan pengangkutan yang terencana. Untuk mengatasi kekurangan infrastruktur drainase, direncanakan pengembangan jaringan yang terhubung untuk mengelola air limbah dan air hujan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Labuan Bajo Perkotaan di mulai pada tahun 2024 atau masuk pada tahap satu.

b) Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu

Arahan Pengembangan Infrastruktur terkait Sub-KTA Batu Cermin-Wae Kelambu: Air bersih diperoleh dari SPAM dan didistribusikan melalui pipanisasi. Pengembangan jaringan pipanisasi untuk area yang belum terjangkau dan pengawasan penggunaan air merupakan fokus. Badan Usaha didorong untuk mengukur, memantau, dan melaporkan penggunaan air dengan transparansi. Risiko air dievaluasi dan tujuan penataan air adalah meminimalkan dampak pada masyarakat dan ekosistem. Air limbah Pariwisata dikelola melalui SPALD-T dengan penekanan pada pengelolaan yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah berpusat pada pengurangan di sumber, pemilahan, dan pengangkutan yang efisien. Diperlukan strategi seperti peningkatan kapasitas sumber sampah, fasilitas pemilahan, prinsip *polluter pays*, dan penegakan aturan. Infrastruktur drainase direncanakan untuk pengelolaan air limbah dan hujan yang lebih efektif. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Batu Cermin-Wae Kelambu di mulai pada tahun 2023 atau masuk pada tahap satu.

c) Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas

Arahan Pengembangan infrastruktur Sub-KTA Gorontalo–Golo Bilas: Infrastruktur air bersih melibatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan distribusi pipanisasi. Perluasan jaringan pipanisasi diperlukan untuk area yang belum terlayani dengan fokus pada efisiensi dan pemantauan.

Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengukur, memonitor, dan melaporkan penggunaan air serta mengelolanya terbuka. Risiko air dievaluasi dan didokumentasikan. Penanganan air limbah mengandalkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan perhatian pada pengelolaan yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah diutamakan untuk mengurangi sumber sampah, dengan pemilahan dan pengangkutan berdasarkan jenis sampah untuk mengurangi beban pengolahan. Strategi meliputi peningkatan kapasitas sumber sampah, fasilitas pemilahan, prinsip penagihan biaya, tarif berdasarkan volume, serta penegakan aturan dengan insentif dan sanksi. Penting untuk dicatat bahwa sub-KTA ini belum memiliki infrastruktur drainase yang memadai, sehingga pengembangan jaringan drainase terintegrasi diperlukan untuk pengelolaan air limbah dan air hujan yang lebih efisien. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Gorontalo-Golo Bilas di mulai pada tahun 2023 atau masuk pada tahap satu.

d) Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka

Arahan Pengembangan infrastruktur Sub-KTA 4 Golo Mori – Warloka: Infrastruktur air melibatkan SPAM untuk air bersih dan jaringan pipanisasi untuk distribusi. Pengembangan pipanisasi diperlukan untuk wilayah yang belum terlayani dengan fokus pada efisiensi dan pemantauan penggunaan air. Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengukur, memonitor, dan melaporkan pemakaian air secara terbuka. Risiko air dievaluasi dan didokumentasikan. Penanganan air limbah menggunakan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan perhatian pada pengelolaan yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah bertujuan mengurangi sumber sampah dengan pemilahan di sumber sampah dan pengangkutan berdasarkan jenis sampah. Strategi meliputi peningkatan kapasitas sumber sampah, fasilitas pemilahan, prinsip penagihan biaya, dan penegakan aturan. Penting untuk dicatat bahwa sub-KTA ini memerlukan pengembangan jaringan drainase yang terhubung untuk mengelola air limbah dan air hujan secara efisien. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Golo Mori-Warloka di mulai pada tahap satu.

e) Sub-KTA 5 Labuan Bajo Perairan

Arahan pengembangan infrastruktur di Sub-KTA Labuan Bajo Perairan: Distribusi air dari pulau utama dengan fokus pada efisiensi dan pemantauan penggunaan. Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengukur, memonitor, melaporkan, dan mengelola pemakaian air. Risiko air dievaluasi dan didokumentasikan, khususnya dalam kasus risiko tinggi. Penanganan

air limbah menggunakan sistem tangki septik dengan panduan tegas untuk penempatan, pemeliharaan, dan pengujian buangan. Destinasi harus memastikan limbah dikelola dengan baik, di daur ulang, atau dibuang dengan aman tanpa dampak negatif. Pengelolaan sampah fokus pada pengurangan sumber sampah, dengan memprioritaskan penggunaan sampah organik sebagai bahan kompos dan sampah anorganik untuk daur ulang. Strategi termasuk peningkatan kapasitas sumber sampah, fasilitas pemilahan sampah, penerapan prinsip *polluter pays*, dan penegakan aturan dengan insentif dan sanksi. Sub-KTA ini memerlukan pengembangan saluran drainase yang berfungsi sebagai saluran akhir air limbah dan hujan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Golo Mori-Warloka di mulai pada tahap kedua.

f) Sub-KTA 6 Longos

Arahan pengembangan infrastruktur di sub-KTA Longos: Sumber air di wilayah ini berasal dari air tanah, yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Fokus pengembangan adalah pada pemantauan dan pencegahan pencemaran dalam proses pengambilan air. Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengukur, memonitor, melaporkan, dan mengelola penggunaan air, khususnya dalam menghadapi risiko air tinggi. Penanganan air limbah Pariwisata mengandalkan sistem tangki septik dengan panduan ketat untuk penempatan, pemeliharaan, dan pengujian buangan. Penting bagi destinasi untuk memastikan bahwa limbah dikelola dengan baik, di daur ulang, atau dibuang dengan aman tanpa dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan setempat. Daerah ini juga menghasilkan jumlah sampah organik yang besar, sehingga pengelolaan sampah sangat menekankan pengurangan sampah di sumber. Strategi mencakup penggunaan sampah organik sebagai bahan kompos dan daur ulang sampah anorganik. Beberapa tindakan yang dapat diambil termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat sumber, fasilitas pemilahan sampah, penerapan prinsip penagih biaya pada pelaku usaha, serta penegakan aturan dengan insentif dan sanksi. Selain itu, sub-KTA ini memerlukan pengembangan sistem drainase yang efektif untuk mengelola air limbah dan hujan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di Sub-KTA Longos di mulai pada tahap kedua.

g) Sub-KTA 7 Boleng-Goa Rangko

Arahan pengembangan infrastruktur sub-KTA Boleng–Goa Rangko: Sumber air di sub-KTA ini berasal dari sungai dan air tanah, umumnya untuk pertanian. Prioritas pengembangan adalah pemantauan pengambilan

air dan pencegahan pencemaran. Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengukur, memonitor, melaporkan, dan mengelola penggunaan air, termasuk mengatasi risiko air tinggi agar tidak mengganggu masyarakat dan ekosistem setempat. Penanganan air limbah Pariwisata menggunakan sistem tangki septik dengan pedoman ketat untuk penempatan, pemeliharaan, dan pengujian buangan. Destinasi juga harus memastikan limbah dikelola dengan baik tanpa dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan setempat. Sub-KTA ini memproduksi jumlah sampah organik terbesar dalam aktivitas sehari-hari di pedesaan. Strategi pengelolaan sampah termasuk memanfaatkan sampah organik untuk kompos dan mendaur ulang sampah anorganik. Beberapa tindakan termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan sampah mandiri, penyediaan fasilitas pemilahan sampah, menerapkan prinsip penagih biaya pada pelaku usaha, dan penegakan aturan dengan insentif dan sanksi. Namun, sub-KTA ini belum memiliki sistem drainase yang memadai untuk mengelola air limbah dan hujan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Boleng–Goa Rangko di mulai pada tahap kedua.

h) Sub-KTA 8 Mbeliling-Cunca Wulang

Arahan pengembangan infrastruktur sub-KTA Mbeliling–Cunca Wulang: Sumber air sub-KTA ini berasal dari sungai dan air tanah, umumnya digunakan untuk pertanian. Pengawasan dan pencegahan pencemaran air menjadi fokus utama pengembangan. Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengelola air secara transparan, mengidentifikasi dan mengatasi risiko air tinggi agar tidak mengganggu masyarakat dan ekosistem setempat. Air limbah Pariwisata ditangani melalui sistem tangki septik dengan panduan ketat. Pemrosesan limbah harus mematuhi standar ketat untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan. Sub-KTA ini berada di pedesaan, yang menghasilkan sampah organik paling banyak. Pengelolaan sampah fokus pada pengurangan sampah di sumber, memanfaatkan sampah organik dan mendaur ulang sampah anorganik. Strategi melibatkan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah mandiri, fasilitas pemilahan sampah, prinsip penagihan biaya pada pelaku usaha, dan penegakan aturan dengan insentif dan sanksi. Namun, belum ada saluran drainase yang memadai untuk mengelola air limbah dan hujan di sub-KTA ini. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Mbeliling–Cunca Wulang di mulai pada tahap kedua.

i) Sub-KTA 9 Sano Nggoang

Arahan pengembangan infrastruktur di sub-KTA Sano Nggoang: Sumber air sub-KTA ini berasal dari sungai dan air tanah yang umumnya dimanfaatkan untuk pertanian. Pemantauan dan pencegahan pencemaran air menjadi fokus utama. Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengelola air dengan transparan, mengidentifikasi risiko air dan memastikan penggunaan air Pariwisata tidak mengganggu masyarakat dan ekosistem lokal. Penanganan air limbah Pariwisata menggunakan sistem tangki septik dengan pedoman yang ketat. Pengelolaan limbah harus mematuhi standar ketat untuk menghindari dampak buruk pada lingkungan. Di wilayah pedesaan ini, terjadi produksi sampah organik yang signifikan. Manajemen sampah berfokus pada pengurangan sumber sampah dengan memanfaatkan sampah organik dan mendaur ulang sampah anorganik. Strategi mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan sampah mandiri, fasilitas pemilahan sampah, prinsip penagihan biaya kepada pelaku usaha, serta penegakan aturan dengan insentif dan sanksi. Namun, sub-KTA ini belum memiliki sistem drainase yang memadai untuk mengelola air limbah dan hujan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Sano Nggoang di mulai pada tahap kedua.

j) Sub-KTA 10 Ndoso-Golo Lesu

Arahan pengembangan infrastruktur di sub-KTA Ndoso–Golo Lesu: Sumber air sub-KTA ini berasal dari sungai dan air tanah yang umumnya dimanfaatkan untuk pertanian. Pemantauan dan pencegahan pencemaran air menjadi fokus utama. Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengelola air dengan transparan, mengidentifikasi risiko air, dan memastikan penggunaan air Pariwisata tidak mengganggu masyarakat dan ekosistem lokal. Penanganan air limbah Pariwisata menggunakan sistem tangki septik dengan pedoman yang ketat. Pengelolaan limbah harus mematuhi standar ketat untuk menghindari dampak buruk pada lingkungan. Di wilayah pedesaan ini, terjadi produksi sampah organik yang signifikan. Manajemen sampah berfokus pada pengurangan sumber sampah dengan memanfaatkan sampah organik dan mendaur ulang sampah anorganik. Strategi mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan sampah mandiri, fasilitas pemilahan sampah, prinsip penagihan biaya kepada pelaku usaha, serta penegakan aturan dengan insentif dan sanksi. Namun, sub-KTA ini belum memiliki sistem drainase yang memadai untuk mengelola air limbah dan hujan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Ndoso–Golo Lesu di mulai pada tahap ketiga.

k) Sub-KTA 11 Lembor-Poco Rutang

Arahan pengembangan infrastruktur di Sub-KTA Lembor–Poco Rutang: Sumber air di sub-KTA ini, dari sungai dan air tanah, umumnya digunakan untuk pertanian. Pemantauan pengambilan air dan upaya pencegahan pencemaran menjadi fokus utama. Destinasi mendorong Badan Usaha untuk mengelola air secara terbuka, mengidentifikasi risiko air, dan memastikan penggunaan air Pariwisata tidak mengganggu kebutuhan masyarakat dan ekosistem lokal. Penanganan air limbah Pariwisata dilakukan melalui sistem tangki septik yang diatur dengan ketat. Pengelolaan limbah harus mematuhi standar yang ketat untuk mencegah dampak buruk pada lingkungan. Di wilayah pedesaan ini, produksi sampah organik adalah yang terbesar. Manajemen sampah mengutamakan pengurangan sumber sampah, dengan memanfaatkan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan mendaur ulang sampah anorganik. Strategi mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan sampah mandiri, fasilitas pemilahan sampah, penerapan prinsip biaya pencemar, dan penegakan aturan dengan menggunakan insentif dan sanksi. Meski begitu, sub-KTA ini belum memiliki sistem drainase yang memadai untuk mengelola air limbah dan hujan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di sub-KTA Lembor–Poco Rutang di mulai pada tahap kedua.

E. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

1. Rencana Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat

Dalam skenario terpilih pembangunan Pariwisata, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kapasitas mereka. Dalam proses ini, teridentifikasi berbagai isu dan permasalahan yang dapat membentuk peluang dan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas. Dari segi pemerintah, isu-isu melibatkan standar pelaksanaan program Pariwisata, kurangnya sinergi dengan SDM lain, serta kurangnya latar belakang pendidikan Pariwisata dalam SDM pemerintah, yang mengakibatkan minat rendah dan tugas yang tidak sesuai. Sementara itu, masyarakat juga menghadapi isu-isu, seperti pengetahuan yang rendah tentang industri Pariwisata dan kurangnya pemahaman mengenai produk dan manajemen Pariwisata. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pengetahuan, tetapi kesadaran mengenai keberadaan Pariwisata masih kurang. Dari isu-isu ini, dibutuhkan rencana kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Pariwisata di wilayah terpilih. Rencana pengembangan kapasitas pemerintah dan keterampilan masyarakat dilaksanakan pada tahap awal yaitu kurun waktu 2024.

Tabel 4. Pengembangan Keterampilan Pemerintah dan Masyarakat

No	Rencana Kegiatan
1.	Pemerintah
	1. melakukan perencanaan dan koordinasi kepariwisataan super prioritas di kawasan taman nasional pulau komodo 2. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata di kawasan taman nasional pulau komodo 3. melakukan penguatan kapasitas SDM balai taman nasional komodo dalam tata kelola dan pemenuhan standar layanan destinasi super prioritas 4. melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai Pariwisata dan sistemnya (destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan) 5. melakukan perencanaan dan koordinasi yang efektif dan terintegrasi antar pemangku kepentingan Pariwisata dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata Labuan Bajo 6. melakukan optimalisasi peran pemangku kepentingan secara *pentahelix* dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo
2.	Masyarakat
	1. melakukan optimalisasi peran kelembagaan kepariwisataan dari unsur masyarakat dalam mendukung destinasi super prioritas 2. melakukan peningkatan partisipasi masyarakat adat/lokal dan dunia usaha lokal sebagai pelaku Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat 3. melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan destinasi bagi pelaku Pariwisata dari masyarakat 4. melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Pariwisata (*community-based tourism*) 5. membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat adat/lokal dan dunia usaha lokal sebagai pelaku Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat 6. membutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan destinasi bagi pelaku Pariwisata dari masyarakat

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Pembangunan Pariwisata dalam skenario terpilih memerlukan identifikasi peluang dan kebutuhan dari dunia usaha dan akademisi. Dari perspektif dunia usaha, mereka menginginkan kesempatan yang setara bagi

semua pihak dalam industri Pariwisata. Namun, terdapat kekurangan dalam jumlah dan kompetensi SDM Pariwisata lokal, yang mengakibatkan rendahnya inovasi dan keterampilan dalam produk Pariwisata, serta menurunkan daya saing industri ini. Pihak akademisi juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, baik dosen maupun guru. SDM di bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat juga memerlukan peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. Rencana pengembangan kapasitas Dunia Usaha dan Akademik dilaksanakan pada tahap awal yaitu kurun waktu 2024.

Tabel 5. Pengembangan Keterampilan Dunia Usaha dan Akademik

No	Rencana Kegiatan
1.	Dunia Usaha
	1. melakukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang destinasi premium. 2. melakukan peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan 3. membutuhkan optimalisasi peran kelembagaan kepariwisataan dari unsur dunia usaha dalam mendukung destinasi super prioritas 4. melakukan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya 5. fasilitas kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri 6. menyediakan data dan menyebarkan informasi Pariwisata 7. membutuhkan sertifikasi CHSE 8. melakukan peningkatan kapasitas pengetahuan tentang konservasi, serta perlindungan dan pelestarian alam 9. melakukan penguatan promosi kegiatan MICE melalui media cetak, elektronik dan media lainnya 10. melakukan peningkatan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor Pariwisata di Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai Barat
2.	Akademik
	1. optimalisasi peran kelembagaan kepariwisataan dari unsur akademisi dalam mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas 2. penambahan Sertifikasi Pendidik Profesional (Serdos) 3. akreditasi nasional perguruan tinggi

No	Rencana Kegiatan
	4. penerapan kurikulum merdeka atau berbasis Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

2. Rencana Pengembangan Keterampilan UMKM

Program pengembangan kapasitas sektor swasta, kewirausahaan, dan keterampilan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu atau organisasi dalam sektor swasta, kewirausahaan, dan keterampilan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, pendidikan, sertifikasi, dan lainnya. Tujuan dari program pengembangan kapasitas ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kompetitif dari individu atau organisasi tersebut.

Tabel 6. Kebutuhan Pengembangan UMKM

No	Rencana Kegiatan
1.	peningkatan kemampuan dalam melakukan riset pasar agar mampu mengembangkan produk/jasa pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen
2.	kemampuan berinovasi agar mampu menghasilkan produk dan layanan premium
3.	kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan dan ketidakpastian melalui penguatan kemampuan dalam: beradaptasi, fleksibilitas, tangguh/daya tahan, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, berpikir strategis, dan kepemimpinan
4.	kemampuan pemanfaatan perkembangan teknologi digital secara efektif dan efisien, melalui peningkatan kemampuan dalam penggunaan teknologi digital, mengelola dan menganalisis data, mengembangkan jejaring dan sinergi, *long life learner*, dan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis
5.	peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang destinasi premium.
6.	peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan
7.	optimalisasi peran kelembagaan kepariwisataan dari unsur dunia usaha dalam mendukung destinasi super prioritas
8.	penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya
9.	fasilitas kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri

No	Rencana Kegiatan
10.	ketersediaan data dan penyebaran informasi pariwisata
11.	sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE)
12.	peningkatan kapasitas Pengetahuan tentang konservasi, serta perlindungan dan pelestarian alam
13.	penguatan promosi kegiatan MICE melalui media cetak, elektronik dan media lainnya
14.	peningkatan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor Pariwisata di Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

3. Rencana Pengembangan Edukasi Formal dan Non-Formal

Program peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan di Labuan Bajo mengadopsi model *pentahelix* yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik pembelajar. Lima kelompok pemangku kepentingan, yakni pemerintah, pelaku usaha/bisnis, akademisi, media, dan komunitas. Dua hal penting yang harus diperhatikan dalam merancang program peningkatan kapasitas adalah karakteristik pembelajaran orang dewasa dan faktor-faktor yang memengaruhi desain program pembelajaran untuk mereka.

Tabel 7. Kebutuhan Pembelajar Formal dan non-Formal

No	Rencana Kegiatan
1.	• optimalisasi kajian dan pengembangan terhadap potensi destinasi wisata baru • sosialisasi penyadaran tentang destinasi premium dan dampaknya • pelatihan terkait kepuasan pelanggan
2.	• peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata yang inklusif dan peningkatan kapasitas tentang fasilitas premium
3.	• penyiapan SDM melalui pemberdayaan komunitas • meningkatkan keahlian tentang kewirausahaan • penyempurnaan kurikulum pembelajaran di institusi pendidikan (SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi)
4.	• penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata • pelatihan dan implementasi CHSE pada masyarakat
5.	• peningkatan pengelolaan destinasi Pariwisata berkelanjutan

No	Rencana Kegiatan
	• peningkatan kapasitas pengelolaan destinasi sektor nonformal dan pembelajar dewasa
6.	• peningkatan pemanfaatan ekonomi destinasi wisata untuk masyarakat lokal • peningkatan kapasitas valuasi ekonomi nonformal dan pembelajar dewasa
7.	• penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan
8.	• integrasi kerja sama dengan sektor-sektor terkait • peningkatan kapasitas sinergi antar pelaku Pariwisata non formal dan pembelajar dewasa
9.	• integrasi Pariwisata dengan Pokdarwis, BUMDES, BUMD dan lembaga usaha lainnya • peningkatan kapasitas sinergi antar pelaku Pariwisata non formal dan pembelajar dewasa
10.	• peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium
11.	• pemanfaatan nilai budaya untuk menopang Pariwisata • peningkatan kapasitas pengelolaan seni budaya dan kearifan lokal
12.	• peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi di sekitar destinasi wisata • pelatihan kewirausahaan
13.	• fasilitasi pemasaran produk lokal di sekitar destinasi wisata • pelatihan peningkatan kemampuan pemasaran
14.	• peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif • pelatihan kewirausahaan bisnis
15.	• peningkatan kualitas sarana / teknologi penopang ekonomi kreatif • sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan sarana/teknologi ekonomi kreatif
16.	• peningkatan kemudahan terhadap akses bantuan permodalan • pelatihan peningkatan kemampuan membuat proposal bisnis
17.	• peningkatan ketersediaan bahan baku produksi • pelatihan pengembangan produksi bahan baku industri kreatif
18.	• pengembangan metode produksi berorientasi bisnis • pelatihan pengembangan produk ekonomi kreatif
19.	• penerapan standar sertifikasi produk ekonomi kreatif • peningkatan pengetahuan tentang standarisasi produk dan jasa

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

F. Pengembangan Kelembagaan dan Regulasi

1. Pengembangan Kelembagaan

Organisasi kepariwisataan memiliki beberapa isu-isu dan masalah, seperti birokrasi kelembagaan yang kompleks, Peran organisasi yang rendah. Pemasaran, destinasi dan industri dari kelembagaan Pariwisata yang belum maksimal. Pada SDM Pariwisata, baik di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha juga memiliki banyak isu dan permasalahan. Kurangnya kapasitas SDM Pariwisata pada semua unsur. Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata, yang juga kurang pada unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Isu-isu dan masalah tersebut membentuk peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas organisasi dan SDM Pariwisata di Kawasan terpilih.

Tabel 8. Pengembangan Kelembagaan

No	Rencana Kegiatan
1	Organisasi Kepariwisataan
	1. penguatan tata kelola organisasi, penguatan manajerial, hingga penguatan sinkronisasi baik internal atau eksternal. 2. melakukan penguatan fungsi organisasi kepariwisataan, peningkatan usaha Pariwisata, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan kelestarian 3. memfasilitasi terbentuknya badan promosi Pariwisata daerah, melakukan penguatan struktur dan fungsi organisasi, dan melakukan penguatan kemitraan 4. pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dan penguatan kemitraan GIPI dan anggotanya dengan unsur-unsur lainnya 5. penguatan struktur dan fungsi dari organisasi destinasi, memfasilitasi proses organisasi dan penguatan kemitraan
2	SDM Pariwisata
	1. melakukan pelatihan, pendidikan, sertifikasi SDM di bidang pemerintahan 2. sertifikasi kompetensi bagi masyarakat seperti pemandu wisata, pemasaran, pengelolaan Pariwisata, kewirausahaan, bantuan modal usaha, hingga pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan Pariwisata lokal. 3. akreditasi pendidikan, kerja sama dengan banyak pihak, bagi pendidikan.

No	Rencana Kegiatan
	4. pelatihan mengenai kualitas layanan, produk wisata, hingga proses membuat usaha Pariwisata.

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

2. Pengembangan Regulasi

Beberapa rekomendasi tindak lanjut kebijakan untuk memperkuat program dan kegiatan pengembangan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. perlunya koordinasi yang terintegrasi dari pusat sampai ke tingkat Kabupaten dalam penetapan kebijakan baru salah satunya terkait penetapan tarif baru di Kawasan Pulau Komodo dan Pulau Padar
b. perlunya sosialisasi yang lebih masif terkait kebijakan kenaikan tarif retribusi Pulau komodo dan pemindahan wisata masal terkait Komodo di Pulau Rinca, Longos dan Golo Mori sebagai alternatif destinasi baru Pariwisata di Provinsi NTT ke seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, Pastor dan tokoh Agama lainnya, serta pelaku Pariwisata
c. perlunya berbagai sub sektor Pariwisata memiliki aturan dan ketentuan yang sama (*same level playing field*) terutama yang berkaitan dengan standar dan perpajakan hotel dan restoran, baik di daratan maupun di perairan
d. perlunya penguatan kelembagaan yang dilakukan berupa keterlibatan secara aktif Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terutama penguatan fungsi konservasi, pemberdayaan masyarakat sekitar Pulau Komodo dan peningkatan kapasitas bagi ASN terkait dan petugas lapangan lainnya

Dengan adanya regulasi tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dapat menjadi acuan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan ITMP di Kabupaten Manggarai Barat dengan melakukan pola koordinasi yang efektif dan terintegrasi.

Tabel 9. Penguatan Regulasi sebagai Dampak Kebijakan Terkait

No	Rencana Kegiatan	Pelaksana
1	fasilitasi pembentukan forum komunikasi bersama dalam mendukung penguatan regulasi	ASN terkait tim kerja atau OPD yang menjadi anggota tim kerja

No	Rencana Kegiatan	Pelaksana
	pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat	pengembangan destinasi untuk mendukung pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat sesuai SK Bupati Manggarai Barat no. 04/KEP/HK/2022
	koordinasi perencanaan program termasuk meninjau masterplan Labuan Bajo	
	koordinasi dan pelaksanaan program ITMP termasuk program penguatan regulasi terkait pengembangan Pariwisata di Labuan Bajo	
	koordinasi, monitoring dan evaluasi program penguatan regulasi sesuai dokumen ITMP	
2	Revisi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015—2025	Pemda Provinsi NTT dan anggota DPRD Provinsi NTT
3	Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025	BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat beserta satuan kerja kelembagaan Pariwisata Labuan Bajo dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
	RIPPARDA direvisi	BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat beserta satuan kerja kelembagaan Pariwisata Labuan Bajo
	konsultasi publik terhadap revisi RIPPARDA	BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat beserta satuan kerja kelembagaan Pariwisata Labuan Bajo, dan unsur masyarakat, akademisi, media
	Revisi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang	Pemda Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT

No	Rencana Kegiatan	Pelaksana
	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 —2030	
4	Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2041	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
	Revisi Peraturan Bupati mengenai penerapan insentif dan disinsentif di Kabupaten Manggarai Barat	
5	revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
6	revisi. regulasi terkait rencana zonasi atau rencana detail tata ruang	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
7	penyusunan regulasi daerah yang mengatur tentang tata kelola destinasi Pariwisata premium	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
	sosialisasi dan implementasi regulasi terbaru mengenai tata kelola destinasi premium	
	Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
8	revisi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah.	Pemda Provinsi NTT dan anggota DPRD Provinsi NTT
9	revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
10	pengembangan regulasi terkait kapal pesiar	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat

No	Rencana Kegiatan	Pelaksana
11	pengukuhan masyarakat adat secara formal	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
12	penyusunan regulasi daerah terkait dengan AMDAL	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD Terkait
	sosialisasi regulasi terbaru terkait AMDAL dan Andalalin	
13	penyusunan regulasi terkait pengaturan keluar masuknya kapal asing ke Labuan Bajo	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD Terkait
14	Penyusunan regulasi daerah terkait keselamatan wisatawan	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD Terkait
15	Penyusunan regulasi daerah terkait mitigasi bencana	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD Terkait
16	regulasi daerah yang mengatur keberadaan *homestay*.	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD Terkait
17	revisi regulasi daerah tentang pengembangan desa adat dan desa wisata	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD Terkait
	penyusunan regulasi terkait dengan pemanfaatan pemandu lokal	Pemda dan OPD terkait dengan HPI
	penyusunan regulasi terkait harga paket wisata, sehingga tercipta standarisasi harga dan pelayanan serta melibatkan masyarakat sekitar	Pemda dan OPD terkait dengan PHRI
	menyusun regulasi terkait dengan *travel on line*	Pemda dan OPD terkait dengan ASITA
18	peraturan daerah tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran tanda daftar usaha Pariwisata	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD terkait
19	revisi Keputusan Bupati Nomor 102/KEP/HK/2019 tentang standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan Revisi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 103/KEP/HK/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan.	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD terkait

No	Rencana Kegiatan	Pelaksana
	revisi regulasi daerah terkait perizinan lainnya di sektor Pariwisata disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya	
	sosialisasi regulasi terbaru tentang kemudahan berinvestasi di sektor Pariwisata	
20	sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan Pariwisata	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD Terkait
21	penyusunan regulasi tingkat daerah untuk pengendalian lingkungan	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD terkait
22	penyusunan regulasi daerah terkait sanitasi di Kawasan Labuan Bajo seperti manajemen penanganan sampah	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD terkait
23	revisi regulasi daerah terkait pembuangan limbah terutama di kawasan perairan Labuan Bajo	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD terkait
24	penyusunan perda yang mengatur mengenai kerja sama dan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan di daerah	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
25	penguatan regulasi daerah tentang monitoring dan evaluasi pengembangan Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan OPD terkait

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

G. Pengembangan Daya Dukung Ekosistem Komodo sebagai Warisan Dunia

Sesuai dengan peruntukan zonasi dalam Taman Nasional Komodo, maka pengembangan secara terbatas hanya dapat dilakukan di Zona Pemanfaatan. Manajemen pengunjung wisatawan di Taman Nasional Komodo dilakukan untuk aktivitas wisata di daratan dan perairan. Manajemen pengunjung ini dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi yaitu zonasi, kapasitas daya dukung, pemecahan kunjungan, dan penerapan tarif berbeda.

1. Zonasi

Zonasi yang terdiri dari zona inti, zona hutan, zona perlindungan maritim, zona pemanfaatan, zona adat masyarakat lokal, zona tradisional

pelagis, zona khusus. Kepentingan Pariwisata telah di akomodasi di zona pemanfaatan yang terdiri dari daratan dan perairan. Zona tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, Pariwisata, dan prasarana dan fasilitas dasar lainnya bagi penduduk setempat. Di perairan Taman Nasional Komodo, pola ruang laut telah terbagi menjadi beberapa zona. Kepentingan Pariwisata bersinggungan dengan perikanan tradisional. Kesepakatan aturan main di setiap zona antar kepentingan bersama perlu diterapkan. Zona perlindungan bahari dapat dimanfaatkan untuk wisata bahari secara terbatas dengan aktivitas mengamati aktivitas, habitat, proses perkembangbiakan biota laut dilindungi. Aturan-aturan ketat untuk aktivitas wisata bahari di Taman Nasional Komodo perlu di atur agar tidak mengurangi kualitas pemanfaatan sumber daya perairan.

2. Penerapan Daya Dukung

Penerapan daya dukung aktivitas wisata bahari di perairan Taman Nasional Komodo telah dirancang oleh WWF Indonesia dan dipublikasikan dengan judul *Better Management Practices* Panduan Daya Dukung Wisata Bahari. Strategi penerapan daya dukung wisata bahari di Taman Nasional Komodo telah melalui proses pelibatan pemangku kepentingan dalam daya dukung wisata bahari, perancangan desain dan pelaksanaan survei, diseminasi dan sosialisasi hasil kajian, uji coba, dan penerapan. Mekanisme penerapan daya dukung di perairan Taman Nasional Komodo dibangun berdasarkan kesepakatan pengelola kawasan dan pemangku kepentingan terkait. Pendaftaran usaha wisata pertama-tama dilakukan untuk mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok dan asosiasi usaha wisata. Selanjutnya, pembagian slot dilakukan untuk masing-masing kelompok dan asosiasi tersebut. Proses pemberian waktu/giliran dilakukan melalui sistem situs pemesanan daring pengelola kawasan. Dalam tahap penerapan dilakukan pengawasan dari pihak pengelola dan dari internal asosiasi serta usaha jasa wisata yang ada. Tahap penerapan didukung dengan adanya pemantauan dan pengawasan terhadap proses yang dirancang sesuai prosedur. Penetapan daya dukung di perairan Taman Nasional Komodo ditetapkan oleh pengelola kawasan secara periodik dengan melalui prosedur yang berlaku.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengidentifikasi dan menetapkan empat isu strategis yaitu (1) ancaman terhadap keanekaragaman hayati; (2) degradasi sumber daya alam dan lingkungan; (3) perubahan iklim; dan (4) tata kelola. Analisis tersebut termasuk penampalan

peta pengembangan Labuan Bajo dengan Situs Warisan Dunia Taman Nasional Komodo.

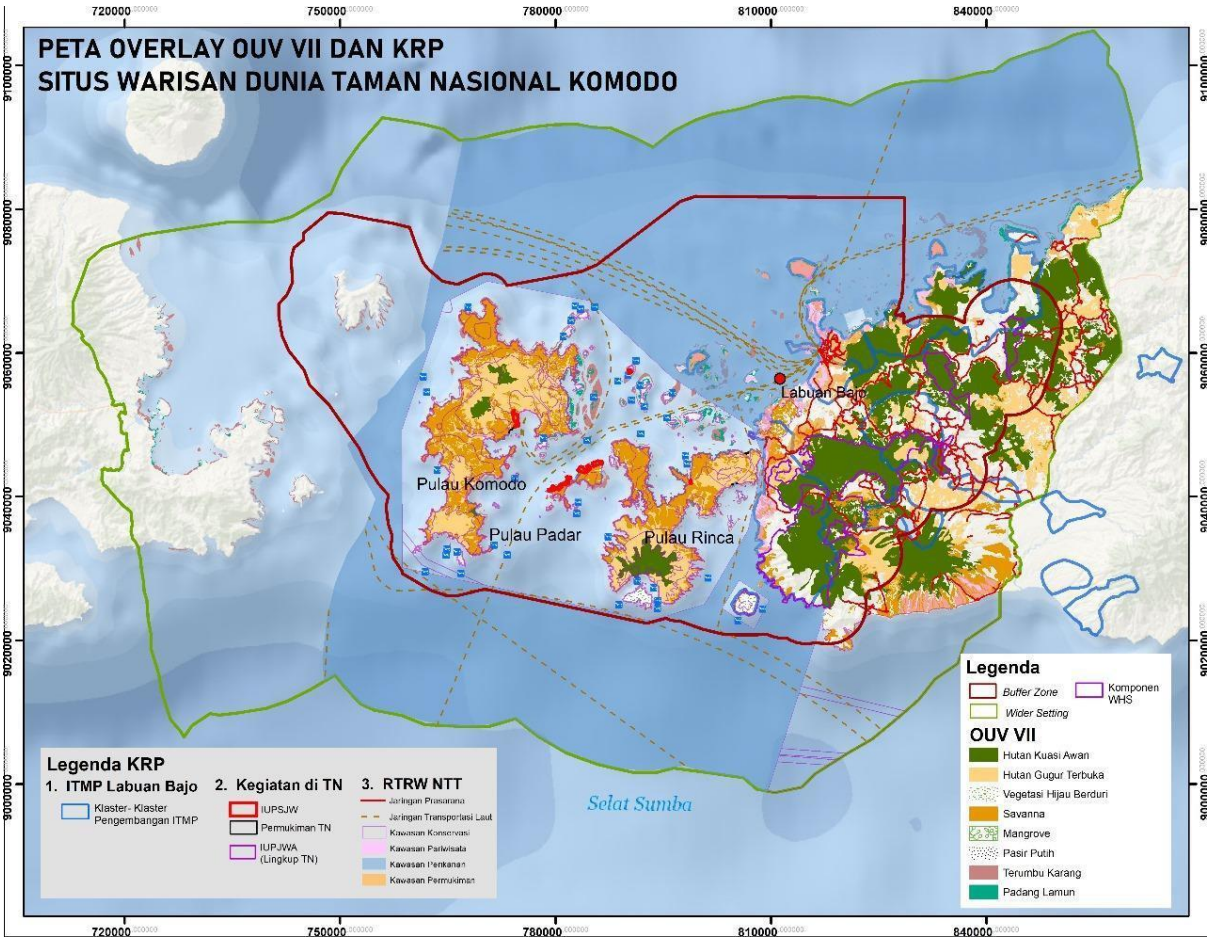

Gambar 18. Peta Penampalan KLHS dengan ITMP
Sumber: KLHS, 2023

Berikut adalah rekomendasi KLHS untuk menjawab isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam dan sekitar Situs Warisan Dunia Taman Nasional Komodo. Rekomendasi terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati mencakup arahan untuk menurunkan dan mengatasi ancaman, terutama terhadap OUV kriteria X. Ini melibatkan perlindungan menyeluruh, termasuk pemantauan ketat terhadap pemanfaatan ruang yang dapat mengancam keberlanjutan OUV kriteria VII yaitu bentang keindahan alam atau saujana dan OUV kriteria X yaitu Komodo sebagai spesies langka yang terancam punah. Selain itu, rekomendasi mencakup pemeliharaan dan peningkatan status kawasan situs warisan dunia sebagai kawasan konservasi. Langkah-langkah konkret termasuk menindaklanjuti proyeksi peningkatan jumlah Komodo dengan pertimbangan terhadap penurunan area yang disukai, menambah area yang disukai melalui pembuatan *water point*, dan mendorong terbentuknya sarang burung gosong. Selain itu, direkomendasikan penanaman tanaman endemik untuk memperluas tutupan hijau, dengan rencana penanaman seluas 15

hektare per tahun atau 45 Ha per tiga tahun, sebagai upaya minimalisasi peningkatan suhu lokal yang diharapkan tidak melebihi 0,8 derajat hingga tahun 2045.

Rekomendasi untuk mengatasi degradasi sumber daya alam dan lingkungan di Taman Nasional Komodo melibatkan pemulihan kawasan warisan dunia akibat kunjungan wisata, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ketat, peninjauan kembali program pengembangan masterplan, pengawasan pembangunan kawasan wisata, transplantasi terumbu karang tahunan, dan upaya pemulihan kawasan yang tercemar serta OUV yang terdegradasi.

Rekomendasi mitigasi dan adaptasi terhadap risiko perubahan iklim melibatkan penyusunan rencana tindakan untuk melindungi keberlanjutan OUV kriteria VII dan X. Ini mencakup pencapaian kualitas udara dan suhu udara yang baik di Taman Nasional Komodo dan Kabupaten Manggarai Barat. Langkah konkret termasuk pematuhan standar lingkungan, pengelolaan Pelabuhan sesuai dengan kriteria *ecoport International Marine Organization* (IMO), serta pengelolaan pertumbuhan kapal dengan sistem koperasi bagi pemilik kapal wisata. Kontrol terhadap mesin kapal, penanganan buangan limbah, dan pengurangan emisi transportasi juga menjadi fokus dalam menghadapi perubahan iklim.

Rekomendasi untuk pengelolaan keamanan, peningkatan manajemen, dan pengembangan potensi lokal di Taman Nasional Komodo mencakup peningkatan pengamanan TNK terutama terhadap perburuan ilegal Komodo, penggabungan Pulau Rinca dan Gili Motang sebagai satu wilayah Taman Nasional Komodo, serta penyuluhan dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah untuk nilai ekonomi. Implementasi sistem pengelolaan satu pintu, kemudahan pemesanan wisata secara daring, peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola produk unggulan daerah, kerja sama dengan mitra untuk pengelolaan sampah, dan pemeliharaan aturan adat tentang tata cara berkeluarga juga menjadi fokus untuk menjaga keberlanjutan Taman Nasional Komodo hingga tahun 2045.

4. Pembatasan Pengunjung

Strategi membatasi jumlah atau kepadatan pengunjung di setiap daya tarik utama Taman Nasional Komodo dapat dilakukan apabila mekanisme penerapan daya dukung (kuota) diterapkan. Secara teknis, pembatasan Pengunjung dapat dilakukan saat pihak agen perjalanan melakukan registrasi. Bila didapati daya tarik pertama melebihi kapasitas maka secara otomatis menunggu giliran untuk masuk atau melakukan modifikasi rute dengan mengunjungi daya tarik lainnya sebelum menuju ke daya tarik

sebelumnya. Tantangan terbesar dalam penerapan ini adalah variabel pengaruh eksternal yang sulit diprediksi seperti cuaca dan kondisi perairan. Di daratan Taman Nasional Komodo, pembatasan pengunjung dapat dilakukan cara mengatur waktu kunjungan antar rombongan. Perlu adanya mekanisme pengaturan alur perjalanan rombongan yang dipantau dengan teknologi informasi dan komunikasi.

5. Pemberlakuan Harga Berbeda

Pemberlakuan harga berbeda umum dilakukan sebagai salah satu strategi mengatur kunjungan wisatawan ke suatu destinasi Pariwisata. Jika dirancang dan diterapkan dengan baik, pemberlakuan harga berbeda dapat membantu mengatur dan mengelola arus pengunjung. Metode harga berbeda di beberapa titik daya tarik wisata secara otomatis meringkas tipe wisatawan yang masuk. Harga yang lebih tinggi tentunya harus memberikan pengalaman dan fasilitas yang lebih bagi wisatawan. Tiket yang lebih tinggi di Pulau Komodo dan Pulau Padar dengan sendirinya akan mendorong wisatawan untuk beralih ke daya tarik wisata sekitar Taman Nasional Komodo tanpa mengurangi tujuan utama yaitu melihat Komodo.

6. Penerapan Pariwisata Bertanggungjawab

Praktik berwisata yang bertanggung jawab diterapkan tidak hanya bagi wisatawan namun juga operator perjalanan. Operator wisata bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan memberikan informasi kepada wisatawan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan. Aktivitas yang bersinggungan dengan ekosistem rapuh dan biota dilindungi perlu memperhatikan kaidah yang ramah lingkungan. Kaidah seperti menjaga jarak, mematikan mesin kapal, tidak membuang jangkar di terumbu karang merupakan beberapa kaidah yang dapat diterapkan.

H. Pelestarian Aset Alam dan Pengelolaan Sosial Budaya

Pelestarian aset alam dan pengelolaan sosial budaya di DPN Labuan Bajo sebagai berikut:

1. KTA 1 Taman Nasional Komodo

Pengaruh kepariwisataan di Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo terhadap lingkungan melibatkan komponen seperti air, bentuk lahan, sampah, udara, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, dan perilaku satwa. Pembangunan Pariwisata akan secara nyata memengaruhi ekosistem termasuk elemen abiotik (tatanan fisik seperti morfologi, hidrologi, klimatologi), biotik (vegetasi, keanekaragaman hayati), dan sosio-kultural (tradisi, nilai, ritual), terutama di KTA 1 Taman Nasional Komodo. Perlu

mendapatkan perhatian serius karena KTA 1 adalah bagian dari Taman Nasional dan juga diakui sebagai warisan dunia dengan *Ultimate Outstanding Universal* (OUV). Kegiatan yang mungkin berdampak besar adalah yang berhubungan dengan peningkatan aksesibilitas di Taman Nasional Komodo, yang mencakup infrastruktur helipad, dermaga, dan pelabuhan kapal pesiar. Dampak lingkungan dari infrastruktur tersebut mencakup perubahan bentuk lahan, perubahan fungsi lahan, penurunan kualitas udara, pencemaran air, kerusakan habitat Komodo, dan penurunan keanekaragaman hayati.

Dalam Manggarai Barat, perlu difokuskan mitigasi dampak lingkungan terutama terhadap bio diversitas, terutama untuk melindungi Komodo sebagai satwa endemis yang dilindungi di KTA 1. Konservasi Komodo membutuhkan upaya yang sistemis dan komprehensif termasuk preservasi dan restorasi habitat. Pada tingkat kawasan, rencana mitigasi harus mempertahankan OUV yang diakui oleh UNESCO sebagai dasar Warisan Dunia. Aspek OUV yang perlu diperhatikan termasuk kriteria vii (menunjukkan keindahan alam yang luar biasa) dan kriteria x (menunjukkan bahwa komodo adalah spesies yang langka dan terancam punah). Upaya mitigasi berbasis OUV bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dan integritas kawasan dari dampak Pariwisata. Dua fokus utama adalah keindahan alam dan estetika, termasuk pemandangan dan bentang lahan alam serta budaya. Perlindungan OUV dilakukan dengan membatasi jumlah kunjungan dan menerapkan sistem zonasi. Termasuk diperlukannya arahan kebijakan dan rencana pengaturan serta mitigasi dampak terhadap saujana/bentang pandang dan lanskap yang dipengaruhi struktur bangunan dan gedung yang diatur dalam peraturan daerah. Peraturan daerah ini mengatur (i) pengaturan struktur bangunan dan gedung, fasad dan ketinggian bangunan maksimal, dan sempadan bangunan (ii) peningkatan pengawasan rutin terhadap kualitas bentang pandang, kualitas lingkungan aspek OUV kriteria VII dan aspek OUV kriteria X, (iii) pelaksanaan kegiatan pelindungan yang aman bagi UNESCO *World Heritage Site* (WHS) dan manusia, serta ramah lingkungan, termasuk mengurangi dampak polusi dan perubahan iklim, (iv) pengendalian alih fungsi pemanfaatan lahan yang dapat menurunkan kualitas lanskap/bentang pandang, dan (v) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian UNESCO WHS. Selain itu, mitigasi dampak kumulatif juga diperlukan dalam hubungan antara masyarakat dan ekosistem. Hubungan ini membentuk saujana budaya yang menjadi penghidupan masyarakat lokal, khususnya komunitas adat Ata Modo. Preservasi budaya dan tradisi masyarakat dapat menjadi bagian dari

mitigasi berbasis masyarakat di mana masyarakat terlibat dalam upaya perlindungan dan konservasi.

Kehadiran wisatawan bisa memengaruhi perilaku satwa di Manggarai Barat, terutama ketika wisatawan memberi makan atau saat pembangunan menyebabkan interaksi yang lebih tinggi antara satwa dan manusia. Kerusakan habitat dapat mengancam satwa buruan dan mendorong komodo lapar untuk mencari makanan di pemukiman dan menyerang hewan ternak. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur di KTA 1 harus difokuskan pada zona pemanfaatan. Upaya mitigasi dampak mencakup sistem zonasi, pembatasan kunjungan, penguatan komunitas dan partisipasi masyarakat.

2. KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya

KTA 2 terdiri atas lima sub-KTA dengan desain dan arah pengembangan yang disesuaikan dengan tema spesifik. Di KTA 2 terdapat beberapa rencana kegiatan yang bersifat baik konstruksi maupun non-konstruksi. Masing-masing sub-KTA memiliki proyek pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang berbeda-beda. Termasuk diperlukannya arahan kebijakan dan rencana pengaturan serta mitigasi dampak terhadap saujana/bentang pandang dan lanskap yang dipengaruhi struktur bangunan dan gedung yang diatur dalam peraturan daerah dengan detil pengaturan sebagaimana pada KTA Taman Nasional Komodo. Berdasarkan usulan arah pengembangan dan program infrastruktur, maka dapat disusun upaya mitigasi dalam rangka meminimalkan dampak negatif di setiap sub-KTA.

Tabel 10. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Kota Labuan Bajo	tidak diperlukan adanya upaya mitigasi khusus
pembangunan halte bus	Tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan parkir *off-street*	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
	lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pemindahan lokasi dermaga ASDP	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat. Sebagai tambahan untuk konstruksi di laut perlu implementasi perlengkapan keamanan untuk pekerjaan air.
perbaikan fasilitas dermaga wisata Kampung Ujung dan Dermaga Biru	Tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat. Sebagai tambahan untuk konstruksi di laut perlu implementasi perlengkapan keamanan untuk pekerjaan air.
pembangunan jalan Lingkar Wae Cicu	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan Trotoar Kampung Ujung-Binongko-Simpang Sylvia	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan TPI-Binongko	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jaringan drainase Desa Batu Cermin	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
	lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
perluasan pembangunan jaringan drainase Kelurahan Wae Kelambu	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pemeliharaan jaringan listrik seluruh Kabupaten Manggarai barat	tidak memerlukan langkah mitigasi secara khusus
pemeliharaan jaringan telekomunikasi seluruh Kabupaten Manggarai Barat	tidak memerlukan langkah mitigasi secara khusus
pembangunan pedestrian pantai Wae Cicu	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 11. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pembangunan halte bus	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan terminal kota Labuan Bajo	secara khusus, pembangunan terminal memiliki skala kegiatan yang besar sehingga perlu patuh pada panduan *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) World Bank dan dianalisis sesuai dengan skala kegiatan dan

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
	dampak lingkungan yang ditimbulkan. Tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan lingkar Wae Kelambu	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan trotoar jalan Wae Mata (sisi kiri)	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan Lingkar Luas Wae Kelambu-Trans Flores	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jaringan Drainase Kampung Ujung-Simpang Sylvia	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
perluasan pembangunan jaringan drainase permukiman Kelurahan Labuan Bajo	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
penataan kawasan menuju Goa Batu Cermin	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
	lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan Pusat Budaya Bajo dan Pusat Cendera Mata	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 12. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pembangunan halte bus	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan Wae Nahi-Nggorang	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan ruas simpang Marombok-Lobohusu-Nanganae	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jaringan drainase perluasan	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pembangunan jaringan drainase permukiman	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
perluasan jaringan SPAM Wae Mese II menuju Desa Golo Bilas	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Golo Bilas	mitigasi dampak selama proses konstruksi dan penggunaan mengacu kepada ESMF dan analisis dampak lingkungan dilakukan secara ketat. Untuk Kesehatan dan keselamatan kerja tahap konstruksi, dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat. Selama pemanfaatan
penataan Kawasan Puncak Pramuka	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan *Pede Seafood Paradise*	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan *Bajo Marine Park*	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pengembangan Museum Komodo	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
penataan dan pengembangan Kawasan Bukit Budaya Bajo	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 13. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pembangunan halte bus	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan Golo Mori-Ceremba-Naga-Nangalili-Repi Peratasan	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan SPAM Golo Mori	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan kawasan Tana Mori	pengembangan kawasan membutuhkan analisa dan instrumen lingkungan yang berbeda. Diperlukan instrumen skala kawasan seperti KLHS dan/atau AMDAL Kawasan.

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pengembangan *shelter*	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan gardu pandang	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan jalur *trekking* dan sarana prasarana	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 14. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 5 Labuan Bajo Perairan

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
perbaikan dermaga	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat. Sebagai tambahan untuk konstruksi di laut perlu implementasi perlengkapan keamanan untuk pekerjaan air.
pemeriksaan, perawatan, dan penggantian alat	tidak ada langkah mitigasi khusus
penyusunan studi kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Instalasi Pengolahan Air Limbah	tidak ada langkah mitigasi khusus

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
(IPAL) komunal dan jaringan pipa *sewer*	
penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) IPAL komunal	tidak ada langkah mitigasi khusus
konstruksi IPAL komunal	mitigasi dampak selama proses konstruksi dan penggunaan mengacu kepada ESMF dan analisis dampak lingkungan dilakukan secara ketat. Untuk Kesehatan dan keselamatan kerja Tahap konstruksi, dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat selama pemanfaatan
konstruksi jaringan pipa *sewer*	mitigasi dampak selama proses konstruksi dan penggunaan mengacu kepada ESMF dan analisis dampak lingkungan dilakukan secara ketat. Untuk Kesehatan dan keselamatan kerja Tahap konstruksi, dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat. Selama pemanfaatan

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 15. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 6 Longos

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pengaspalan jalan urugan pilihan (urpil) Lintas Utara	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
penuntasan jalan tanah hingga aspal Lintas Utara	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
	lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
jembatan Wae Bungbek	langkah mitigasi secara khusus dilakukan untuk kualitas dan kuantitas air sungai. Keselamatan kerja juga perlu ditingkatkan selain dengan penerapan standar K3 secara ketat juga perlu memperhatikan risiko pekerjaan di air dan bencana seperti banjir bandang
jembatan Wae Kuse	langkah mitigasi secara khusus dilakukan untuk kualitas dan kuantitas air sungai. Keselamatan kerja juga perlu ditingkatkan selain dengan penerapan standar K3 secara ketat juga perlu memperhatikan risiko pekerjaan di air dan bencana seperti banjir bandang
jembatan Wae Nangapau	langkah mitigasi secara khusus dilakukan untuk kualitas dan kuantitas air sungai. Keselamatan kerja juga perlu ditingkatkan selain dengan penerapan standar K3 secara ketat juga perlu memperhatikan risiko pekerjaan di air dan bencana seperti banjir bandang
penataan lingkungan permukiman	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan ruang publik	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
penataan kawasan tepi pantai	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
penataan kawasan Hutan Bakau	tidak ada mitigasi khusus yang perlu dilakukan

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 16. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 7: Boleng – Goa Rangko

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
perbaikan fasilitas dermaga Kampung Rangko	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat. Sebagai tambahan untuk konstruksi di laut perlu implementasi perlengkapan keamanan untuk pekerjaan air.
penataan jalur pengunjung Goa Rangko	langkah mitigasi secara khusus dilakukan untuk kualitas dan kuantitas air sungai. Keselamatan kerja juga perlu ditingkatkan selain dengan penerapan standar K3 secara ketat juga perlu memperhatikan risiko pekerjaan di air dan bencana seperti banjir bandang
pengembangan kapal wisata	langkah mitigasi secara khusus dilakukan untuk kualitas dan kuantitas air sungai. Keselamatan kerja juga perlu ditingkatkan selain dengan penerapan standar K3 secara ketat juga perlu memperhatikan risiko pekerjaan di air dan bencana seperti banjir bandang
penataan area berkemah	tidak ada mitigasi khusus yang dipersiapkan
pengembangan jalur manca-krida	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
penataan area api unggun	tidak ada langkah mitigasi secara khusus

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 17. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 8: Mbeliling – Cunca Wulang

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
preservasi jalan Labuan Bajo-Malwatar-BTS Kota Ruteng	tidak ada Langkah mitigasi dampak negatif secara khusus
penataan kawasan Tebing Alami	tidak ada langkah mitigasi secara khusus
pengembangan amfiteater	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan parkir	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
penataan jalur *trekking* menuju Cunca Wulang	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
revitalisasi jembatan gantung Cunca Wulang	tidak ada langkah mitigasi khusus
revitalisasi toilet, gazebo dan pos petugas	tidak ada langkah mitigasi khusus
pengembangan pusat komunitas	tidak ada langkah mitigasi khusus
peningkatan dan pengembangan kualitas *homestay*	tidak ada langkah mitigasi khusus
pengembangan infrastruktur permukiman	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
revitalisasi kawasan Cunca Perlamping	tidak ada langkah mitigasi khusus
penataan jalur *trekking* menuju Cunca Perlamping	tidak ada langkah mitigasi khusus
revitalisasi kawasan Cunca Rami	tidak ada langkah mitigasi khusus
penataan jalur *trekking* menuju Cunca Rami	tidak ada langkah mitigasi khusus
pengembangan toilet, gazebo dan pos petugas	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan jalur *trekking*	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan pusat pengunjung	tidak ada langkah mitigasi khusus

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 18. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 9: Sano Nggoang

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pembangunan Jalan Werang-Simpang Nunang	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan Lingkar Danau Sano Nggoang	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
	lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
perluasan jaringan SPAM Golo Mbu	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan pusat komunitas	tidak ada langkah mitigasi khusus
peningkatan dan pengembangan kualitas *homestay*	tidak ada langkah mitigasi khusus
pengembangan infrastruktur permukiman	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan jalur *trekking*	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
Pengembangan *broadwalk*	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan *signage* kawasan	tidak ada langkah mitigasi khusus

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 19. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 10: Ndoso – Golo Lesu

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pembangunan jembatan Wae Ncuring	langkah mitigasi secara khusus dilakukan untuk kualitas dan kuantitas air sungai. Keselamatan kerja juga perlu ditingkatkan selain dengan penerapan standar K3 secara ketat juga perlu memperhatikan risiko pekerjaan di air dan bencana seperti banjir bandang
pembangunan jalan simpang Pau-Romang-Helung	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan Mbatak-Helung	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
penataan kawasan petilasan	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan *signage*	tidak ada langkah mitigasi khusus
pengembangan aksesibilitas dan jalan setapak	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan fasilitas *camping ground*	tidak ada mitigasi khusus yang dipersiapkan
pengembangan parkir	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pengembangan fasilitas dasar	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

Tabel 20. Mitigasi Aspek Lingkungan Sub-KTA 11: Lembor – Poco Rutang

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pembangunan jalan simpang Pau-Romang-Helung	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pembangunan jalan Mbatak-Helung	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
pengembangan jalur *trekking*	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.
perlindungan dan pemberdayaan petani Sawah Lingko	tidak ada mitigasi khusus yang dipersiapkan
pengembangan pusat komunitas	tidak ada mitigasi khusus yang dipersiapkan
peningkatan dan pengembangan kualitas *homestay*	tidak ada mitigasi khusus yang dipersiapkan

Kegiatan	Langkah Mitigasi dan Instrumen Analisis Lingkungan
pengembangan infrastruktur permukiman	tahap konstruksi dampak negatif dan risiko kecelakaan kerja dimitigasi melalui penerapan SOP K3 yang ketat dan pengawasan terhadap perlengkapan keamanan. Dampak lingkungan dilakukan dengan evaluasi apakah kegiatan membutuhkan instrumen lingkungan yang tepat.

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

I. Pengembangan Investasi Pariwisata

Rencana pengembangan investasi Pariwisata yang terdiri dari rencana pengembangan infrastruktur, pelayanan jasa, dan fasilitas Pariwisata prioritas, yaitu:

1. Pembangunan Jalan Lingkar Wae Kelambu

Terminal *multipurpose* Wae Kelambu tentunya memerlukan dukungan aksesibilitas yang cukup. Prasarana akses yang tersedia saat ini adalah jalan dengan status Jalan Kabupaten dengan kondisi topografi yang berbukit dan berkelok, di mana kondisi ini menyebabkan sering terjadi kecelakaan kendaraan muatan barang logistik. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas jalan berupa pelebaran ruas jalan lingkar Wae Kelambu. Pelebaran ruas jalan lingkar Wae Kelambu untuk mendukung aksesibilitas menuju terminal *multipurpose*. Pelebaran jalan akan ditambah dari 4,5-5-meter menjadi 7,5-meter dan panjang jalan yang akan dibangun 7,698 km. Penanggung jawab dari program pelebaran ruas jalan lingkar Wae Kelambu adalah Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Nusa Tenggara Timur. Program peningkatan, pelebaran ruas jalan lingkar Wae Kelambu dilakukan pada fase 1 (2024). Urgensi dari pembangunan jalan lingkar Wae Kelambu pada fase 1 terkait dengan aksesibilitas muatan barang/logistik di terminal *multipurpose*. Fase-fase yang dilakukan dalam program peningkatan, pelebaran ruas jalan lingkar Wae Kelambu adalah penyusunan DED, dokumen sosial, dokumen lingkungan serta konstruksi. Waktu pengerjaan konstruksi selama 2 tahun.

2. Pembangunan Ruas Jalan Lintas Utara Flores

Jalan lintas utara sebagai jalur pengembangan dalam mendukung kepariwisataan di daratan Kabupaten Manggarai Barat. Aksesibilitas lintas utara menjadi ruas penting untuk dikembangkan pada tahap 1 (2023-2028). Jalan lintas utara menghubungkan daratan Labuan Bajo – Boleng – Terang -

Bari - Kedindi dengan panjang ruas jalan 141,291 km. Pembangunan Jalan Lintas Utara sudah dalam tahap konstruksi pada beberapa ruas oleh PJN Wilayah III Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020. Program penuntasan jalan urpil, jalan tanah, dan pembangunan jembatan Jalan lintas utara Flores dilakukan pada tahap 1 (2024-2028). Urgensi dari pembangunan jalan lintas utara sebagai akses langsung ke Pelabuhan Kedindi Kecamatan Reok sebagai pelabuhan BBM untuk daratan Flores bagian barat dan perkembangan Pariwisata di daratan Manggarai Barat mendukung perkembangan sektor industri. Fase-fase yang dilakukan dalam program penuntasan jalan lintas utara adalah pada tahap konstruksi untuk jalan dan pembangunan drainase, penyusunan DED jembatan dan konstruksi. Waktu pengerjaan konstruksi selama 5 tahun.

3. Pembangunan Terminal Terpadu Kampung Ujung

Kawasan Pariwisata Kampung Ujung di Labuan Bajo adalah pusat perdagangan dan jasa, serta titik awal perjalanan wisatawan ke KTA 1 Taman Nasional Komodo. Karena lokasinya yang strategis, fasilitas transportasi penting untuk menghubungkan Bandara, pelabuhan, dan daratan Flores menuju destinasi wisata di KTA 1 dan Manggarai Barat. Perlu adanya pembangunan terminal terpadu kampung ujung sebagai pusat moda transportasi wisatawan menuju destinasi wisata. Kawasan yang diusulkan sebagai area pembangunan terminal terpadu Kampung Ujung dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan perkiraan luasan area 1129,35 m2. penanggung jawab dari program pembangunan terminal terpadu kampung ujung adalah Kementerian PUPR. Program pembangunan Terminal Terpadu Kampung Ujung dilakukan pada tahap 1 (2024-2025). Urgensi dari pembangunan terminal terpadu kampung ujung sebagai fasilitas moda transportasi yang dapat menghubungkan wisatawan menuju destinasi wisata. Tahap pekerjaan yang dilakukan dalam program terminal terpadu kampung ujung adalah pembuatan DED, penyiapan lahan, dan konstruksi. Waktu pengerjaan program ini selama 2 tahun.

4. Penataan Parkir

Labuan Bajo saat ini kekurangan tempat parkir. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyediakan fasilitas parkir di jalan Sukarno Hatta depan Hotel Meruorah, tetapi kapasitasnya hanya mencukupi untuk beberapa kendaraan MPV dan sepeda motor. Saat ini, banyak kendaraan parkir di sepanjang jalan, yang menyebabkan gangguan lalu lintas. Kawasan *Waterfront* di Marina Labuan Bajo juga memiliki area parkir dengan kapasitas terbatas yang ditujukan untuk aktivitas pelabuhan. Kebutuhan ruang parkir

untuk wisatawan dan masyarakat di sekitar wisata kuliner dan sepanjang pantai marina Labuan Bajo sangat diperlukan. Lahan milik ASDP belakang Hotel Meruorah yang saat ini dipakai untuk menampung parkir dari kedatangan dan keberangkatan kapal pada dermaga milik ASDP, dapat segera dibenahi agar dapat menampung kendaraan wisatawan. Areal parkir milik ASDP ini memiliki lahan 6.400 m^2 yang dapat menampung 10 buah Bus, 120 MPV dan 260 kendaraan roda dua. Program Pembangunan Fasilitas Parkir di lahan milik ASDP dilakukan pada tahap 1 (2024), Urgensi dari pembangunan fasilitas parkir ini adalah menampung parkir wisatawan yang akan ke Labuan Bajo baik naik bus, kendaraan MPV maupun roda dua. Fase yang dilakukan pada pembangunan fasilitas parkir adalah selain tersedia lahan parkir dengan dilengkapi Gardu parkir yang dilengkapi dengan sistem elektronik yang dinamakan dengan parkir elektronik (*e-parking*). Waktu pelaksanaan selama 1 tahun, dan dapat dimulai tahun 2024.

5. Pembangunan Dermaga Kapal Pesiar

Saat ini, kapal pesiar masih terdampar di lepas pantai di luar Kawasan Taman Nasional Komodo. Untuk mengakses Pulau Komodo, wisatawan harus menggunakan kapal kecil. Hal ini disebabkan karena belum ada peraturan yang mengamanatkan kapal pesiar untuk bersandar di Dermaga Pelabuhan Labuan Bajo. Diperlukan regulasi tingkat Menteri yang meminta agar Kapal Pesiar harus bersandar di Dermaga Pelabuhan Marina Labuan Bajo atau Pelabuhan Wae Kelambu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek berganda dalam industri Pariwisata Labuan Bajo. Dengan relokasi dermaga kapal logistik dan RORO ke Terminal Wae Kelambu di Labuan Bajo, Pelabuhan *Waterfront* Labuan Bajo akan berperan sebagai Dermaga Marina Labuan Bajo yang ditujukan bagi penumpang dan wisatawan. Dermaga marina saat ini memiliki panjang 490 m dan kedalaman kolam pelabuhan mencapai 12 m saat air pasang, memungkinkan kapal dengan *draught* hingga 7 m untuk bersandar. Namun, untuk mengakomodasi kapal pesiar dengan *draught* 8,5 m, perlu meningkatkan kapasitas dermaga Marina Labuan Bajo dengan mendalamkan kolam pelabuhan dan jalur kapal pesiar. Sementara itu, dermaga pelabuhan *multipurpose* Wae Kelambu memiliki panjang 240 m dan melayani kapal RORO dengan LOA 142 m, *draught* 15 m, dan *Gross* Ton mencapai 15.854-ton sesuai dengan spesifikasi kapal terbesar yang diharapkan untuk melayani terminal *multipurpose*. Program Pembangunan Dermaga Kapal Pesiar dilakukan pada tahap 1 (2024-2025), urgensi dari pembangunan ini adalah agar kapal pesiar dapat singgah dan berlabuh di Labuan Bajo dengan bersandar di dermaga Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu, maka panjang dermaga harus diperpanjang sepanjang 240 m lagi,

yang dilengkapi dengan fasilitas untuk penumpang kapal pesiar dengan standar internasional. Waktu pelaksanaan selama 2 tahun, dan dapat dimulai tahun 2024.

6. Pelabuhan Curah Cair

Kebutuhan rata-rata avtur untuk memenuhi kebutuhan penerbangan di Bandara Komodo sebesar 20 KL per hari. Selain kebutuhan avtur, kebutuhan bahan bakar curah cair di kawasan Labuan Bajo yang berpotensi untuk masuk di Terminal *Multipurpose* merupakan bahan bakar minyak dengan jenis pertamax, premium, biosolar dengan kebutuhan per hari sebesar 120kL/hari dan diesel (gasoil) sebesar 32 kL/hari. Oleh karena itu diperlukan pembangunan terminal bahan bakar minyak di kompleks Terminal Terpadu Wae Kelambu dipercepat pelaksanaannya pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahun 2023), agar kelangkaan BBM di kota Labuan Bajo segera teratasi. Ada 6 Tangki penyimpanan BBM yang masing-masing 250 Kl, sehingga total yang dapat disimpan sebanyak 1500 KL. dengan luas lahan kurang lebih mencapai 6000 m2. Adapun varian produk yang disalurkan yakni avtur, gasoil (biosolar/dexlite/dex) dan *gasoline* (premium/pertalite/pertamax) dengan area distribusi Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai. Sedangkan untuk proyeksi volume penyaluran diperkirakan mencapai 29.000 – 43.000 kl per tahun. Program pembangunan penyediaan Terminal Bahan Bakar Minyak di kompleks Terminal Terpadu Wae Kelambu dilakukan pada fase 1 (2023). Urgensi dari pembangunan ini adalah agar pasokan Bahan Bakar Minyak ke Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai barat, baik avtur, gasoil (biosolar/dexlite/dex) dan gasoline (premium/pertalite/pertamax) lancar. Waktu pelaksanaan selama 1 tahun, dan dapat dimulai tahun 2023.

7. Pengembangan Pantai *Pede Seafood Paradise*

Potensi wisata kuliner dari hasil tangkapan ikan nelayan di Kawasan Pantai Pede cukup besar, tetapi pemanfaatannya sebagai destinasi wisata kuliner belum optimal. Oleh karena itu, diajukan pengembangan Kawasan Pantai Pede menjadi pusat kuliner boga bahari, dengan langkah-langkah penataan kawasan pantai dan perbaikan jaringan jalan yang menghubungkannya dengan kawasan sekitarnya. Penataan kawasan pantai mencakup pengaturan zonasi dan jarak bangunan terhadap garis pantai, perencanaan massa bangunan, serta peningkatan akses kendaraan dan pejalan kaki di dalam kawasan. Sementara itu, peningkatan ruang jalan melibatkan pelebaran ruas jalan menjadi dua lajur dengan jalur pejalan kaki di kedua sisinya, serta penambahan fasilitas seperti lampu jalan, bangku,

tempat sampah, dan penanda kawasan yang mencerminkan citra Kawasan Pantai Pede sebagai destinasi wisata kuliner *seafood*.

Program pembangunan Kawasan Wisata Kuliner Pede *Seafood Paradise* dilakukan pada tahap 1 (2024). Urgensi dari pembangunan Kawasan Pede *Seafood Paradise* pada tahap 1 terkait dengan adanya potensi wisata kuliner berbasis bahari, tingginya minat wisatawan dalam akan wisata kuliner, serta adanya dukungan dari Pemerintah Setempat yang telah mendukung adanya ketersediaan lahan. Fase-fase yang dilakukan dalam program pembangunan Kawasan Wisata Kuliner Pede *Seafood Paradise* adalah penyusunan DED, dokumen sosial, dokumen lingkungan serta konstruksi. Penyusunan dokumen sosial dan dokumen lingkungan diserahkan kepada Pemda Manggarai Barat. Waktu pengerjaan Konstruksi selama 2 tahun.

8. Pengembangan *Eco-Marine Park*

Potensi wisata bahari untuk tujuan edukasi dan konservasi di kawasan pesisir belum dimaksimalkan. Potensi di kawasan perairan Bari pada Sub-KTA Longos memberikan peluang untuk mengembangkan kawasan ini sebagai *Eco-Marine Park*. Kawasan *Eco-Marine Park* sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi. Program pembangunan kawasan wisata *Eco-Marine Park* dilakukan pada tahap 1 (2024). Urgensi dari pembangunan pada tahap 1 terkait dengan adanya potensi wisata bahari serta konservasi biota laut, serta tingginya minat wisatawan dalam akan wisata bahari di Kawasan Bajo. Fase-fase yang dilakukan dalam program pembangunan *Eco-Marine Park* ini adalah penyusunan DED, Dokumen Sosial, Dokumen Lingkungan serta Konstruksi. Penyusunan Dokumen Sosial dan Dokumen Lingkungan diserahkan kepada Pemda Manggarai Barat. Waktu pengerjaan Konstruksi selama 2 tahun.

Selain delapan titik tersebut, diperlukan beberapa investasi bidang usaha jasa Pariwisata. Investasi ini dapat dilakukan oleh Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Perlu aktivitas dan kebijakan untuk menarik para investor tersebut. Secara rinci aktivitas yang perlu dilakukan untuk menarik investor ditampilkan pada tabel Bab 4 Rencana Aksi.

9. Pengembangan *Komodo Museum and Information Center*

Aktivitas wisata di kawasan Taman Nasional Komodo membutuhkan pemahaman dari wisatawan tentang *do and don't*, hal tersebut penting mengingat Taman Nasional Komodo memiliki satwa yang dilindungi. Kawasan informasi mengenai satwa Komodo dan satwa lain di Taman Nasional Komodo dapat diperkenalkan dan diinformasikan terlebih dahulu

kepada Wisatawan, sehingga Wisatawan telah siap secara informasi sebelum masuk ke Taman Nasional Komodo. Pengembangan fasilitasi ini dapat memanfaatkan bangunan eksisting yang berada di Kampung Ujung. Fase yang dilakukan dalam program ini adalah penyusunan DED, Dokumen Sosial, Dokumen Lingkungan serta Konstruksi. Penyusunan Dokumen Sosial dan Dokumen Lingkungan diserahkan kepada Pemda Manggarai Barat. Waktu pengerjaan Konstruksi selama 2 tahun.

J. Pengelolaan DPN Labuan Bajo

1. Organisasi Tata kelola

Organisasi pemerintah memegang peran kunci dalam pengembangan Pariwisata, terutama dalam pengelolaan DPN Labuan Bajo. Koordinasi lintas sektoral juga penting dalam Pariwisata yang kompleks. Pentingnya SDM yang terampil dan sinergi di organisasi Pariwisata dan dunia usaha menjadi faktor kunci. Namun, manajerial yang kuat dan inovasi dalam produk atau jasa masih menjadi tantangan. Profesi seperti *Tour Leader* dan pemandu wisata juga membutuhkan peningkatan dalam mengomunikasikan kearifan lokal. Dalam masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) berperan penting, namun legalitas dan manajerial sering menjadi hambatan. BUMDES adalah potensi penting, tetapi pemahaman masyarakat masih kurang. Di akademik, pengelolaan pendidikan dan penelitian perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri Pariwisata. Media juga memiliki peran vital, namun kompetensi SDM dan ruang lingkup media lokal perlu diperkuat.

Tabel 21. Permasalahan dan Strategi Mitigasi dalam Organisasi Tata Kelola

No	Permasalahan dan Isu Peningkatan Kapasitas	Strategi Mitigasi
1	Pemerintah	
	belum adanya pola koordinasi yang efektif dan masih kurangnya kerja sama antar kelembagaan Pariwisata yang ada di Labuan Bajo Masih terkesan jalan sendiri-sendiri menuju visi masing-masing. Koordinasi lintas sektoral menjadi tantangan besar dalam menjalankan ITMP.	penguatan perencanaan koordinasi dan kerja sama antar kelembagaan Pariwisata yang ada di Labuan Bajo
2	Swasta	
	organisasi kepariwisataan seperti PHRI, ASITA, HPI, dan lainnya belum	peningkatan kapasitas kelembagaan Pariwisata

No	Permasalahan dan Isu Peningkatan Kapasitas	Strategi Mitigasi
	memiliki strategi dalam menjalankan misi, di mana setiap organisasi akan saling bersinggungan. Salah satu hal yang dihadapi organisasi dalam konteks SDM adalah kemampuan manajemen/manajerial yang masih terbatas	Kabupaten Manggarai Barat melalui komunitas dan masyarakat
3	Masyarakat	
	peningkatan kapasitas kelembagaan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat melalui komunitas dan masyarakat juga belum dilakukan secara optimal	peningkatan kapasitas kelembagaan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat melalui komunitas dan masyarakat
4	UMKM	
	minimnya inovasi dalam pengembangan produk atau jasa. Beberapa produk lokal seperti kain tenun hingga minuman. Minimnya inovasi dalam pengembangan produk atau jasa. Beberapa produk lokal seperti kain tenun hingga minuman tradisional tidak bisa dikemas dalam inovasi yang baik sehingga memiliki nilai jual yang lebih baik. Minimnya inovasi ini banyak terjadi di usaha rumah tangga dan industri kecil.	peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif dan jasa usaha rumah tangga di sektor Pariwisata
5	Akademisi	
	mengenai kurikulum kegiatan belajar mengajar yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri Pariwisata	optimalisasi peran akademisi melalui Penyusunan kurikulum kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri Pariwisata
6	Media Massa	
	kompetensi SDM untuk mengembangkan media lokal belum terlihat pergerakannya. SDM dalam	optimalisasi peran Media massa dalam pengembangan Pariwisata di Labuan Bajo

No	Permasalahan dan Isu Peningkatan Kapasitas	Strategi Mitigasi
	organisasi di media ini membutuhkan relasi yang luas, dari pemerintah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat.	

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

2. Tata Kelola Mitigasi Bencana

Aspek kebencanaan adalah isu penting dalam pengembangan Pariwisata terintegrasi. Dalam berbagai kasus, hubungan erat antara Pariwisata dan kebencanaan terbukti mempengaruhi risiko, kerentanan, dan dampak yang terjadi. Kabupaten Manggarai Barat memiliki sejumlah risiko bencana, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tsunami, abrasi, dan gempa bumi, yang dipengaruhi oleh faktor geologi, perubahan iklim, dan lainnya. Bencana alam dapat secara langsung memengaruhi masyarakat lokal yang bergantung pada Pariwisata dan sumber daya alam. Selain itu, bencana juga dapat merusak habitat dan mengganggu daya tarik wisata seperti Komodo dan terumbu karang di pesisir.

a) KTA 1 Taman Nasional Komodo

KTA 1 mencakup Sebagian besar wilayah Taman Nasional Komodo. Kondisi fisik dan biotik kawasan ini menyimpan kerentanan dan risiko bencana tersendiri. Kawasan perencanaan ini Sebagian berbentuk kepulauan sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana seperti tsunami, gempa bumi, dan juga kerentanan terhadap kenaikan muka air laut sebagai akibat dari perubahan iklim. Selain itu, kondisi ekosistem di daerah ini sebagian besar berupa sabana dengan kontur perbukitan yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan lahan, kekeringan, dan longsor. Dalam konteks kebencanaan, mitigasi bencana alam pada kawasan ini sangat krusial mengingat kawasan perencanaan ini juga merupakan tempat tinggal dan ruang hidup dari komunitas Ata Modo dan juga habitat dari Komodo. Oleh sebab itu, strategi mitigasi diperlukan melalui upaya-upaya berikut.

1. peningkatan kapasitas masyarakat melalui komunitas tanggap bencana dan desa Tangguh bencana (DESTANA)
2. peningkatan infrastruktur pencegahan bencana (sirene tsunami, EWS)
3. optimalisasi peran pemangku kepentingan
4. persiapan jalur evakuasi
5. pelatihan situasi tanggap bencana melalui simulasi

6. sosialisasi dampak dan mitigasi kebencanaan yang terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim
7. pelibatan pengetahuan tempatan *(indigenous knowledge)* komunitas dalam rencana mitigasi atau kontingensi bencana

b) KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya

Berbeda dengan KTA 1, KTA 2 memiliki karakteristik wilayah perkotaan-semi perkotaan sehingga kerentanan dan risiko yang ada juga berbeda. Kerentanan KTA 2 yang melingkupi kawasan Labuan Bajo terfokus kepada bencana yang dapat terjadi di kawasan perkotaan seperti kebakaran gedung, bencana sosial, penyakit menular dan tidak menular, serta kegagalan teknologi. Selain itu, kepadatan penduduk dan konsentrasi yang tinggi pada kantong-kantong pemukiman tertentu juga turut meningkatkan risiko dan kerentanan bencana. Oleh sebab itu, secara umum, fokus strategi mitigasi perlu diarahkan kepada pelibatan pemangku kepentingan dan peningkatan infrastruktur penanganan kebencanaan seperti mobil pemadam kebakaran dan ketersediaan *hydrant* untuk bencana kebakaran gedung serta pencegahan bencana dengan melibatkan komunitas-komunitas di level masyarakat. Selain itu, rencana Tangguh bencana jangka panjang meliputi adaptasi perubahan iklim di wilayah perkotaan juga perlu dicanangkan. Secara ringkas, strategi mitigasi bencana alam di KTA 2 yaitu:

1. penguatan dan penyediaan sarana prasarana penanganan kebencanaan seperti mobil pemadam kebakaran dan *hydrant*
2. penguatan komunitas dan petugas tanggap bencana seperti BASARNAS, TRC BPBD, dan unsur-unsur TNI/POLRI
3. promosi perubahan iklim dan pemanasan global di tingkat kelurahan
4. penyediaan jalur evakuasi dan titik kumpul

c) Mitigasi Bencana Alam Melalui Pariwisata Tangguh Bencana

Rencana mitigasi bencana khususnya di Pariwisata mencakup setidaknya lima penahapan yakni tahap inisiasi, tahap perencanaan dan prioritasiasi, tahap persiapan, tahap tanggap darurat, dan tahap aksi tangguh jangka panjang. Setiap tahapan memiliki pendekatan dan program yang dapat berbeda-beda berdasarkan kepada tipe bencananya. Secara umum, setiap sub-KTA sesuai dengan skenario yang terpilih memiliki kerentanan dan risiko bencana yang berbeda-beda. Strategi yang telah dianalisis pada bagian sebelumnya kemudian diturunkan dalam beberapa program terkait yang dapat dilaksanakan oleh OPD di daerah seperti BPBD dan bekerja sama dengan kementerian atau OPD lain.

Tahap 1	dalam satu siklus rencana mitigasi bencana, tahapan pertama adalah pemahaman terhadap risiko bencana. Pemahaman ini dapat di Indonesia dirumuskan melalui beberapa instrumen legal-formal seperti Kawasan Rawan Bencana (KRB) dana Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Secara umum, tahapan pemahaman risiko bencana terhadap Pariwisata terdiri atas dua tahapan yakni integrasi rencana penanggulangan bencana di tingkat nasional atau lokal dan penilaian terhadap risiko kerusakan baik secara fisik maupun secara finansial.
Tahap 2	tahapan kedua dalam siklus mitigasi bencana adalah perencanaan dan prioritasiasi. Tahapan ini berisi pada penyusunan rencana-rencana pencegahan tanggap darurat dan rehabilitasi dari berbagai jenis bencana. Prioritasisasi dapat dilakukan dalam beberapa aspek antara lain adalah prioritasisasi sumber daya maupun pada lokasi. Hal tersebut menjadi penting agar sumber daya mitigasi yang dimiliki dapat difokuskan untuk memastikan efisiensi sumber daya.
Tahap 3	tahapan perencanaan dan prioritasiasi yang termasuk ke dalam aspek pencegahan kemudian diturunkan dalam program-program dan rencana aksi yang terkait dengan persiapan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, persiapan juga dilakukan melalui penguatan infrastruktur dan komponen fisik yang ada di sekitar infrastruktur atau aset Pariwisata. Pencegahan dan penguatan infrastruktur diarahkan menggunakan pendekatan berbasis lingkungan dan dapat dilakukan melalui kerangka *Ecosystem for Disaster Risk Reduction* (Eco-DRR).
Tahap 4	penyusunan pariwisata tangguh bencana mencakup program dan aksi yang perlu dilakukan bilamana terjadi kejadian bencana. Pada saat kejadian bencana, seluruh sumber daya manusia perlu diarahkan pada lokasi terkait dengan menerapkan standar keselamatan dan prosedur tetap kedaruratan. Beberapa arahan yang perlu diperhatikan dalam respons tanggap darurat adalah perlindungan terhadap golongan wisatawan rentan khususnya difabel, anak-anak, lansia, dan perempuan. Selain itu, penerapan teknologi dan perlindungan terhadap atraksi wisata vital juga perlu menjadi pertimbangan.

Tahap 5	tahapan lain dari rencana mitigasi bencana alam adalah penyusunan rencana aksi ketangguhan jangka Panjang. Di dalam rencana tersebut secara khusus, rencana dan program diarahkan untuk isu-isu perubahan iklim sebab perubahan iklim menjadi salah satu faktor pendorong dan ancaman terbesar terutama di wilayah perencanaan meliputi seluruh sub-KTA. Terlepas dari perubahan iklim, rencana jangka panjang juga mencakup prosedur rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana. Beberapa program yang terkait dengan rencana aksi jangka panjang pada perubahan iklim antara lain adalah: • penerapan Pariwisata rendah karbon termasuk *carbon accounting*, *carbon trending.* • penerapan *loss and damage Funding* pada sektor Pariwisata • preservasi *green carbon pool* seperti biomasa dan Mangrove, *brown carbon pool* mencakup batuan seperti batu gamping, dan *blue carbon pool* seperti padang lamun. • penyusunan rencana aksi perubahan iklim

3. Tata Kelola Sosial Budaya

Pembangunan Pariwisata di KTA 1, terutama di Kawasan Taman Nasional Komodo, memiliki dampak sosial yang mencakup aspek positif dan negatif. Dampak positif termasuk pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat lokal, peluang partisipasi dalam industri Pariwisata, serta manfaat sosial seperti aksesibilitas dan kegiatan budaya. Namun, ada pula dampak negatif, seperti perubahan perilaku sosial dan budaya masyarakat, pergeseran pekerjaan, serta potensi konflik sosial terkait dengan pembangunan Pariwisata. Untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, perlu ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Regulasi tersebut harus mendukung pengembangan kapasitas SDM lokal, pendayagunaan organisasi masyarakat, dan mempromosikan pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat. Dengan pendekatan ini, masyarakat lokal tetap terlibat dalam pembangunan Pariwisata tanpa kehilangan akar budaya mereka, dan perubahan perilaku dan pekerjaan dapat dijembatani dengan baik.

Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya menghadirkan dampak sosial yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya mencakup pemerataan pembangunan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, peningkatan akses, dan memberikan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat desa. Namun, dampak negatifnya mencakup perubahan pola

ekonomi dengan kehilangan lahan pertanian, dan hilangnya mata pencaharian utama. Untuk mengatasi dampak-dampak ini, pemerintah perlu mendukung kelembagaan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kapasitas mereka dalam industri Pariwisata, dan melindungi lahan komunal. Upaya mitigasi harus disesuaikan dengan program-program utama di wilayah masing-masing.

Dampak sosial yang timbul di sub-KTA mencakup efek positif dan negatif. Pembangunan Pariwisata yang merata memiliki dampak positif, seperti peningkatan ekonomi yang merata, pergerakan sosial yang lebih lancar berkat pembangunan infrastruktur, dan kesadaran bahwa Pariwisata bisa melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, dampak negatifnya termasuk konflik budaya dengan kedatangan wisatawan yang membawa budayanya, serta sulitnya bersaing bagi masyarakat yang kurang memiliki kompetensi di sektor Pariwisata. Upaya mitigasi diperlukan untuk menjaga kearifan lokal dan memaksimalkan manfaat ekonomi dari Pariwisata berbasis masyarakat.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif di KTA 1 maupun KTA 2. Berikut adalah strategi mitigasi yang dapat dilakukan:

Tabel 22. Potensi Risiko dan Strategi Mitigasi dalam Tata Kelola Sosial Budaya

No	Potensi Risiko	Strategi Mitigasi
1	keresahan diakibatkan kehilangan pendapatan setelah penataan kawasan.	- penjelasan manfaat program pada masyarakat sebelum penataan kawasan. - memprioritaskan masyarakat lokal untuk mendapat akses pada lokasi usaha setelah penataan. - Pelibatan asosiasi pedagang pasar (pelaku usaha kecil) secara partisipasi. - Pembentukan/penguatan kelembagaan pelaku ekonomi terkait Pariwisata untuk masyarakat lokal.
2	keresahan diakibatkan adanya prosedur baru/tata cara baru.	- penjelasan manfaat Proyek kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum perbaikan dan secara berkala pada saat proyek tentang akan adanya prosedur baru/tata cara baru setelah pelaksanaan program.

No	Potensi Risiko	Strategi Mitigasi
		- memprioritaskan masyarakat lokal untuk mendapat akses pada lokasi usaha. - pelibatan peran dari tokoh masyarakat/lokal dalam penjelasan manfaat program. - membuat program peningkatan pengetahuan/ keterampilan kepada masyarakat yang akan terdampak penerapan prosedur baru.
3	konflik masyarakat diakibatkan perebutan lokasi usaha di daerah strategis.	- penjelasan manfaat proyek kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum perbaikan dan secara berkala pada saat pelaksanaan proyek. - memprioritaskan masyarakat lokal untuk mendapat akses pada lokasi usaha. - pelibatan asosiasi pedagang pasar (pelaku usaha kecil) secara partisipasi. - membuat program peningkatan pengetahuan/keterampilan kepada masyarakat terdampak. - pembentukan/penguatan kelembagaan pelaku ekonomi terkait Pariwisata untuk masyarakat lokal.
4	perubahan fisik lokasi penataan kawasan.	- penjelasan manfaat proyek kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum perbaikan dan secara berkala pada saat proyek tentang akan adanya perubahan fisik lokasi penataan. - pelibatan asosiasi masyarakat seperti asosiasi pedagang pasar (pelaku usaha kecil) secara partisipasi dalam melaksanakan program. - memrioritaskan masyarakat lokal untuk mendapat akses pada lokasi usaha.

No	Potensi Risiko	Strategi Mitigasi
5	keresahan masyarakat akibat peningkatan kunjungan/jumlah wisatawan/orang luar.	- pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata di lokasi wisata baru. - membuat program peningkatan pengetahuan/keterampilan kepada masyarakat terdampak berbasis potensi lokasi (desa wisata, pertanian, perikanan). - pembentukan/penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa sehingga semua masyarakat mendapat manfaat ekonomi.

Sumber: ITMP Labuan Bajo, 2022

BAB IV. RENCANA AKSI

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.	Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata				
1.1.	Kapasitas perencanaan dan koordinasi				
1.1.1.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi bersama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan Pariwisata Labuan Bajo	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	10 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.1.2.	Fasilitasi pertemuan forum secara berkala	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	6 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.2.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata				
1.2.1.	Pelatihan tata kelola destinasi wisata sesuai standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	3 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.2.2.	Peningkatan fungsi kelembagaan Balai Taman Nasional Komodo dalam pemenuhan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan, dan keselamatan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di destinasi super prioritas kelembagaan Balai Taman Nasional Komodo	KTA 1 Taman Nasional Komodo	3 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.2.3.	Peningkatan fungsi dan kapasitas desa wisata	Pulau Komodo dan Rinca	2 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.2.4.	Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di destinasi super prioritas	Pulau Komodo dan Rinca	6 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.2.5.	Peningkatan kapasitas tata kelola Pokdarwis di desa wisata kawasan Taman Nasional Komodo	Pulau Komodo dan Rinca	2 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.	Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan				
1.3.1.	Optimalisasi peran kelembagaan kepariwisataan dari swasta dan unsur masyarakat	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.2.	Pendataan anggota pelaku Pariwisata dari unsur swasta dan penyebaran informasi usaha pelaku Pariwisata dari unsur swasta	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.3.	Inventarisasi kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo atau yang masuk ke Kawasan Labuan Bajo	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.4.	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	2 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.3.5.	Fasilitasi kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	2 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.3.6.	Ketersediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.7.	Penguatan kelembagaan (tata kelola) desa wisata	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.8.	Sosialisasi fasilitasi perizinan mendirikan BUMDes	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	2 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.3.9.	Pelatihan dalam bidang Pariwisata (produk, pemasaran, pengemasan paket wisata, UMKM)	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.10.	Menyusun kalender event tahunan baik tingkat nasional maupun internasional.	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	12 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.11.	Bimbingan teknis optimalisasi peran kelembagaan kepariwisataan dari unsur akademisi dalam mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.3.12.	Bimbingan teknis mempersiapkan lulusan pendidikan Pariwisata untuk penempatan dan perekrutan tenaga kerja terampil di usaha Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.4.	Optimalisasi Peran Kelembagaan Kepariwisataan dari Unsur Media Massa				
1.4.1.	Sinergi antar pemangku kepentingan destinasi Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.4.2.	Peningkatan kapasitas publikasi media massa online dan cetak yang bertanggung jawab	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.5.	Fasilitasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Terpadu				
1.5.1.	Peningkatan kapasitas tata kelola destinasi wisata sesuai standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.5.2.	Penguatan komunitas dan kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif.	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.5.3.	Optimalisasi penguatan kelembagaan (tata kelola) desa wisata	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.5.4.	Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.5.5.	Penguatan kapasitas Pokdarwis	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.	Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Investasi Swasta ke Sektor Pariwisata				
1.6.1.	Fasilitasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.2.	Bimbingan teknis menyiapkan tenaga kerja langsung (perhotelan, biro perjalanan, kuliner, pengelola DTW, jasa Pariwisata) dan tidak langsung (transportasi, pembangunan infrastruktur, dan pengelola ICT)	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.3.	Pelatihan terkait AMDAL, LARAP dan Andalalin	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.4.	Fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi AMDAL dan Andalalin	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.5.	Sosialisasi regulasi terbaru tentang kemudahan perizinan investasi	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.6.	Penguatan promosi kegiatan MICE melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	2 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.6.7.	Fasilitasi kegiatan MICE dalam dan luar negeri	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	2 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.8.	Pelatihan pengelolaan industri MICE di dalam dan luar negeri	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.9.	Pembinaan implementasi regulasi, kebijakan, sertifikasi bidang ketenagakerjaan pada industri Pariwisata skala menengah dan kecil	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.6.10.	Fasilitasi dan pendampingan perencanaan pengembangan SDM	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.7.	Optimalisasi Program Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan				
1.7.1.	Pembinaan implementasi program dalam rangka Pengembangan Pariwisata di Labuan Bajo	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.7.2.	Evaluasi dan monitoring implementasi program dalam rangka pengembangan Pariwisata di Labuan Bajo	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
1.8.	Kapasitas Kelembagaan Kawasan Pariwisata				
	KTA 1 Taman Nasional Komodo				
1.8.1.	Peningkatan kapasitas perencanaan dan koordinasi yang efektif dan terintegrasi terkait pengembangan	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
	destinasi super prioritas di kawasan Taman Nasional Komodo				• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.2.	Peningkatan kapasitas tata kelola destinasi wisata sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku secara nasional di destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.3.	Penguatan kapasitas kelembagaan Balai Taman Nasional Komodo	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.8.4.	Peningkatan fungsi dan kapasitas desa wisata di kawasan Taman Nasional Komodo	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.5.	Sosialisasi dan pendampingan penerapan standar dan regulasi yang berlaku secara nasional di destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.6.	Peningkatan kapasitas tata kelola Pokdarwis di desa wisata	• Desa Komodo • Desa Papa Garang • Desa Pasir Panjang	3 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.7.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Balai Besar Taman Nasional Komodo dalam tata kelola dan pemenuhan standar pelayanan destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.8.	Sosialisasi dan implementasi peraturan terbaru tentang tata kelola dan standar pelayanan destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.9.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Balai Taman Nasional	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
	Komodo di bidang literasi digital di sektor industri Pariwisata				• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.10.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Taman Nasional Komodo di bidang bahasa asing	KTA 1 Taman Nasional Komodo	2 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.11.	Peningkatan kerja sama dan koordinasi rutin dalam pengelolaan destinasi pariwisata premium	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.8.12.	Penguatan kapasitas masyarakat lokal/masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Komodo	• Desa Komodo • Desa Papa Garang • Desa Pasir Panjang	3 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.13.	Sosialisasi dan pendampingan implementasi kebijakan dan regulasi terbaru tentang tata kelola dan standar pelayanan destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.14.	Pengembangan sistem pembayaran satu pintu untuk aktivitas kapal dan wisata bahari	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • BOPLBF • Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8. 14a	Pengadaan *Ambulance* Laut untuk kesiapsiagaan dan evakuasi di destinasi wisata	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• BASARNAS • Kementerian Kesehatan
	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya				
1.8.15.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi bersama dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Pariwisata Labuan Bajo	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.16.	Perencanaan program peningkatan kapasitas	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.17.	Koordinasi dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.8.18.	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi program	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.19.	Optimalisasi *pentahelix* peran pemangku kepentingan dalam pengembangan Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.20.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan Pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.21.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas pejabat pemerintah daerah tentang literasi Pariwisata termasuk warisan budaya	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.8.22.	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pihak lain	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.23.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas pejabat pemerintah daerah tentang literasi digital di industri Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.24.	Optimalisasi peran kelembagaan Pariwisata dari sektor swasta dan elemen masyarakat dalam mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas	Labuan Bajo	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.25.	Peningkatan peran serta masyarakat adat/lokal dan pelaku usaha lokal sebagai pelaku Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.8.26.	Peningkatan kapasitas pengelolaan destinasi bagi pelaku Pariwisata dari masyarakat	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.27.	Peningkatan kapasitas ekonomi kreatif dan pengetahuan masyarakat, Pariwisata dan pengendalian, lingkungan hidup.	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.28.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang destinasi premium	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.29.	Penyediaan data pelaku Pariwisata dari unsur swasta dan penyebarluasan informasi usaha pelaku Pariwisata dari unsur swasta	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.8.30.	Inventarisasi kapal-kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo atau yang memasuki kawasan Labuan Bajo	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.31.	Program sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia pelaku Pariwisata dari sektor swasta dan masyarakat	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.32.	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.33.	Pengembangan kapasitas pengetahuan tentang konservasi, serta perlindungan dan pelestarian alam	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.34.	Memperkuat kelembagaan (tata kelola) desa wisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.35.	Perizinan untuk menjadi Badan Usaha Milik Desa	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.36.	Penyusunan kalender acara tahunan di tingkat nasional dan internasional	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.37.	Optimalisasi peran kelembagaan Pariwisata dari unsur akademisi dalam mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.38.	Bimbingan teknis mempersiapkan mahasiswa dan alumni untuk penempatan dan perekrutan tenaga kerja terampil di bidang Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.39.	Optimalisasi peran kelembagaan Pariwisata dari unsur media massa dalam mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.40.	Pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang literasi Pariwisata termasuk warisan budaya dan literasi digital dalam memasarkan produk wisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.41.	Pengembangan program khusus, seperti melanjutkan pendidikan, bagi siapa saja yang berminat, tanpa batasan usia, jenis kelamin atau kecacatan, atau bagi yang berminat pada bidang tertentu	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.42.	Pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
	sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing				• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.43.	Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal budaya kerja, budaya pelayanan, dan budaya kebersihan.	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.44.	Peningkatan kapasitas tenaga kerja Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.45.	Sertifikasi kompetensi SDM bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.46.	Peningkatan kapasitas tata kelola destinasi wisata sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
	secara nasional di destinasi super prioritas				• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.47.	Optimalisasi penguatan kelembagaan desa wisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.48.	Sosialisasi dan pendampingan implementasi standar dan regulasi yang berlaku secara nasional di destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.49.	Peningkatan kapasitas tata kelola Pokdarwis di desa wisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.50.	Sosialisasi perizinan menjadi BUMDes dalam mengelola Pariwisata di desa	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.51.	Fasilitasi Pokdarwis dalam mensosialisasikan regulasi, kebijakan, dan program kepariwisataan	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.52.	Fasilitasi dan pendampingan dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi investasi swasta di bidang Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.53.	Ketersediaan data Pariwisata dan diseminasi informasi	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.54.	Bimbingan teknis menyiapkan langsung (perhotelan, biro perjalanan, kuliner, pengelola DTW, jasa Pariwisata) dan tidak langsung	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
	(transportasi, pembangunan infrastruktur, pengelola TIK)				• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.55.	Fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi AMDAL dan Andalalin	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.56.	Sosialisasi peraturan terbaru kemudahan perizinan penanaman modal	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.57.	Pembinaan pelaksanaan peraturan, kebijakan, sertifikasi di bidang ketenagakerjaan pada industri Pariwisata skala menengah dan kecil	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	5 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.58.	Fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan pengembangan SDM	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.59.	Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.8.60.	Penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Labuan Bajo melalui Peraturan Daerah	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 dokumen	2024	• Kementerian ATR/BPN • Pemerintah Daerah
1.8.61.	Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Labuan Bajo melalui Peraturan Daerah	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 dokumen	2024	• Kementerian ATR/BPN • Pemerintah Daerah
1.9.	Pelestarian dan Pengelolaan Aset Alam dan Lingkungan				
1.9.1.	Pemantauan dampak lingkungan	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
1.9.2.	Pemantauan kualitas air, udara, lahan, keanekaragaman hayati, perilaku hewan, dan limbah	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.9.3.	Pengelolaan dampak lingkungan	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.9.4.	Pengelolaan kualitas air, udara, lahan, keanekaragaman hayati, perilaku hewan, dan limbah	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1.9.5.	Perencanaan pembangunan infrastruktur ekologis jalur habitat Komodo di Kawasan Taman Nasional.	KTA 1 Taman Nasional	1 dokumen	2024	Taman Nasional
1.9.6.	Pembentukan forum komunikasi Cagar Biosfer Komodo sebagai untuk mendukung sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam ruang lingkup Cagar Biosfer Komodo	KTA 1 Taman Nasional	1 kegiatan	2024	Taman Nasional
2.	Akses dan Infrastruktur Dasar				
2.1.	Transportasi Publik – Darat Internal				

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.1.1.	Pembangunan terminal	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 Paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.1.2.	Pembangunan halte bus	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	20 Paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.1.3.	Pembangunan parkir	• Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan • Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu • Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas	3 Paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.1.4.	Pembangunan helipad	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 paket	2024	Balai Taman Nasional Komodo
2.1.5.	Penyediaan prasarana keselamatan jalan di semua ruas jalan nasional	Manggarai Barat	1 paket	2024	BPJN NTT
2.1.6.	Penyediaan prasarana keselamatan jalan di semua ruas dan jalan kabupaten	Manggarai Barat	1 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.1.7.	Penyusunan dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Manggarai Barat	Manggarai Barat	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.2.	Transportasi Laut Internal				
2.2.1.	Rehabilitasi dermaga Kampung Ujung dan dermaga biru	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	2 paket	2024	Pemerintah Provinsi NTT
2.2.2.	Perbaikan dan penambahan fasilitas dermaga	• Pulau Padar • Pulau Komodo • Desa Papa Garang	3 paket	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.2.3.	Perencanaan dan pembangunan dermaga di luar Taman Nasional Komodo	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	7 paket	2024	Pemerintah Provinsi NTT
2.3.	Akses Jaringan Jalan Internal				
2.3.1.	Peningkatan jalan dan penataan trotoar simpang Binongko-simpang Sylvia	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1,85 km	2024	BPJN NTT
2.3.2.	Pembangunan jalan lingkar Wae Kelambu	Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	7,69 km	2024	BPJN NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.3.	Peningkatan jalan dan rehabilitasi jalan ruas jalan Polres–Wae Bo-Lancang	Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	1,68 km	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.3.4.	Penataan trotoar dan drainase jalan Wae Mata	Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas	1,54 km	2024	BPJN NTT
2.3.5.	Pemeliharaan rutin dan berkala Labuan Bajo-simpang Nalis-simpang Kenari, simpang Kenari-Tana Mori	Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka	24,75 km	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.4.	Drainase				
2.4.1.	Penyusunan dokumen rencana induk drainase	Manggarai Barat	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.4.2.	Peningkatan drainase simpang Binongko-simpang Sylvia	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1,85 km	2024	BPJN NTT
2.4.3.	Pembangunan drainase permukiman kota Batu Cermin dan Wae Kelambu	Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	25,5 km	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.5.	Pasokan Listrik				
2.5.1.	Jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	4 unit	2024	PLN

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.5.2.	Jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah	Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	6 unit	2024	PLN
2.5.3.	Jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah	Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas	16 unit	2024	PLN
2.5.4.	Jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah	Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka	16 unit	2024	PLN
2.5.5.	Jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah	Sub-KTA 7 Boleng-Gua Rangko	54 unit	2024	PLN
2.5.6.	Jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah	Sub-KTA 8 Mbeliling-Cunca Wulang	34 unit	2024	PLN
2.5.7.	PLTS foto *Voltaik Off Grid*	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	7 paket	2024	PLN
2.5.8.	PLTS foto *Voltaik Off Grid*	Sub-KTA 4 Golo Mori-Warloka	3 paket	2024	PLN
2.5.9.	PLTS foto *Voltaik Off Grid*	Sub-KTA 5 Labuan Bajo Perairan	7 paket	2024	PLN
2.5.10.	Jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah	Desa Pasir Panjang dan Desa Komodo	2 paket	2024	PLN
2.6.	Telekomunikasi dan jasa internet				
2.6.1.	Layanan telepon bergerak 100% area cakupan 4-5 operator	Manggarai Barat	73 Unit BTS	2024	Badan Usaha

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.7.	Pengolahan Limbah				
2.7.1.	Penyusunan RISPAL Kabupaten Manggarai Barat	Manggarai Barat	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
	KTA 1 Taman Nasional Komodo				
2.7.2.	Penyusunan DED IPAL komunal dan jaringan *sewer*	• Desa Pasir Panjang • Desa Komodo	2 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.3.	Konstruksi IPAL komunal	Desa Pasir Panjang	300 m^3/hari	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.7.4.	Konstruksi jaringan *sewer*	Desa Pasir Panjang	3 km	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.7.5.	*Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) pembebasan lahan 500 m^2	• Desa Pasir Panjang • Desa Komodo	2 dokumen	2024	• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Balai Taman Nasional Komodo
2.7.6.	Biaya operasional IPAL dan jaringan *sewer*	• Desa Pasir Panjang • Desa Komodo • Desa Papa Garang	1 tahun	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.7.7.	Penyusunan DED dan konstruksi Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal	• Pulau Padar • Desa Komodo	2 kegiatan	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.7.8.	Penyusunan DED IPAL komunal dan jaringan *sewer*	• Desa Pasir Panjang • Desa Komodo	2 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.9.	LARAP pembebasan lahan 600 m^2	Desa Komodo	1 dokumen	2024	• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • Balai Taman Nasional Komodo

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya				
2.7.10.	Penyusunan perluasan FS IPAL di Labuan Bajo Perkotaan	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.11.	Penyusunan DED peningkatan kapasitas IPAL Labuan Bajo	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.12.	Konstruksi penambahan unit IPAL	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	150,000 m^3/hari	2024	Kementerian PUPR
2.7.13.	Konstruksi penambahan jaringan *sewer*	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	150 km	2024	Kementerian PUPR
2.7.14.	Penyusunan FS bangunan penerima air limbah	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.15.	Penyusunan DED bangunan penerima air limbah dan jaringan *sewer* ke IPAL terdekat	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.16.	Pembebasan lahan lokasi bangunan penerima air limbah dari kapal Pariwisata	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.7.17.	Penyusunan FS IPAL terpusat	Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.18.	Penyusunan DED IPAL terpusat	Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.19.	Operasional IPAL Terpusat	Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.20.	Penyusunan FS pembangunan IPAL dari kapal di Pelabuhan Wae Kelambu	Pelabuhan terminal *multipurpose* Wae Kelambu	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.21.	Penyusunan DED IPAL dari kapal di Pelabuhan Wae Kelambu	Pelabuhan terminal *multipurpose* Wae Kelambu	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.22.	Penyusunan FS pembangunan IPAL terpusat skala permukiman	Desa Gorontalo	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.23.	Penyusunan DED pembangunan IPAL terpusat skala permukiman	Desa Gorontalo	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.7.24.	Konstruksi IPAL terpusat skala permukiman	Desa Gorontalo	1 paket	2024	Kementerian PUPR
2.7.25.	LARAP lahan IPAL terpusat skala permukiman	Desa Gorontalo	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.7.26.	Penyusunan FS jaringan *sewer* pipa primer, sekunder dan tersier	Desa Gorontalo	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.27.	Penyusunan DED jaringan *sewer* pipa primer, sekunder dan tersier	Desa Gorontalo	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.7.28.	Konstruksi jaringan *sewer* pipa primer, sekunder dan tersier	Desa Gorontalo	43 km	2024	Kementerian PUPR
2.7.29.	Operasional jaringan *sewer*	Desa Gorontalo	43 km	2024	Kementerian PUPR
2.7.30.	Penyusunan dokumen FS IPLT	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.31.	Penyusunan DED IPLT	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.32.	Penyusunan Larap lahan IPLT	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.7.33.	Penyusunan dokumen Persetujuan Teknis (Pertek)	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.7.34.	Pembentukan kelembagaan dan pelatihan operator	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.8.	Pengelolaan Sampah				
2.8.1.	Sosialisasi peraturan daerah kebijakan dan strategi daerah ke masyarakat	Manggarai Barat	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.2.	Pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan kepada masyarakat	Manggarai Barat	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
	KTA 1 Taman Nasional Komodo				
2.8.3.	Penyusunan FS persampahan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.8.4.	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dan pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah, pencacah sampah, dan alat pengayak sampah	Desa Komodo	1 paket	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.5.	Biaya Operasional pengangkutan sampah keluar dari kawasan Taman Nasional Komodo	Desa Komodo	12 bulan	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.8.6.	Pembentukan kelembagaan KSM pengelola sampah pengangkutan sampah keluar dari kawasan Taman Nasional Komodo	Desa Komodo	3 paket	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.8.7.	Biaya operasional pengangkutan sampah keluar dari kawasan Taman Nasional Komodo	Desa Pasir Panjang	12 bulan	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.8.8.	Pembentukan kelembagaan KSM pengelola sampah pengangkutan sampah keluar dari kawasan Taman Nasional Komodo	Desa Pasir Panjang	3 paket	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya				

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.9.	Pengadaan kapal pengangkutan sampah tidak manfaat dari TPS 3R antar pulau ke darat	Pulau-pulau di KTA 1 dan 2	1 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.10.	Biaya operasional TPA Warloka	TPA Warloka	1 tahun	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.11.	Larap lahan TPS 3R	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.12.	Penyusunan DED bangunan TPS 3R	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.13.	Penyediaan tempat sampah dari kapal di pelabuhan Labuan Bajo	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	6 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.14.	Konstruksi TPS 3R	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	10 Unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.15.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah organik	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	20 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.16.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah anorganik	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	20 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.17.	Pengadaan alat pengangkutan sampah *arm roll truck*	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	10 unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.18.	Pengadaan alat pencacah sampah organik	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	10 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.19.	Pengadaan alat pengayak sampah organik	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	10 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.20.	Pengadaan alat pencacah dan pengayak sampah plastik	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	10 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.21.	Pembentukan kelembagaan KSM pengelola sampah TPS 3R	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	5 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.22.	Operasional TPS 3R	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	5 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.23.	Larap lahan TPS 3R	Desa Batu Cermin	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.24.	Penyusunan DED bangunan TPS 3R	Desa Batu Cermin	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.8.25.	Konstruksi TPS 3R	Desa Batu Cermin	5 unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.26.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah organik	Desa Batu Cermin	10 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.27.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah anorganik	Desa Batu Cermin	10 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.28.	Pengadaan alat pengangkutan sampah *arm roll truck*	Desa Batu Cermin	5 unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.29.	Pengadaan alat pencacah sampah organik	Desa Batu Cermin	5 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.30.	Pengadaan alat pengayak sampah organik	Desa Batu Cermin	1 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.31.	Pengadaan alat pencacah dan pengayak sampah plastik	Desa Batu Cermin	5 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.32.	Pembentukan kelembagaan KSM pengelola sampah TPS 3R	Desa Batu Cermin	4 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.33.	Pembentukan kelembagaan KSM pengelola sampah TPS 3R.	Desa Batu Cermin	4 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.34.	Operasional TPS 3R (5 Unit)	Desa Batu Cermin	5 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.35.	Larap lahan TPS 3R	Desa Gorontalo	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.36.	Penyusunan DED bangunan TPS 3R	Desa Gorontalo	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.8.37.	Konstruksi TPS 3R	Desa Gorontalo	5 unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.38.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah organik	Desa Gorontalo	10 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.39.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah anorganik	Desa Gorontalo	10 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.40.	Pengadaan alat pengangkutan sampah *arm roll truck*	Desa Gorontalo	5 unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.41.	Pengadaan alat pencacah sampah organik	Desa Gorontalo	5 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.42.	Pengadaan alat pengayak sampah organik	Desa Gorontalo	1 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.43.	Pengadaan alat pencacah dan pengayak sampah plastik	Desa Gorontalo	5 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.44.	Pembentukan kelembagaan KSM pengelola sampah TPS 3R	Desa Gorontalo	4 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.45.	Operasional TPS 3R	Desa Gorontalo	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.46.	Larap lahan TPS 3R	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.47.	Penyusunan DED bangunan TPS 3R	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.8.48.	Konstruksi TPS 3R	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	4-unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.49.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah organik	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	5 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.50.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah anorganik	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	5 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.51.	Pengadaan alat pengangkutan sampah *arm roll truck*	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	2 unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.52.	Pengadaan alat pencacah sampah organik	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	3 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.53.	Pengadaan alat pengayak sampah organik	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	3 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.54.	Pengadaan alat pencacah dan pengayak sampah plastik	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	3 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.55.	Pembentukan kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah TPS 3R	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	4 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.56.	Operasional TPS 3R	Sub-KTA 3 Golo Mori-Warloka	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.57.	Larap lahan TPS 3R	Desa Pasir Putih	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.58.	Penyusunan DED bangunan TPS 3R	Desa Pasir Putih	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.59.	Konstruksi TPS 3R	Desa Pasir Putih	1 unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.60.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah	Desa Pasir Putih	1 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.61.	Pengadaan alat pencacah sampah	Desa Pasir Putih	1 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.62.	Pengadaan alat pengayak sampah	Desa Pasir Putih	1 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.63.	Pembentukan kelembagaan KSM pengelola sampah TPS 3R.	Desa Pasir Putih	3 paket	2024	Kementerian PUPR
2.8.64.	Operasional TPS 3R	Desa Pasir Putih	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
	Sub-KTA				
2.8.65.	Review Rencana Induk Persampahan dan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan	Manggarai Barat	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.66.	Review dan pengembangan Jakstrada, serta penyusunan dan sosialisasi pengelolaan sampah	Manggarai Barat	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.67.	Pendidikan, pelatihan dan studi banding	Manggarai Barat	4 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.68.	Penyediaan saran penampung sampah 3R	Manggarai Barat	300 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.69.	LARAP lahan TPS 3R	Pulau Longos	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.70.	Penyusunan DED Bangunan TPS 3R	Pulau Longos	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.8.71.	Konstruksi TPS 3R	Pulau Longos	3 unit	2024	Kementerian PUPR
2.8.72.	Pengadaan alat pengangkutan motor bak sampah organik	Pulau Longos	5 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.73.	Pengadaan alat pencacah sampah organik	Pulau Longos	3 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.74.	Pengadaan alat pengayak sampah organik	Pulau Longos	3 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.75.	Pengadaan alat pencacah dan pengayak sampah plastik	Pulau Longos	3 unit	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.76.	Pembentukan kelembagaan KSM pengelola sampah TPS 3R	Pulau Longos	4 paket	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.77.	Operasional dan pemeliharaan unit dan alat di TPS 3R	Pulau Longos	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.78.	Larap lahan TPS 3R	Desa Rangko	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.79.	Penyusunan DED Bangunan TPS 3R	Desa Rangko	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.8.80.	Operasional dan pemeliharaan unit dan alat di TPS 3R	Desa Rangko	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.81.	Operasional dan pemeliharaan unit dan alat di TPS 3R	Sub-KTA 8 Mbeliling–Cunca Wulang	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.8.82.	Operasional dan pemeliharaan unit dan alat di TPS 3R	Sub-KTA 9 Sano Nggoang	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.8.83.	Operasional dan pemeliharaan unit dan alat di TPS 3R	Sub-KTA 10 Ndoso-Golo Lesu	12 bulan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.9.	Air Minum				
	KTA 1 Taman Nasional Komodo				
2.9.1.	Review RISPAM Kabupaten Manggarai Barat	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.9.2.	Penyusunan FS SPAM dari air baku sumur dalam dan jaringan distribusi	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.9.3.	Penyusunan DED Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) sumur dalam dan jaringan distribusi	Desa Pasir Panjang	1 dokumen	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.9.4.	Konstruksi IPA sumur dalam	Desa Pasir Panjang	20 l/s	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.9.5.	Konstruksi reservoar dan jaringan distribusi air bersih	Desa Pasir Panjang	1 dokumen	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.9.6.	Biaya operasional SPAM dan pemeliharaan unit distribusi	Desa Pasir Panjang	1 tahun	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.9.7.	LARAP pembebasan lahan SPAM	Desa Pasir Panjang	1 dokumen	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.9.8.	Penyusunan DED IPA sumur dalam dan jaringan distribusi	Desa Komodo	1 dokumen	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.9.9.	Revitalisasi unit SPAM dari sumur dalam, jaringan distribusi dan reservoar	Desa Komodo	25 l/s	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.9.10.	Konstruksi reservoar dan jaringan distribusi air bersih	Desa Komodo	1 dokumen	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.9.11.	Biaya operasional SPAM dan Pemeliharaan unit distribusi	Desa Komodo	1 tahun	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.9.12.	Larap Pembebasan Lahan SPAM	Desa Komodo	1 dokumen	2024	• Kementerian PUPR • Balai Taman Nasional Komodo
2.9.13.	Penyusunan DED IPA sumur dalam dan jaringan distribusi	Desa Papa Garang	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.9.14.	Revitalisasi SPAM sumur dalam eksisting	Desa Papa Garang	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
2.9.15.	Larap pembebasan lahan tambahan SPAM	Desa Papa Garang	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
	KTA 2 Labuan Bajo dan Sekitarnya				
2.9.16.	Penyusunan FS dan DED SPAM	Kelurahan Wae Kelambu	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.9.17.	LARAP lahan SPAM	Kelurahan Wae Kelambu	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.9.18.	Penyusunan FS dan DED SPAM	Desa Golo Mori	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.9.19.	LARAP lahan SPAM	Desa Golo Mori	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.9.20.	Penyusunan DED jaringan distribusi	Desa Golo Mori	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
2.9.21.	AMDAL Jaringan Bersih	Desa Golo Mori	1 dokumen	2024	Kementerian PUPR
	Sub-KTA				
2.9.22.	Penyusunan FS dan DED SPAM dan Jaringan	Desa Rangko	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2.9.23.	LARAP lahan SPAM	Desa Rangko	1 dokumen	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
3.	Pengembangan SDM Pariwisata				
3.1.	Kapasitas SDM Pemerintah				
3.1.1.	Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM pelaku Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	12 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.2.	Pelatihan bagi SDM Balai Taman Nasional Komodo dalam tata kelola dan pemenuhan standar layanan destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	2 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.3.	Sosialisasi dan implementasi regulasi terbaru tentang tata kelola dan standar layanan destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	2 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.4.	Pelatihan bagi SDM Balai Taman Nasional Komodo di bidang literasi digital di sektor industri Pariwisata	KTA 1 Taman Nasional Komodo	2 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.5.	Pelatihan SDM Balai Taman Nasional Komodo di bidang bahasa asing	KTA 1 Taman Nasional Komodo	2 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.6.	Peningkatan kemampuan kerjasama dan koordinasi rutin dalam pengelolaan destinasi pariwisata premium	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.7.	Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan dan regulasi terbaru tentang tata kelola dan	KTA 1 Taman Nasional Komodo	1 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
	standar layanan destinasi super prioritas				• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.8.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas aparat pemerintah daerah tentang pemenuhan standar pelayanan pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.9.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas aparat pemerintah daerah tentang literasi pariwisata termasuk warisan budaya	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.10.	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.11.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas aparat pemerintah daerah tentang literasi digital dalam industri Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.12.	Pelatihan strategi promosi destinasi melalui *brand ambassador* yang dapat menjadi *influencer* wisatawan	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.13.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang konsep pengelolaan Pariwisata berbasis *Sustainable Development Goal* (SDG's)	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.14.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang kerja sama, koordinasi dan kolaborasi model *pentahelix* dalam pengembangan Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.1.15.	Pelatihan pengembangan pusat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan pengembangan wisata tematik	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.	Kapasitas SDM Swasta				
3.2.1.	Peningkatan kapasitas SDM pelaku Pariwisata dari unsur swasta tentang tata kelola destinasi wisata super prioritas dan pemenuhan standar layanan destinasi super prioritas	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.2.	Peningkatan kapasitas ekonomi kreatif dan keterampilan bisnis Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.3.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang keterampilan manajemen Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.4.	Pelatihan keterampilan pemasaran Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.5.	Pelatihan keterampilan pemasaran digital Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
3.2.6.	Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang literasi Pariwisata termasuk warisan budaya dan literasi digital dalam pemasaran produk wisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.7.	Peningkatan keterampilan manajemen *event* Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.8.	Peningkatan keterampilan pelayanan pelanggan	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.9.	Pelatihan manajemen sumber daya manusia	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.10.	Pelatihan pengelolaan akomodasi Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.11.	Pelatihan pengelolaan transportasi Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.12.	Pelatihan pengelolaan keuangan bisnis Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
3.2.13.	Peningkatan keterampilan kepada pelaku usaha Pariwisata dalam mengembangkan produk Pariwisata yang inovatif	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.14.	Pengembangan produk Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.2.15.	Sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.	Kapasitas SDM Masyarakat Lokal				
3.3.1.	Penguatan kapasitas masyarakat adat dalam tata kelola dan pemenuhan	KTA 1 Taman Nasional Komodo	3 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
	standar layanan destinasi super prioritas				• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.2.	Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan dan regulasi terbaru tentang tata kelola dan standar layanan destinasi super prioritas	KTA 1 Taman Nasional Komodo	3 kegiatan	2024	• Balai Taman Nasional Komodo • Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.3.	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Labuan Bajo.	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
3.3.4.	Peningkatan kapasitas kaum milenium dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Labuan Bajo.	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.5.	Peningkatan partisipasi masyarakat adat/lokal sebagai pelaku Pariwisata	• KTA 1 Taman Nasional Komodo • KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	2 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.6.	Peningkatan kapasitas pengelolaan destinasi bagi pelaku Pariwisata dari masyarakat lokal.	• KTA 1 Taman Nasionql Komodo • KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	2 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.7.	Pelatihan Pariwisata berbasis masyarakat	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.8.	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam upaya pengendalian lingkungan	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.9.	Pelatihan tentang perdagangan manusia dan prostitusi	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.10.	Peningkatan kapasitas pengetahuan tentang konservasi, serta perlindungan dan pelestarian alam	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
3.3.11.	Peningkatan kualitas SDM di bidang literasi Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.12.	Pengembangan program khusus yang inklusif	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.13.	Pelestarian kesenian tradisional masyarakat	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	3 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
3.3.14.	Program sertifikasi kompetensi bagi SDM Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
4.	Iklim Usaha dan Investasi				
4.1.	Fasilitasi Penanaman Modal DPN Labuan Bajo				
4.1.1.	Penyusunan *Invesment Project Ready to Offer* (I-PRO DPN) Labuan Bajo – Pembangunan Jalan Lingkar Wae Kelambu	Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	1 dokumen	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.1.2.	Penyusunan I-PRO DPN Labuan Bajo – Pembangunan Lintas Ruas Jalan Lintas Utara Flores	• Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan • Sub-KTA 2 Batu Cermin-Wae Kelambu	1 dokumen	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.1.3.	Penyusunan I-PRO DPN Labuan Bajo – Pembangunan Terminal Terpadu Kampung Ujung	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
					Penanaman Modal • BKPM
4.1.4.	Penyusunan I-PRO DPN Labuan Bajo – Penataan Parkir	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.1.5.	Penyusunan I-PRO DPN Labuan Bajo – Pembangunan Dermaga Kapal Pesiar	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.1.6.	Penyusunan I-PRO DPN Labuan Bajo – Pengembangan *Pede Seafood Paradise*	Sub-KTA 3 Gorontalo-Golo Bilas	1 dokumen	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
4.1.7.	Penyusunan I-PRO DPN Labuan Bajo – Pengembangan *Komodo Museum and Tourism Center*	Sub-KTA 1 Labuan Bajo Perkotaan	1 dokumen	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.1.8.	Penyusunan I-PRO DPN Labuan Bajo – Pengembangan *Eco-Marine Park*	Perairan Bari Sub-KTA Longos	1 dokumen	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.1.9.	Promosi dan penawaran I-PRO ke calon investor - *Regional Investment Forum*	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.1.10.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Manggarai Barat	3 badan usaha	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.2.	Pengembangan Iklim Usaha dan Investasi				

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
4.2.1.	Peningkatan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi di sektor Pariwisata	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.2.2.	Mengembangkan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang Pariwisata	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat BOPLBF
4.2.3.	Pengembangan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata dan mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4.2.4.	Pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	Manggarai Barat	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4.2.5.	Pengembangan informasi peluang investasi di kawasan Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
4.2.6.	Peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4.2.7.	Peningkatan sinergi promosi penanaman modal di bidang Pariwisata dengan sektor terkait	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4.3.	Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata				
4.3.1.	Penetapan keringanan pajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4.3.2.	Peningkatan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi di sektor Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.3.3.	Penyusunan peraturan daerah tingkat provinsi mengenai pajak restoran PB1 dan pajak hotel PB1 untuk objek pajak kapal wisata (*liveaboard)*	DPN Labuan Bajo	1 dokumen	2024	• Pemerintah Provinsi NTT • Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kegiatan	Lokasi	Target (satuan)	Tahun	Pelaksana
4.4.	Peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • BKPM
4.4.1.	Penyediaan informasi peluang investasi di kawasan Pariwisata	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4.4.2.	Penyediaan informasi profil investasi	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	1 kegiatan	2024	• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF
4.4.3.	Promosi investasi sektor Pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	KTA 2 Labuan Bajo dan sekitarnya	2 kegiatan	2024	• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat • BOPLBF